

Penerbitan Naskah Sumber Arsip,
Seri Citra Daerah: Nomor 10

CITRA SULAWESI SELATAN DALAM ARSIP





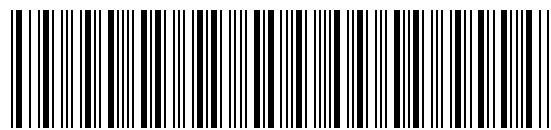
Penerbitan Naskah Sumber Arsip,
Seri Citra Daerah: Nomor 10

Edisi Pertama
Cetakan Pertama, 2009

CITRA SULAWESI SELATAN DALAM ARSIP

Hak Cipta @ 2009 pada Arsip Nasional Republik Indonesia
Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak
atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini
dalam bentuk apa pun tanpa izin dari penerbit.

ISBN:
978-979-3914-43-5



978-979-3914-42-8



Arsip Nasional Republik Indonesia

Jl. Ampera Raya No. 7, Cilandak Timur, Jakarta 12560

Telp. 62-21-7805851, Fax.62-21-7810280, 7805812

<http://www.anri.go.id>, e-mail: info@anri.go.id

CITRA SULAWESI SELATAN DALAM ARSIP

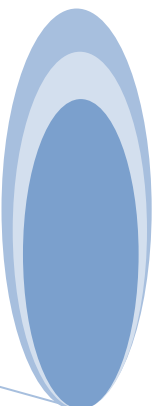


ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA, DESEMBER 2008



LAMBANG PROVINSI SULAWESI SELATAN
2008





DR. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH., MSi, MH.
Gubernur Sulawesi Selatan
Periode 2008 – 2013



IR. H. AGUS ARIFIN NU'MANG, MS.
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan
Periode 2008 – 2013



DRS. MOHAMMAD RUM
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan
Periode 2004 – 2009



H. A. MUALIM, SH.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
2008 – Sekarang

MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN



Inspektur Jenderal Polisi
Mathius Salempang
Kapolda Sulawesi Selatan
2008 – Sekarang



Mayor Jenderal TNI
Djoko Susilo Utomo
Pangdam VII/Wirabuana
2008 – Sekarang



H. Rivai Arsyad, SH.
Kepala Pengadilan Tinggi
Makassar, Sulawesi Selatan
2008 – Sekarang



Mahfud Mannan, SH.
Ketua Kejaksaan Tinggi
Makassar, Sulawesi Selatan
2008 – Sekarang

GUBERNUR SULAWESI,
GUBERNUR SULAWESI SELATAN DAN TENGGARA,
GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PERIODE 1945-2008



DR.GSSJ Ratulangi
Gubernur Sulawesi
1945-1949



R. Sudiro
Gubernur Sulawesi
1951-1953



Winarto D.
Gubernur Sulawesi
1953-1954



L.Daeng Pasewang
Gubernur Sulawesi
1954-1956



A.P. Petarani
Gubernur
Sulawesi/
Sulselra
1956-1960



A.A. Rivai
Gubernur
Sulselra/
Sulsel
1960-1966



Achmad Lamo
Gubernur
Sulsel
1966-1978



Andi Odang
Gubernur
Sulsel
1978-1983



Achmad
Amiruddin
Gubernur Sulsel
1983-1993



H.Z.B. Palaguna
Gubernur Sulsel
1993-2003



H.M. Amin Syam
Gubernur Sulsel
2003-2007



Ahmad Tanri Bali
Lamo
Pejabat Gubernur
Sulsel
2007-2008



Syahrul Yasin Limpo
Gubernur Sulsel
2008-2013

LAMBANG PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN DI LINGKUNGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN



Kabupaten
Bantaeng



Kabupaten
Barru



Kabupaten
Bone



Kabupaten
Bulukumba



Kabupaten
Enrekang



Kabupaten



Kabupaten



Kabupaten



Kabupaten



Kabupaten

Goa

Jeneponto

Luwu

Luwu Timur

Luwu Utara



Kabupaten Maros



Kabupaten Pangkajene Kepulauan



Kabupaten Pinrang



Kabupaten Selayar



Kabupaten Sinjai



Kabupaten Sidenreng Rappang



Kabupaten Soppeng



Kabupaten Takalar



Kabupaten Tana Toraja



Kabupaten Wajo



Kabupaten Toraja Utara



Kota Makassar



Kota Pare-Pare

Kota Palopo

BUPATI/WALIKOTA DI LINGKUNGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN



Nurdin Abdullah
Bupati Bantaeng



H.A.M. Rum
Bupati Barru



H.A.M Idris G.
Bupati Bone



A.M. Sukria S.
Bupati Bulukumba



H.L.T. La Tunrung
Bupati Enrekang



H.I. Yasin Limpo
Bupati Goa



H. Radjamilo
Bupati Jeneponto



A. Mudzakkar
Bupati Luwu



H. Andi Matta M.
Bupati Luwu Timur



H.M. Luthfi A.M.
Bupati Luwu Utara



H.A.N. Aminullah
Bupati Maros



H. Syafrudin Nur
Bupati Pangkep



H.A. Nawir, MP
Bupati Pinrang



H. Syahrir Wahab
Bupati Selayar



Andi Rudyanto A.
Bupati Sinjai



H. Rusdi Masse
Bupati Sidrap



H. Andi Soetomo
Bupati Soppeng



H. Ibrahim Rewa
Bupati Takalar



Johanis A. Situru
Bupati Tator



H.A. Asmidin
Bupati Wajo



Y.S. Dalipang
Caretaker Bupati Torut



H. Ilham Arief S.
Walikota Makassar

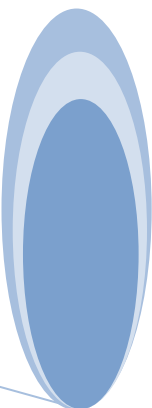


H.M. Zain Katoe
Walikota Pare-Pare



H.P.A. Tenri Adjeng
Walikota Palopo

Sambutan Kepala Arsip Nasional RI





SAMBUTAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu pulau, berbagai suku, agama dan budaya dalam perjalanan sejarahnya penuh dengan dinamika. Keindahan Indonesia terletak pada keberagaman tersebut dan warna pelangi yang disandangnya, seperti yang telah dipatirkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman dan warna pelangi tersebut juga terekam pada arsip yang merupakan warisan nasional. Sehingga tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa: "Dari semua aset negara yang ada, arsip adalah aset negara yang paling berharga. Ia merupakan warisan nasional yang perlu dipelihara dan dilestarikan dari generasi ke generasi. Tingkat peradaban suatu bangsa dapat dilihat dari pemeliharaan dan pelestarian arsipnya".

Sulawesi Selatan merupakan salah satu wilayah strategis di Indonesia, bukan saja daerah ini memiliki potensi Sumber Daya Alam yang bernilai ekonomis melainkan karena kekayaan budayanya menjadi objek wisata unggulan Indonesia. Dalam perjalanan sejarahnya hingga menjadi salah satu provinsi yang bernaung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diwarnai oleh berbagai dinamika baik sosial, ekonomi maupun politik. Dinamika tersebut juga terekam dalam arsip. Melalui khasanah arsip yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), maka disusunlah suatu program, yang disebut dengan Citra Daerah.

Program Citra Daerah pada dasarnya merupakan suatu program pengungkapan kembali memori kolektif daerah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai budaya bangsa dan nilai kebangsaan, memupuk rasa cinta tanah air dan mencegah disintegrasi bangsa dan sekaligus untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini didukung data dan fakta yang terkandung dalam arsip yang merefleksikan bagaimana suatu daerah ikut memberi warna dan corak dalam sejarah perjalanan bangsa dari masa ke masa. Melalui khasanah arsip tersebut dapat diperoleh informasi akurat dan obyektif mengenai peran masing-masing daerah dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Materi Citra Daerah berasal dari arsip baik dalam bentuk teks, peta, dan foto sebagai satu kesatuan informasi yang menggambarkan sebuah dinamika kolektif menuju pembentukan bangsa dan negara Indonesia, yang terbentuk atas dasar kesadaran sejarah. Pengalaman sejarah suatu bangsa adalah riwayat hidup bangsa itu sendiri. Apapun pengalaman yang dialami, duka, nestapa, darah, nyawa, dan pengorbanan untuk mencapai kemerdekaan, mengisi dan mempertahankan kemerdekaan serta membangun bangsa dan negara yang dicita-citakan bersama sebagai memori kolektif bangsa. Sebagai memori kolektif, dan jati diri bangsa serta warisan nasional, arsip tersebut menjadi bukti akan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dan nasional yang merupakan gambaran tentang dinamika berbangsa dan bernegara dan sekaligus merupakan bahan bukti pertanggungjawaban nasional bagi generasi mendatang.

Mencermati tumbuhnya semangat otonomi daerah dan dengan melihat latar belakang sejarah, Citra Daerah ini diharapkan dapat meluruskan dan meningkatkan pemahaman akan makna pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berayun di tengah derasnya arus globalisasi. Dengan demikian semangat otonomi daerah harus dipahami dalam makna yang bersifat integratif bagi kelangsungan kehidupan tatanan sosial, ekonomi, politik, dan budaya daerah yang pada gilirannya menjadi proses dinamika nasional.

Adanya keterbatasan penyajian materi sekiranya dapat dijadikan pelajaran berharga bagi penyempurnaan penyusunan Citra Daerah selanjutnya. Akhirnya dengan kehadiran Citra Daerah ini, diharapkan dapat merangsang tumbuhnya program lanjutan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Terima Kasih.

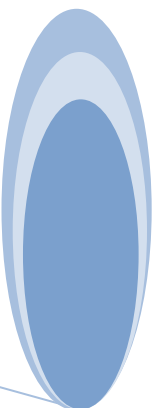
Jakarta, Desember 2008
Kepala,

Djoko Utomo

DAFTAR ISI

Lambang Provinsi Sulawesi Selatan _____	ii
Gubernur Sulawesi Selatan _____	iii
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan _____	iv
Ketua DPRD Sulawesi Selatan _____	v
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan _____	vi
Musyawarah Pimpinan Daerah Sulawesi Selatan _____	vii
Gubernur Sulawesi, Sulawesi Selatan dan Tenggara, dan Sulawesi Selatan _____	viii
Lambang Pemerintah Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan _____	ix
Bupati/Walikota di Lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan _____	x
Sambutan Kepala ANRI _____	xi
Daftar Isi _____	xiv
PENDAHULUAN _____	1
A. Latar Belakang _____	1
B. Letak Geografis dan Sosial Budaya _____	2
C. Arti Lambang Provinsi Sulawesi Selatan _____	5
D. Perkembangan Sejarah Sulawesi Selatan _____	6
1. Periode Sebelum Kedatangan Bangsa Eropa _____	7
2. Periode Kolonialisme Bangsa Eropa _____	11
3. Periode Pendudukan Jepang _____	18
4. Periode Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia _____	20
E. Wisata Budaya dan Aset Alam Sulawesi Selatan _____	30
F. Daftar Pustaka _____	33
CITRA SULAWESI SELATAN DALAM ARSIP _____	34
A. Geografis _____	35
B. Politik dan Pemerintahan _____	49
C. Pertahanan dan Keamanan _____	93
D. Pertambangan _____	113
E. Perekonomian dan Perdagangan _____	118
F. Perhubungan _____	128
G. Pertanian dan Perkebunan _____	139
H. Pendidikan _____	148
I. Lingkungan Hidup dan Kependudukan _____	164
J. Keagamaan _____	167
K. Kebudayaan dan Pariwisata _____	176
L. Olah Raga dan Kesehatan _____	209
DAFTAR ARSIP _____	218
PENUTUP _____	249

Pendahuluan



CITRA SULAWESI SELATAN DALAM ARSIP

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Mewacanakan "daerah" sebagai kondisi dasar diharapkan akan membangun pemahaman kita tentang bangsa (*nation*), dan rasa kebangsaan (nasionalisme). Di masa lalu eksistensi daerah terbentuk karena ikatan kultural yang melekat pada wilayah dan masyarakatnya. Dalam perkembangannya eksistensi dan dinamika daerah diwujudkan pada kemandirian dan prakarsa daerah yang bersangkutan untuk memajukan masyarakat dan wilayahnya. Dalam konteks tersebut keberhasilan yang dicapai suatu daerah akan menjadi sumbangan bagi keberhasilan dalam membangun sebuah bangsa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah upaya dasar yang melandasi keotonomian di daerah. Otonomi Daerah pada hakekatnya adalah sebagai suatu upaya untuk meningkatkan peran daerah dalam memberikan dan mendekatkan layanan prima kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya masing-masing secara optimal.

Salah satu aspek yang cukup mendasar dengan penerapan otonomi daerah berkenaan dengan fungsi kearsipan adalah beralihnya kewenangan untuk mengelola arsip statis di daerah dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) kepada Pemerintah Daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu diberikan informasi mengenai peristiwa masa lalu tentang daerah masing-masing agar Pemerintah Daerah dapat mengembangkan upaya penyelamatan dan pelestarian arsip statis secara mandiri dan bertanggung jawab pada masa mendatang. Pemaknaan mengenai pentingnya masa lampau yang terekam dalam arsip harus dimaknai oleh kearifan lokal dan nasional dalam upaya mempertahankan nilai-nilai martabat bangsa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses

pembentukan *nations and character building* sesuai cita-cita dan nilai-nilai luhur bangsa.

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, Arsip Nasional Republik Indonesia ikut serta berperan aktif untuk memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat pelaksanaan otonomi daerah melalui Program Citra Daerah.

Dengan semangat otonomi daerah dan dengan melihat latar belakang sejarah, Citra Daerah ini diharapkan dapat memberikan informasi akurat dan obyektif mengenai peran masing-masing daerah dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meluruskan dan meningkatkan pemahaman kita akan makna tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian semangat otonomi daerah harus dipahami dalam makna yang bersifat integratif dan bukan disintegratif terhadap tatanan sosial budaya maupun politik kenegaraan.

Program Citra Daerah yang dikembangkan Arsip Nasional RI sejak tahun 2003 dilaksanakan dalam bentuk penyerahan hasil alihmedia (berupa *hard copy* dan *soft copy*) dari khasanah arsip statis yang tersimpan di ANRI kepada seluruh provinsi di Indonesia. Salah satu provinsi yang menerima Citra Daerah pada tahun 2008 ini adalah Provinsi Sulawesi Selatan.

Arsip mengenai Sulawesi Selatan yang terdapat dalam naskah Citra Daerah ini mencakup kurun waktu mulai awal abad ke-17 sampai dengan abad ke-20, yaitu sejak masa *Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)* sampai dengan masa Republik Indonesia.

Arsip tersebut berisikan informasi tentang berbagai fenomena dan peristiwa yang terjadi di Sulawesi Selatan pada periode tersebut. Citra Sulawesi Selatan dalam arsip ini diharapkan dapat memupuk rasa cinta tanah air, berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bagi masyarakat Sulawesi Selatan pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

B. LETAK GEOGRAFIS DAN SOSIAL BUDAYA

Provinsi Sulawesi Selatan terletak di jazirah Selatan Pulau Sulawesi pada posisi $0^{\circ}12'-8^{\circ}$ Lintang Selatan (LS) dan

116⁰48'–122⁰36' Bujur Timur (BT). Secara administratif, provinsi yang beribukota di Makassar ini, di sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Barat, sebelah Barat dengan Selat Makassar, sebelah Timur dengan Teluk Bone dan Provinsi Sulawesi Tenggara, dan sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores.

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan wilayah yang menempati posisi strategis di Kawasan Timur Indonesia. Mayoritas wilayahnya berada pada daerah yang cukup tinggi, dengan kondisi geografis yang berbukit–bukit yang membentang dari bagian Utara ke bagian Selatan. Luas wilayah provinsi ini adalah 62.482,54 km² (42% dari luas seluruh pulau Sulawesi dan 4,1% dari luas seluruh wilayah Indonesia). Tabel berikut memperlihatkan posisi ketinggian daerah dan luas wilayahnya di seluruh Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut:

KETINGGIAN DAERAH (dpl)	LUAS WILAYAH
0 – 100 meter dpl	11. 798, 76 km ²
100 – 500 meter dpl	10.123,40 km ²
500 – 1000 meter dpl	16.844,96 km ²
1000 meter dpl – ke atas	23.695,92 km ² (36,65% dari luas wilayah Sulawesi Selatan berada pada ketinggian 1.000 meter ke atas).

Wilayah Sulawesi Selatan mempunyai musim penghujan lebih lama dari waktu musim kemarau, hal ini memberikan keuntungan bagi kehidupan pertanian yang berkembang pesat. Potensi perairan di wilayah ini pun cukup besar yang ditunjang dengan keadaan fisik alam dimana terdapat banyak dataran rendah yang subur dan banyak dialiri sungai-sungai. Di wilayah ini ada sekitar 72 sungai di antaranya **Sungai Kalaena, Sungai Kanjiro, Sungai Bolete, Sungai Balease, Sungai Mambi, Sungai Karama, Sungai Saddang**. Selain potensi sungai yang besar, juga terdapat 4 danau besar, yaitu: **Danau Tempe, Sidenreng, Matana dan Towuti**. Potensi sungai-sungai tersebut sebagian besar dipergunakan untuk sumber pengairan bagi irigasi persawahan dan Pembangkit Listrik Tenaga Air

(PLTA), di antaranya 165 MW untuk **PLTA Larona**. Sedangkan perairan danau seluas 86.500 hektar digunakan untuk budidaya perikanan perairan umum.

Di sepanjang pesisir dijumpai tanah dataran yang luas, sedangkan pada daerah yang jauh dari pantai, ke arah pedalaman dijumpai wilayah pegunungan dengan puncak tertingginya adalah **Gunung Bawakaraeng** (*piek van Bonthain*) 3.042 M. Sedangkan gunung-gunung yang lainnya yakni **Gunung Latimojong, Gunung Porong, Gunung Lokka, Gunung Kadingloe, Gunung Salomatae, Gunung Timpurung, Gunung Balombong, Gunung Aru-Aru**, dll. Lingkungan fisik yang datar maupun pegunungan ini memberikan sumber ekonomi pertanian, baik berupa produk usaha pertanian berupa beras, jagung, kacang tanah, dan lainnya ataupun produksi alam berupa hasil hutan.

Masyarakat Sulawesi Selatan merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari beberapa suku bangsa, antara lain **Bugis, Makassar, Toraja, Pattae, Duri (Massenrenpulu)** dan **Mandar**. Setiap suku bangsa tersebut merupakan kesatuan sosial tersendiri, dengan latar belakang daerah, tradisi budaya, agama, dan kepercayaan masing-masing. Suku Bugis dibandingkan ketiga suku lainnya, menempati wilayah pemukiman yang cukup luas, dan menempati 16 Kabupaten di Sulawesi Selatan.

Bahasa yang umum digunakan adalah **Bahasa Makassar, Bugis, Luwu, Toraja, Mandar, Duri, Konjo** dan **Pattae**.

Akibat kontak perdagangan yang terjadi pada masa lampau telah membuat daerah Sulawesi Selatan mengalami berbagai pengaruh asing, termasuk dari segi kepercayaan atau agama, sehingga penduduk Sulawesi Selatan menganut berbagai macam agama dan kepercayaan. Agama Islam merupakan agama mayoritas penduduk Sulawesi Selatan. Agama lainnya adalah Kristen Protestan, Katholik, Hindu dan Budha. Di beberapa daerah Sulawesi Selatan masih tetap menganut kepercayaan lama, yaitu **aluk todolo** di Tana Toraja, **tolontang** di Sidenreng, serta **Ammatoa** di Bulukumba. Disamping itu, sistem kepercayaan tradisional yang merupakan peninggalan leluhur masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat Bugis. Kepercayaan tradisional ini sekarang sudah

berbaur dengan unsur-unsur ajaran agama resmi yang telah ada.

C. ARTI LAMBANG PROVINSI SULAWESI SELATAN



Lambang Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diatur dalam **Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1972** yang menggambarkan unsur-unsur historis, kultural, patriotik, sosiologis, ekonomis, dan menunjukkan bahwa daerah Sulawesi Selatan merupakan bagian mutlak dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lambang daerah tersebut terdiri atas tujuh bagian, yaitu dengan masing-masing makna sebagai berikut :

- **Bintang bersudut dan bersinar lima**, sebagai Nur Cahaya yang mewujudkan lambang Ketuhanan Yang Maha Esa.
- **Lingkar 17 buah padi dan 8 kapas dengan kelopak bergerigi 4 dan buah bergerigi 5**, melambangkan 17-8-45 sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- **Benteng Somba Opu dilihat dari atas**, mewujudkan lambang kepahlawanan rakyat Sulawesi Selatan dalam menentang imperialisme, kolonialisme, neo-kolonialisme, dan feodalisme. Ruang benteng masing-masing berisi:
 - **Perahu Phinisi berlayar di atas tiga gelombang**, melambangkan jiwa pelaut yang ulet, penuh melintasi dan sanggup melaksanakan tujuan

perjuangan 17 Agustus 1945. Perahu berhaluan ke barat, disesuaikan dengan letak geografis ibukota Republik Indonesia.

- **Pacul**, menggambarkan masyarakat agraris sebagai basis dan **gerigi mesin**, menggambarkan industri sebagai tulang punggung.
- **Buah Kelapa**, menggambarkan kekayaan hasil bumi Sulawesi Selatan.
- **Sebilah badik terhunus berpamor satu berlekuk 5**, melambangkan jiwa kepahlawanan serta kesiapsiagaan dalam membela kehormatan bangsa dan tanah air yang berdasarkan Pancasila. Lima lekuk pamor disesuaikan bilangan-bilangan keramat tiap sila dalam falsafah Pancasila.
- **Gunung, desa, dan petak-petak sawah**, sebagai pangkal kesuburan menuju masyarakat adil dan makmur. 23 petak sawah disesuaikan dengan jumlah daerah tingkat II di Sulawesi Selatan yang keseluruhannya merupakan salah satu lumbung padi di Indonesia.
- **Sebuah semboyan ditulis dalam huruf Lontara yang berbunyi Toddo'puli**, sebagai semboyan masyarakat Sulawesi Selatan yang bermakna teguh dalam keyakinan.
- Selembar pita bertuliskan '**Sulawesi Selatan**', sebagai salah satu provinsi di Indonesia. **Pita bercorak sutera**, melambangkan kebudayaan khas yang bernilai tinggi sejak dahulu kala.

D. PERKEMBANGAN SEJARAH SULAWESI SELATAN

Awal pembentukan pemerintahan di wilayah Sulawesi Selatan berdasarkan catatan sejarah dan tradisi lisan yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat menunjukkan bahwa tempat yang dipandang sebagai cikal bakal pemukiman pertama adalah tempat dimana ditemukan *Gaukang*. Gaukang dipandang sebagai lambang pembentukan satu kesatuan masyarakat (kesatuan kaum). Perkembangan dan penambahan penduduk yang dialami oleh kelompok kaum menimbulkan persebaran penduduk dengan membuka perkampungan baru. Namun, kelompok yang tersebar tersebut tetap terpaut pada

gaukang mereka. Kesatuan dari kelompok ini merupakan satu kesatuan pemerintahan yang disebut *bori*. Bori merupakan wilayah pemerintahan dari satu kelompok kaum yang terpaut pada gaukang.

Jalinan persahabatan dan ikatan perjanjian untuk saling membantu antar bori, melahirkan suatu bentuk penataan pemerintahan yang baru sebagai suatu konfederasi. Sehingga terbentuklah beberapa konfederasi, di antaranya **Konfederasi Goa** yang merupakan gabungan dari sembilan wilayah bori, yaitu: **Tombolo, Lakiung, Parang-Parang, Data, Agangjenne, Saumate, Bissei, Sero** dan **Kali**.

Namun, bentuk konfederasi dengan tujuan untuk dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan, tidak dapat berfungsi dengan baik. Bahkan kondisi ini mengawali terjadinya perubahan-perubahan bentuk konfederasi. Konfederasi Binamu, Bangkala dan Laikang membentuk satu kesatuan Federasi Daerah-daerah **Turatea**. Sedangkan Konfederasi Goa berubah menjadi **Kerajaan Goa**, dengan menobatkan **Tu'manurung** sebagai Ratu Kerajaan Goa yang pertama dan dipandang sebagai peletak dasar Kerajaan Goa.

1. PERIODE SEBELUM KEDATANGAN BANGSA EROPA

Berdasarkan catatan dan data-data sejarah, sejak sekitar abad ke-14 di daerah Sulawesi Selatan telah berdiri sejumlah kerajaan yang cukup memiliki wibawa dan kedaulatan, khususnya terhadap wilayah kekuasaannya. Di antara kerajaan-kerajaan tersebut yakni Kerajaan Goa, Siang, Luwu, Bone, Soppeng, Sidenreng, Suppa, Tallu Lembana (Tana Toraja kini) serta beberapa kerajaan kecil lainnya yang diketahui telah ada.

Pada akhir abad ke-15 berdiri Kerajaan Elektif Wajo, serta pada abad ke-16 di daerah Mandar lahir serikat kerajaan-kerajaan kecil yang lazim disebut Mandar. Di antara kerajaan-kerajaan tersebut pada waktu itu lebih diwarnai oleh persaingan-persaingan untuk memperluas hegemoni kekuasaan.

Berdasarkan catatan kunjungan saudagar Portugis pada abad ke-16, dilaporkan bahwa di pesisir barat jazirah selatan pulau Sulawesi terdapat tiga kerajaan kecil yang telah menjalin hubungan dagang dengan pedagang Melayu. Ketiga kerajaan

tersebut, yakni Kerajaan Siang (sekarang Kabupaten Pangkajene dan Maros), Kerajaan Suppa serta Bacukiki di sekeliling Teluk Pare-Pare. Keberadaan Kerajaan Siang pada waktu itu merupakan suatu kerajaan yang penting dan pada tahun 1545 diperkirakan penduduknya berjumlah 40.000 orang. Bahkan sebelum **Pelabuhan Somba Opu** berkembang menjadi bandar niaga, di Sulawesi telah berkembang beberapa pelabuhan dagang yang penting, diantaranya Suppa, Siang dan Tamboku.

Pelabuhan Somba Opu yang dikembangkan oleh Kerajaan Goa pada masa pemerintahan **Daeng Manre Tu'maparissi' Kalonna**, menjadi salah satu pelabuhan perdagangan terkemuka di Sulawesi. Somba Opu merupakan salah satu upaya Kerajaan Goa untuk menjadikan kerajaan maritim yang sangat berpengaruh di Sulawesi Selatan. Pada saat yang bersamaan dikembangkan pula sebuah pangkalan armada niaga di Makassar. Makassar pada waktu itu dijadikan sebagai ibukota kerajaan dan kota pelabuhan yang dikenal dunia internasional dan dijadikan sebagai pusat kota terdepan di Kerajaan Goa-Tallo yang mewadahi benteng-benteng Somba Opu, Panakkukang dan Ujung Pandang.

Menurut sumber Eropa tertua mengenai orang Makassar, yakni Catatan Perjalanan **Tome Pires** yang berjudul "**Suma Orientale**" dalam tahun 1513, dikatakan bahwa Orang Makassar itu telah melakukan perdagangan dengan Malaka, Jawa, Siam, Borneo dan semua negeri-negeri antara Pahan dan Siam. Orang Makassar adalah pelaut yang ulung, dengan perahu-perahunya mengarungi lautan dan melakukan pelayaran ke dekat Pulau Pegu (Philipina), Maluku, Bandan dan semua pulau sekitar pulau Jawa. Menurut catatan Tome Pires, Orang Makassar dalam arti suku bangsa (etnis), yaitu penduduk yang menggunakan bahasa Makassar dan mendiami pesisir Makassar ujung selatan jazirah Sulawesi Selatan mulai pesisir Makassar (sekarang) atau muara sungai-sungai Tallo Jenebarang sampai Bantaeng di Selatan yang meliputi negeri-negeri orang Makassar (Parasanganna Mangkasaraka), yaitu Galesong, Takalar, Topejawa, Laikang, Cikoang, dan Bangkala.

Orang Makassar dan Bugis melakukan perdagangan dengan mempergunakan perahu layar ukuran besar dengan membawa barang dagangan berupa beras putih, emas untuk

ditukarkan dengan bahan-bahan pakaian dari Cambay, Benggali dan Keling.

Seiring dengan tumbuhnya Kerajaan Goa-Tallo sebagai kerajaan utama di Sulawesi Selatan, maka pelabuhan utama kerajaan menjadi pusat pedagang dari seluruh Nusantara, Eropa dan Cina. Pada masa pemerintahan Raja Goa ke-9, Daeng Manre Tu'maparissi' Kalonna (1510-1546) merupakan awal dijumpainya catatan yang menceritakan hal ikhwal pemerintahannya. Dari catatan tersebut diketahui bahwa pada masa Kerajaan Goa telah dimulai usaha perluasan wilayah. Kerajaan-kerajaan kecil (bori) yang kurang kuat ditaklukkannya, seperti Garassi, Katingang, Parigi, Siang (Pangkajene), Bulukumba, Selayar, dan Panaikang. Terhadap kerajaan-kerajaan yang cukup kuat dijalin ikatan perjanjian persahabatan seperti Maros (Marasu), Polombangkeng (Bajing), Luwu, dan Kerajaan Bone.

Perluasan wilayah kekuasaan yang dicanangkan Tu'maparissi' Kalonna, kemudian dilanjutkan penggantinya yaitu **I Manriogau Daeng Bonto Karaeng Lakiung** (1547-1565) sebagai Raja Goa ke-10, yang dikenal sebagai ahli strategi perang, giat berusaha, kaya dan sangat berani serta merupakan raja yang sangat memperhatikan ketentaraan dengan membentuk lembaga militer/ketentaraan (*tumakkajanang*), serta menata pembagian tugas dalam bidang administrasi pemerintahan dengan menciptakan jabatan *tu'mailalang*. Pada masa pemerintahannya, seluruh daerah yang berada di Sulawesi Selatan telah tunduk dan patuh di bawah pemerintahan Kerajaan Goa.

Pada masa pemerintahan Raja Goa ke-10 inilah mulai berkembang berbagai budaya dan agama di Makassar, termasuk diperkenalkannya agama Islam oleh para pedagang baik dari pesisir India maupun yang datang dari Pulau Jawa. Dalam catatan sejarah dan Lontara orang Makassar, Raja Goa ke-10, memberi ijin kepada pedagang-pedagang Melayu dan pemuka-pemuka agama Islam dari Jawa (Demak), Malaka dan Ternate untuk menetap di Mangalekana (Somba Opu).

Pada masa pemerinatahan Raja Goa ke-12 telah didirikan sebuah mesjid pertama di Somba Opu. Raja Goa dan Tallo menurut Lontara Goa-Tallo, menerima Islam sebagai agama

kerajaan resmi pada 22 September 1605. Adapun ulama yang mengislamkannya adalah **Dato'ri Bandang** yang berasal dari Kota Tengah (Minangkabau) beserta **Khatib Sulaiman (Dato' Patimang)** yang menyebarkan agama Islam di Tana Luwu dan **Khatib Bungsu (Dato ri Tiro)** yang mengajarkan ajaran Tasawuf di Bulukumba.

Pada tanggal 9 November 1607 (masa pemerintahan **Sultan Alauddin**), seluruh rakyat Goa-Tallo memeluk Islam dan melaksanakan Shalat Jum'at bersama di Mesjid Tallo dan Mesjid Somba Opu. Dalam khotbah didoakan untuk keselamatan raja dan kesempurnaan Kota Makassar sebagai ibukota kerajaan Islam yang pertama di Sulawesi Selatan.

Dalam upaya penyebaran agama Islam, Raja Goa ke-14 Sultan Alauddin mengajak kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan untuk memeluk agama Islam. Ajakan tersebut diterima dengan damai oleh beberapa kerajaan kecil. Sementara itu, kerajaan-kerajaan Bugis yang kuat (Bone, Soppeng, Wajo, Ajatapparang) tidak menerimanya. Implikasinya, pada tahun 1608 Kerajaan Goa memerangi kerajaan-kerajaan tersebut sampai dikalahkannya. Peperangan Goa melawan kerajaan-kerajaan Bugis tersebut berlangsung selama empat tahun. Peristiwa itu dalam Sejarah Bugis terkenal sebagai Peperangan Islam (**Musu' sellenngé**). Pada zaman kekuasaan Sultan Alauddin (Raja Goa ke-14), seluruh Kerajaan Bugis dan Makassar telah menerima Islam sebagai agama resmi kerajaan.

Pada masa pemerintahan Raja Goa ke-15 **Sultan Malikussaid Tumenangan ri Papanbatuna** (1639-1653), yang dibantu Mangkubumi Kerajaan Goa (Karaeng Pattingalloang), susunan ketatanegaraan Kerajaan Goa disempurnakan. Makassar dikembangkan menjadi kota dan bandar niaga dengan segala alat perlengkapannya. Selain itu, juga dilengkapi dengan benteng-benteng pertahanan utama **Somba Opu**, keraton raja yang megah, serta dilindungi **benteng Panakkukang** di sebelah Selatan dan **benteng Ujung Pandang** di sebelah Utara.

Pada masa Raja Goa ke-16, **Sultan Hasanuddin** (1653-1669) Makassar berkedudukan sebagai bandar niaga, pusat lalu lintas perdagangan, serta sebagai benteng pertahanan untuk melindungi pusat kerajaan yang berkedudukan di Kale Gawe.

2. PERIODE KOLONIAL BANGSA EROPA

Hubungan bangsa Eropa pertama dengan Sulawesi Selatan terjadi pada tahun 1538, Portugis berhasil mengadakan hubungan dengan Raja Goa, Tu'maparisi Kallonna. Selain untuk menjalin hubungan dagang juga dalam rangka menyebarkan Agama Katholik. Tahun 1543, Gubernur Portugis di Ternate mengirimkan **Antonio Payva** untuk berdagang kayu hitam dan menyebarkan Agama Katholik di Kerajaan Siang dan Suppa. Selanjutnya seorang pendeta bangsa Portugis bernama **Vicente Vegas** dengan rekannya, **Manuel Mentol**, tinggal di Suppa dan Siang selama tiga tahun untuk melakukan missinya. Namun, pada pertengahan abad ke-16 penyebaran Agama Katholik tidak diteruskan lagi sehingga pengaruhnya hilang.

Meningkatnya perdagangan di wilayah Sulawesi Selatan, menjadikan Makassar sebagai pusat perdagangan rempah-rempah. Adanya berita bahwa orang-orang Portugis, Spanyol, Inggris, Denmark dan Perancis membeli pala dan bunga pala di Makassar dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan yang dibeli Armada Dagang Belanda di Maluku, telah mempengaruhi Armada Dagang Belanda untuk menjalin hubungan dagang dengan Kerajaan Goa. Atas izin dari Sultan Alauddin (1593-1639), **Claes Luersen** pada tahun 1602 mendirikan sebuah kantor dagang Belanda yaitu Perkumpulan Perseroan Hindia Timur – *Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)*, di Makassar.

Tuntutan VOC dan keinginannya untuk menguasai sendiri pelayaran dan perdagangan menyebabkan perselisihan dan pertikaian dengan Kerajaan-kerajaan setempat. Monopoli perdagangan yang dilakukan oleh Belanda, dengan memberlakukan pembatasan perdagangan terhadap bangsa Asing lain (Spanyol, Portugis), mengundang reaksi keras dari Sultan Hasanuddin sebagai Raja Goa pada waktu itu. Dalam usahanya untuk menjalankan monopoli, Belanda melakukan politik *"Devide at impera"*. Pertentangan lama antara Kerajaan Bone dan Kerajaan Goa, yang dilatarbelakangi usaha kerajaan Goa untuk memperluas wilayah kekuasaannya, diungkit Belanda untuk menarik keuntungan dari pertentangan tersebut.

Belanda menjalin kerja sama dengan Arung Palaka dari Kerajaan Bone untuk menghadapi Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Goa.

Perselisihan dan pertikaian yang sering terjadi antara Kerajaan Goa dan VOC akhirnya menjurus ke arena perang yang besar. Maka ketika **Cornelis Speelman** memaklumkan perang kepada Kerajaan Goa, pada tanggal 21 Desember 1666 terjadilah Perang Makassar dan berakhir tanggal 18 November 1667 dengan dicapainya **Perjanjian Bongaya**.

Berdasarkan Perjanjian Bongaya, wilayah yang dinyatakan berada di bawah kekuasaan VOC adalah daerah-daerah yang mengelilingi wilayah Kerajaan Makassar dan sebagai pagar batas kerajaan. Pada bagian Timur terdapat daerah kekuasaan Kompeni yang disebut Distrik Bagian Timur (*Ooster-Districten*) Bulukumba dan Bonthain, pada bagian Barat dibatasi wilayah Makassar, bagian Utara dibatasi oleh wilayah Distrik Bagian Utara (*Noorder Districten*) dan pada bagian Selatan dibatasi oleh wilayah Distrik Bagian Selatan (*Zuider Districten*).

Peran Kerajaan Goa Makassar sebagai pengawas bandar niaga Makassar dihapuskan. Lokasi kegiatan perdagangan kerajaan dipersempit. **Benteng Ujungpandang** diganti menjadi **Fort Rotterdam** dan dijadikan sebagai markas tentara dan kantor perwakilan VOC serta Makassar dijadikan pos pengaman untuk melindungi monopoli perdagangan VOC di Maluku.

Campur tangan kompeni dalam hal pergantian raja-raja/penguasa sering menyebabkan munculnya sikap perlawanan penguasa lokal. Campur tangan dalam hal ini banyak dilakukan terhadap kerajaan yang dinyatakan sebagai kerajaan sekutu (Kerajaan Goa-Tallo). Sedangkan pelaksanaan kekuasaan dan pemerintahan pada kenyataannya tetap berada di bawah penguasa Belanda dan dilakukan sesuai dengan kebiasaan setempat.

Struktur politik setempat tidak pernah tersentuh perubahan dengan kehadiran VOC yang berdasarkan Perjanjian Bongaya dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan di daerah yang berada di bawah kekuasaan langsung. Hubungan kekuasaan hanya terjadi antara penguasa setempat dan pejabat Kompeni yang berada di Makassar. Setelah VOC bubar pada

tahun 1799, roda kekuasaan pemerintahan diteruskan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada permulaan abad ke-19.

Pada tahun 1811, ketika terjadi perubahan kekuasaan kolonial di Indonesia, Inggris menggantikan posisi Belanda, namun, perubahan tersebut tidak berarti bagi kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. Bahkan beberapa kerajaan menolak mengakui kekuasaan Inggris. Hal ini, membuka peluang bagi Belanda untuk kembali berkuasa di Makassar, dan lima tahun kemudian Belanda berhasil kembali ke Makassar walaupun dengan menghadapi perlawanan dari beberapa kerajaan.

Tahun 1824, Kerajaan Suppa mengerahkan 4.000 tentara memukul pasukan Belanda yang dipimpin **Letnan Kolonel Reeder**. Hal ini menunjukkan bahwa Sulawesi Selatan merupakan daerah yang paling susah untuk dikuasai sepenuhnya oleh kaum penjajah.

Pada tahun 1824, sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara (*Staatblad*, 1824 No. 31a), Pemerintah Hindia Belanda menata pemerintahan di daerah-daerah yang dinyatakan berada di bawah kekuasaannya. Berdasarkan pada peraturan itu, Pemerintah Makassar dan Daerah Bawahan (*Gouvernement Makassar en Onderhoorigheden*) dibagi dalam 5 (lima) wilayah administrasi pemerintahan yaitu:

1. Makassar, meliputi kota pelabuhan Makassar, Fort Rotterdam, kota Vlaarding en dan kampung-kampung di sekitarnya dan pulau-pulau yang terletak di depan kota pelabuhan Makassar;
2. Distrik-distrik di Bagian Selatan (*Zuider Districten*) meliputi distrik-distrik: Aing Towa, Bontolebang, Galesong, Polombangkeng, Sawakong, Mamuju, Balo, Lengkesse, Takalar, Topejawa, Lakatong;
3. Distrik-distrik Bagian Utara (*Noorder Districten*), meliputi distrik-distrik Maros, Bontoa, Tangkutu, Tanralili, Sumbang, Rilaut, Tomboro, Riraya, Sodiang, Malawa, Camba, Baloci, Laiya, Labuaya, Bungoro, Pangkajene, Bango, Labakkang, Marang, Kalukua, Sigeri dan Katena;
4. Bulukumba dan Bonthain, meliputi distrik-distrik: Bonthain dan Tompobulu, Gantarang, Tala, Palewooi, Tanah Beru, Bontotanga, Lemo-lemo, Ujung Loe, Weiro, Langa-langa, Tiro dan Bira;

5. Selayar, meliputi distrik-distrik: Bonto Bangung, Tanete, Batang Mata, Bukiet, Mare-mare, Bonea, Opa-opa, Gantarang, Bulo-bulo, Laiyolo, Banto Baros, Barang-barang, Pocta Bangon dan Onto.

Pelaksanaan pemerintahan dibebankan pada seorang gubernur sebagai pimpinan Pemerintahan Makassar dan Daerah Bawahan. Gubernur membawahi lima orang residen yang masing-masing ditempatkan pada setiap wilayah administrasi pemerintahan. Setiap residen membawahi beberapa kontrolir (*controleur*) yang ditempatkan pada setiap distrik untuk melaksanakan pengawasan kekuasaan dan kegiatan-kegiatan penguasa-penguasa setempat serta bangsawan-bangsawannya.

Setelah dilakukan pemetaan pada tahun 1857, pengaturan wilayah administrasi pemerintahan diperbaharui. Pemerintahan Makassar dan Daerah Bawahan ditata tidak menurut aturan yang seragam akan tetapi beragam, juga penempatan pejabat pemerintah tidak merata.

Bagian pemerintahan Makassar dibagi dalam dua wilayah pemerintahan (*onderafdeling*), yaitu Wilayah Pemerintahan Makassar dan Wilayah Pemerintahan Tallo. Wilayah Makassar berada langsung di bawah pengawasan asisten residen yang dibantu oleh seorang pejabat hukum (*magistraat*) dalam melaksanakan pemerintahan. Sedangkan di Wilayah Tallo ditempatkan seorang kontrolir (*controleur*) yang berkedudukan di Parangloe.

Pengaturan wilayah di bagian pemerintahan distrik-distrik Bagian Utara (*Afdeling Noorder Districten*) memiliki bentuk yang lain. Bagian pemerintahan ini dibagi dalam tiga distrik pajak (*pachtdistrik*) yaitu Maros, Pangkajene, dan Sigeri serta distrik-distrik pegunungan (*bergregent-schappen*). Pada masing-masing wilayah administrasi pemerintahan ini ditempatkan seorang kontrolir, kecuali Maros (yang berada langsung di bawah Asisten Residen Bagian Pemerintahan Maros). Setiap distrik pajak dan distrik-distrik pegunungan terdiri dari beberapa distrik yang masing-masing berada di bawah Penguasa Bumiputera.

Di wilayah kekuasaan bagian pemerintahan distrik-distrik Bagian Selatan (*afdeling zuider districten*) ditempatkan

seorang kontrolir yang dibantu seorang kolektor (*collecteur*) dan seorang juru bicara (*tolk*). Wilayah ini dibagi dalam empat distrik yaitu distrik: Topejawa, Bontolebang, Galesong dan Polombangkeng.

Pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu, terus menerus melakukan perluasan kekuasaan dan penyerobotan wilayah di Sulawesi Selatan. Pada tahun 1863 melancarkan penyerangan terhadap Konfederasi Binamu dan Bangkala dan pada tahun 1867 menduduki Sanrobone dengan alasan tidak mentaati ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian yang telah disetujui. Hal ini dipandang sebagai langkah ke arah kejatuhan kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda, karena menyebabkan tidak terciptanya penataan dan pelaksanaan pemerintahan yang teratur dan terarah akibat kekurangan tenaga yang dibutuhkan untuk menata pemerintahan. Keadaan ini mendorong **P.J. Kooreman** (bekas pejabat kontrolir di Takalar dan Bonthain) mengusulkan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk memilih salah satu dari dua cara, jika ingin melaksanakan pemerintahan dan kekuasaan dengan baik, yakni:

- a. mempertahankan bori (*glarangschap*) yang berdiri sendiri dan menghapuskan pengaruh Bupati (*regent*) atau,
- b. memperkuat kedudukan Bupati dan menghapuskan bori.

Usaha penguasaan langsung pemerintah Hindia Belanda terhadap seluruh wilayah Sulawesi Selatan muncul setelah pecah pemberontakan **Karaeng Bonto-bonto** di wilayah Distrik Bagian Utara pada tahun 1872. Untuk mewujudkan maksud tersebut, Pemerintah Hindia Belanda mengirim Ekspedisi Militer Sulawesi Selatan (*Zuid Celebes Expeditie*) pada Juni 1905. Penggunaan kekuatan militer ini dimaksudkan agar dapat memaksakan penguasa-penguasa bumiputera dengan mudah menerima dan bersedia menandatangani **Plakat Pendek** (*korte verklaring*), yang berisi pernyataan penyerahan kekuasaan sepenuhnya kepada Pemerintah Hindia Belanda. Alasan penguasaan langsung tersebut dengan dalih demi ketertiban dan keteraturan (*rust en orde*).

Bulan Juli 1905, Kerajaan Bone diserang oleh pasukan Pemerintah Hindia Belanda karena menolak tuntutan untuk menerima pernyataan patuh kepada Pemerintah Hindia Belanda.

Pada bulan September 1905, Kerajaan Bone dapat dikuasai sehingga pemerintah Hindia Belanda tidak mengalami kesulitan untuk memaksa penguasa-penguasa kecil menandatangani "**Plakat Pendek**".

Pada tanggal 18 Oktober 1905, giliran Kerajaan Goa diserang oleh pasukan pemerintah Hindia Belanda karena menolak tuntutan Pemerintah Hindia Belanda untuk menandatangani Pernyataan Pendek mengenai penerimaan dan pengakuan Kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda. Tetapi, pasukan Belanda tidak berhasil menangkap Raja Goa, karena Raja Goa oleh pembesar kerajaan diungsikan ke Barru kemudian ke Sidenreng. Sejak itu, Kerajaan Goa dinyatakan telah dikuasai oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Berdasarkan Plakat Pendek (*Korte Verklaring*) pada tahun 1906, secara keseluruhan Sulawesi Selatan berada langsung di bawah kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1911, setelah dikeluarkannya Lembaran Negara (*Staatsblad*, 1910 No. 573), maka wilayah Kerajaan Goa dan Konfederasi Laikang dijadikan wilayah administratif pemerintahan, bagian dari Wilayah Pemerintahan Makassar.

Implikasi dari ekspedisi militer tahun 1905 tersebut, yaitu:

- (a) Hilangnya kedudukan kerajaan;
- (b) seluruh wilayah kerajaan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara secara *de facto* telah menjadi wilayah Pemerintahan Hindia Belanda;
- (c) penguasa lokal/para bangsawan kehilangan kedudukan kekuasaan;

Setelah ekspedisi militer Sulawesi Selatan tahun 1905, maka wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara dijadikan satu wilayah pemerintahan, yaitu "Pemerintahan Sulawesi dan Daerah Bawahannya" (*Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden*), yang dipimpin oleh seorang gubernur (*gouverneur*). Wilayah pemerintahannya dibagi atas tujuh bagian pemerintah (*afdeling*). Ketujuh *afdeling* tersebut yaitu:

1. *Afdeling* Makassar dengan ibukotanya Sungguminasa
2. *Afdeling* Bonthain dengan ibukotanya Bonthain

3. *Afdeling* Bone dengan ibukotanya Watampone
4. *Afdeling* Pare-Pare dengan ibukotanya Pare-Pare
5. *Afdeling* Mandar dengan ibukotanya Majene
6. *Afdeling* Luwu dengan ibukotanya Palopo
7. *Afdeling* Buton Laiwui dengan ibukotanya Bau-bau

Setiap *afdeling* dipimpin oleh seorang asisten residen. Setiap asisten residen membawahi beberapa kontrolir sebagai pemimpin *onderafdeling*. Setiap *onderafdeling* terbagi atas beberapa distrik dan setiap distrik dikepalai oleh seorang regen. Setiap regen membawahi beberapa kepala kampung. Pejabat pemerintahan dari tingkat gubernur hingga kontrolir dijabat oleh pegawai Belanda, sedangkan regen dan kepala kampung dijabat pegawai bumiputera.

Pengalihan kekuasaan ini mengakibatkan timbulnya perlawanan dan penolakan terhadap Pemerintah Hindia Belanda. Untuk memperkuat dan mempertahankan kedudukannya, Pemerintah Hindia Belanda menawan dan mengasingkan pihak yang melakukan perlawanan. Beberapa bangsawan yang diasingkan, antara lain: **Karaeng Mappanyuki** diasingkan ke Selayar, **Karaeng Bontonompo** diasingkan ke Sumbawa, dan **Regen Tanralili** diasingkan ke Bima (Sumbawa). Sementara terhadap kelompok bangsawan yang bersedia bekerjasama dirangkul dan diperbaiki kedudukannya.

Perubahan Penataan wilayah pemerintahan di Sulawesi Selatan terjadi lagi pada tahun 1917, dimana wilayah bagian pemerintahan Makassar dan Bonthain dibagi menjadi tiga wilayah pemerintahan, yaitu Makassar, Sungguminasa dan Bonthain.

Kegiatan sosial politik terutama tumbuhnya pergerakan kebangsaan di Pulau Jawa pada awal tahun 1900-an, mempengaruhi para pemuda dan tokoh-tokoh masyarakat di Sulawesi Selatan untuk juga bangkit mendirikan organisasi politik kebangsaan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penolakan terhadap kolonialisme Belanda. Pada tahun 1913, berdiri Sarikat Islam di Makassar dipimpin oleh **Ince Hasanuddin**, dan kemudian berdiri pula Sarikat Islam di Pamboang (Mandar) tahun 1914, tahun 1915 di Majene, tahun 1929 di Tinambung, Polewali, Pambusuang dan tahun 1930 di Palopo. Pada tahun

1920, **K.H. Abdullah** mendirikan Muhammadiyah di Makassar. Selanjutnya, **Muhammadiyah** dan organisasi di bawah naungannya, **Aisyah** (kewanitaan) dan **Hizbul Wathan** (kependuan) berdiri pula di Salayar, Palopo, Majene dan Mandar. Selain itu, di Makassar pun berdiri organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan lainnya antara lain Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Indonesia Raya (Parindra), Nahdlatul Ulama (NU). Organisasi-organisasi tersebut mengalami perkembangan setelah organisasi lokal juga menggabungkan diri.

Pada masa pemerintahan Gubernur **J.L.M. Swaab** (1931-1937) terjadi lagi perubahan penataan wilayah pemerintahan. Perubahan ini dilakukan untuk mengantisipasi mulai berkembang organisasi sosial dan politik di daerah Sulawesi Selatan. Pemerintahan Hindia Belanda mulai mendekati kelompok-kelompok bangsawan yang telah ditekan dengan menjalin hubungan kerjasama. Tujuan kerjasama adalah agar para bangsawan tersebut tidak dalam kegiatan organisasi sosial, politik yang mulai berkembang, yang dipandang dapat mengancam kekuasaan pemerintahan. Untuk menjalin hubungan kerjasama, pemerintah menawarkan pemulihan kedudukan bekas kerajaan menjadi daerah kekuasaan berpemerintahan sendiri.

Pada tahun 1931 Kerajaan Bone dipulihkan kedudukannya menjadi daerah kekuasaan berpemerintahan sendiri, dan Karaeng Mappanyuki dinobatkan menjadi Raja Bone. Begitu pula bekas wilayah Kerajaan Goa dijadikan satu wilayah pemerintahan bumiputera yang berpemerintahan sendiri sebagai satu kerajaan. Kedudukan Kerajaan Goa berdasarkan penataan wilayah pemerintahan sejajar dan setaraf dengan wilayah pemerintahan.

3. PERIODE PENDUDUKAN JEPANG

Pada tanggal 9 Pebruari 1942 Angkatan Perang Timur Jepang mendarat di Makassar. Makassar dijadikan sebagai markas besar Armada Barat Daya Angkatan Laut Jepang, dan pusat pemerintahan sipil Angkatan Laut untuk Borneo, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil. Hanya ada sedikit perlawanan terhadap

pendaratan Jepang baik dari pihak garnisun kecil militer Belanda maupun dari penduduk setempat.

Pada tanggal 8 Maret 1942, Komando Angkatan Perang Belanda di Indonesia menyerah tanpa syarat kepada Jepang, pada saat itu pula mulailah masa pendudukan Jepang di Indonesia menggantikan pemerintah Hindia Belanda.

Pada awalnya kedatangan Jepang disambut dengan baik oleh bangsa Indonesia. Kaum nasionalis di Sulawesi Selatan membentuk suatu panitia untuk menyambut kedatangan pasukan Jepang di Sulawesi Selatan. Para panitia ini kemudian diangkat oleh Jepang menjadi Panitia Keamanan Umum (*Chian Iji Kai*) untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum menggantikan para pejabat Belanda yang ditawan. **Nadjamoeddin Daeng Malewa** diangkat sebagai Ketua Panitia serta **Iwa Kusumasoemantri** diangkat sebagai Sekretaris. Namun, panitia ini hanya berumur satu bulan kemudian dibubarkan setelah Jepang mendirikan Departemen Pemerintahan Sipil Angkatan Laut pada tanggal 10 Maret 1942.

Untuk mendapat simpati masyarakat, Jepang bekerja sama dengan para tokoh pergerakan Sulawesi Selatan yang nonkooperatif terhadap pemerintah Hindia Belanda. Hal ini bisa dilihat dari beberapa tokoh yang diangkat menjadi penasihat pada Pemerintahan Sipil Angkatan Laut Jepang, antara lain **Lanto Daeng Pasewang**, **Haji Sewang Daeng Moentoei**, dan **Haji Noenoe Daeng Markasi**. Selain itu, Nadjamoeddin Daeng Malewa diangkat menjadi anggota Dewan Daerah pada tahun 1943, kemudian pada Mei 1945 diangkat sebagai walikota Indonesia pertama untuk Makassar.

Pemerintahan di daerah-daerah selama pendudukan Jepang tidak banyak mengalami perubahan hanya nama atau istilah-istilah saja yang berubah, misalnya wilayah *afdeling* dirubah menjadi *Ken*. Setiap *Ken* dikepalai oleh *Ken Kanrikan*. Setiap *Ken* dibagi lagi menjadi beberapa *Bunken* yang mirip dengan wilayah *onderafdeling* yang dikepalai oleh *Bunken Karikan*. Setiap *Bunken* membawahi swapraja-swapraja yang dikepalai oleh raja-raja. Susunan pemerintahan swapraja sampai ke rakyat tidak mengalami perubahan yang berarti .

Sampai dengan awal tahun 1943 tidak ada bagian propaganda dalam Pemerintahan Sipil Angkatan Laut di

Makassar, bahkan *Seinendan* (korps pemuda jaman Jepang) baru didirikan pada Januari 1944. Pemuda Sulawesi Selatan hanya beberapa bulan sebelum Jepang menyerah, menerima latihan militer untuk menjadi anggota *Heiho* dan *Seinendan*. Barisan pemuda tersebut hanya terdiri dari satu kompi yang disusun dalam empat peleton. Barisan tersebut dikenal sebagai ***Boei Taisintai*** dan berada di bawah Komando Umum **Manai Sophiaan**. *Boei Taisintai* dibentuk untuk bertempur di front dalam rangka menghambat pendaratan sekutu di Sulawesi Selatan.

Disamping itu, di Sulawesi Selatan tidak ada *romusha* yang mengerahkan rakyat untuk kerja paksa sehingga pendudukan Jepang di Sulawesi Selatan tidak menimbulkan dampak seperti yang terjadi di Jawa. Begitupun aristokrasi di Sulawesi Selatan terhindar dari keharusan memikul tanggungjawab yang berat akibat berkolaborasi dengan Jepang.

Di sisi lain, masuknya Jepang ke Sulawesi Selatan, membuat keadaan organisasi pergerakan yang belum sepenuhnya mapan menghadapi masa-masa sulit. Namun, pada bulan-bulan akhir pendudukan Jepang, tampak perkembangan yang mewarnai kehidupan organisasi pergerakan di Sulawesi Selatan. Pada bulan April 1945 di Majene terbentuk Organisasi bernama **Islam Muda** yang kemudian berganti nama menjadi **Kebaktian Rahasia Islam Muda (KRIM)**. Selain itu, juga terbentuk organisasi kelaskaran wanita, diantaranya **Serikat Wanita Selebes** yang merupakan bagian dari **Partai Selebes**, serta **Persatuan Wanita Penolong Sosial**.

4. PERIODE SETELAH PROKLAMASI KEMERDEKAAN

Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, dan Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Sulawesi Selatan masuk dalam bagian Provinsi Sulawesi yang dibentuk bersamaan dengan pembentukan provinsi lainnya di Indonesia tanggal 19 Agustus 1945.

Sebelum para tokoh pergerakan di Sulawesi Selatan membentuk pemerintahan, tentara Sekutu (Australia) di bawah pimpinan **Brigadir Jenderal Iwan Dougherty** mendarat di

Makassar pada tanggal 23 September 1945. Kedatangan pasukan Sekutu tersebut diikuti oleh *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA) pimpinan **Mayor Wegner** yang bermaksud menegakkan kembali pemerintahan sipil Hindia Belanda. NICA kemudian membangun organisasi bersenjata yang anggotanya terdiri dari eks tentara Belanda dari *Koninklijk Nederlansch Indisch Leger* (KNIL).

Pada tanggal 2 Oktober 1945 serdadu KNIL menembaki orang yang memakai lencana merah putih. Peristiwa ini mengakibatkan para pemuda Sulawesi Selatan memberontak. Pemberontakan terus berlangsung sampai akhirnya Tentara Sekutu (Australia) melarang serdadu-serdadu NICA keluar dari kamp-kamp mereka. Perundingan dilakukan antara Sekutu yang diwakili Brigadir Jenderal Iwan Dougherty dengan Gubernur Sulawesi **Dr. G.S.S.J. Ratulangi** mewakili pemuka bangsa Indonesia di Sulawesi.

Situasi dan kondisi di Sulawesi Selatan bertambah buruk setelah pimpinan sekutu, Brigadir Jenderal Iwan Dougherty digantikan Brigadir Jenderal Chilton serta Komandan NICA Mayor Wegner diganti Dr. Lion Cocher yang lebih agresif. NICA melakukan gerakan sampai ke wilayah pedalaman Sulawesi Selatan. Beberapa daerah seperti Maros, Pangkajene, Jeneponto, Takalar dan Bulukumba masih tetap bertahan untuk tidak bekerja sama dengan NICA. Kondisi keamanan di Sulawesi Selatan semakin tegang, pemberontakan terhadap NICA terjadi di mana-mana. Untuk mengantisipasi itu, Dr. Sam Ratulangi berhasil membentuk Badan Pusat Keselamatan Rakyat (BPKR) untuk memimpin pergerakan kemerdekaan di Sulawesi Selatan.

Sejak Gubernur DR. Sam Ratulangi dan kawan-kawan ditangkap Belanda tanggal 24 April 1946 dan dibuang ke Serui pada bulan Juni 1946, kegiatan perjuangan fisik di Sulawesi Selatan berubah menjadi gerakan gerilya. Sedangkan perjuangan nonfisik dilakukan melalui wadah partai-partai dan organisasi legal, antara lain **Gabungan Pemuda Indonesia Sulawesi (GAPIS)** yang dipimpin M. Idris, **Kris Muda Mandar** pimpinan A. Kaleng, **Pembela Keamanan Rakyat (PKR)**, **Harimau Indonesia Pangkajene** pimpinan Bahang, **Penerjang Penjajah Indonesia (PPI)** pimpinan A. Rasjid

Faqih dan **Laskar Lipang Bajeng** pimpinan Pajongan Daeng Ngalle.

Dalam upaya untuk mengkoordinasi organisasi-organisasi tersebut, maka atas inisiatif Lipan Bajeng diselenggarakan **Konferensi Gerilya (Konferensi Rannaya)** yang dihadiri 19 organisasi yang membentuk satu fusi bernama **Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi (LAPRIS)**, dengan beranggotakan 26 organisasi. Anggota Lapris tersebar di seluruh pelosok daerah Sulawesi Selatan dengan jumlah anggota yang cukup besar. Hal ini berdampak bertambah besarnya semangat perjuangan pemuda sehingga sering pula terjadi bentrokan antara pemuda dan Serdadu NICA.

Berbagai usaha perlawanan terhadap usaha Belanda (NICA) untuk kembali berkuasa di Sulawesi Selatan juga bermunculan, seperti perlawanan yang dimotori oleh **Robert Wolter Monginsidi** (Sekjen LAPRIS), **Ranggong Daeng Romo**, **Emy Saelan**, **Maulwi Saelan**. Perlawanan juga terjadi di Luwu bulan Januari 1946, dan di Palopo 23 Januari 1946, dll. Menjelang akhir tahun 1946 suatu peristiwa pembantaian (yang dilakukan Wesrterling) meminta korban tidak kurang 40.000 nyawa, menjadi tragedi hitam yang mewarnai Sulawesi Selatan. Peristiwa pembunuhan massal terhadap rakyat Sulawesi Selatan tersebut terjadi di Camba, Sampanang, Turatea, Pasar Tolo, Mesjid Arung Keke, Bulukumba, Jongaya, Rappang, Mandar, Barru, Kalukung, Batua, Luwu, dll. Peristiwa ini memotivasi pemuda asal Sulawesi dari Pulau Jawa untuk kembali ke Sulawesi dan membantu pergerakan untuk mempertahankan kemerdekaan dan menstabilkan keamanan di Sulawesi Selatan.

Pusat perlawanan kaum Republikan di Sulawesi Selatan yang paling bertahan pada waktu itu, adalah di Distrik Polongbangkeng, sebelah selatan Makassar di Kewedanaan Takalar. Karaeng daerah tersebut, **Haji Padjonga Daeng Ngalle** didukung dua orang pemuda, yakni **Dadji Makkaraeng Daeng Mandjarungi** dan **Sjamsuddin Daeng** mengambil keputusan untuk mendukung Republik setelah sebelumnya mengadakan konsultasi dengan para penghulu sub-distrik dan desa. Selanjutnya, tanggal 16 Oktober 1945 dibentuk suatu organisasi perjuangan yang dikenal **Gerakan Lipan Badjeng (GLB)**, dengan ketuanya Karaeng Hadi Padjonga Daeng Ngalle.

Pada tanggal 2 April 1946 dibentuk Organisasi Militer khusus Lipan Badjeng yang dikepalai Ranggong Daeng Romo. Lipan Badjeng merupakan inti dari federasi kelompok-kelompok pemuda/laskar, Lapris. Rango Daeng Romo sangat berjasa dalam mengadakan perlawanan dengan memimpin 57 aksi militer atas nama Lipan Badjeng, dan 51 atas nama Lapris selama kurun waktu Desember 1945 sampai Februari 1947.

Perlawanan kekuatan pro-Republik di Sulawesi Selatan selama tahun 1945-1946 mengancam rencana Belanda untuk mencoba suatu hubungan baru yang akan melestarikan ikatan kolonial lama dalam bentuk baru. Gubernur Jenderal Hindia Belanda, **Dr. H.J. van Mook** pada bulan Februari 1946 secara resmi mengusulkan pembentukan suatu **Negara Federal Indonesia Serikat (NIS)** dalam "hubungan persemakmuran" dengan Kerajaan Belanda. Upaya ini dilakukan Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia dengan mempersempit wilayah Republik Indonesia dan membentuk negara-negara boneka yang tergabung dalam Negara Indonesia Serikat (NIS).

Pembicaraan tentang pembentukan **Negara Indonesia Serikat (NIS)** dimulai dalam Konferensi Malino di Sulawesi Selatan pada tanggal 15-25 Juli 1946 yang mengeluarkan keputusan untuk membentuk Negara Indonesia Serikat, yang salah satu anggotanya adalah **Negara Indonesia Timur (NIT)**. Konferensi kedua dilaksanakan di Denpasar pada tanggal 24-28 Desember 1946. Konferensi Denpasar diikuti oleh tokoh-tokoh Indonesia Timur termasuk wakil-wakil dari kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Indonesia Timur. Konferensi Denpasar menghasilkan pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT) yang berpusat di Makassar.

NIT yang diproklamasikan pada bulan Desember 1946 di tengah-tengah kampanye *pasifikasi* yang dilancarkan Belanda di Sulawesi Selatan. NIT akhirnya diterima Republik, Maret 1947 dengan ditandatanganinya **Persetujuan Linggarjati**, yang mengakui kekuasaan *de-facto* RI hanya atas Pulau Jawa, Madura dan Sumatera. Perjanjian ini menetapkan RI, Kalimantan, dan Indonesia Timur merupakan bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS) yang akan menjadi anggota **Uni-Indonesia Belanda**. Kabinet NIT pertama dipimpin oleh Nadjamoeddin sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri

Urusan Perekonomian yang dilantik di Jakarta, 13 Januari 1947. Kemudian NIT bergabung dalam suatu perhimpunan Negara-negara Bagian, Negara Indonesia Serikat atau *Bijenkoms* *Federaal voor Overleg (BFO)* yang diketuai oleh Sultan Hamid II.

Pembentukan NIT ternyata tidak menyurutkan perlawanan rakyat terhadap pemerintah pendudukan Belanda di Indonesia, baik fisik maupun non fisik, termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Selama periode NIT, hampir tidak ada perubahan dalam struktur atau operasi daerah-daerah berpemerintahan sendiri di Sulawesi Selatan. Bentuk-bentuk pemerintahan tradisional dipertahankan/dihidupkan kembali dengan Dewan *Hadat* yang terdiri dari para penghulu bawahan memberi nasehat kepada penguasa. Pemerintah NIT membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di 13 daerah bagiannya, sehingga tugas-tugas para Residen Belanda lambat laun berkurang.

Sementara itu perundingan antara Pemerintah Indonesia (RI-BFO) dengan Belanda yang diselenggarakan pada tanggal 23 Agustus–2 November 1949 di Den Haag, Belanda, menghasilkan perjanjian **Konferensi Meja Bundar (KMB)** yang ditandatangani pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam oleh Ratu Juliana dan Wakil RIS Mohammad Hata.

Sementara itu, di Jakarta, pengakuan kedaulatan dilakukan oleh Wakil Tinggi Mahkota Kerajaan Belanda Dr. Lovink kepada Wakil RIS, Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Pengakuan Kedaulatan ini mendapat sambutan gembira dari rakyat Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan. Tokoh pergerakan di Sulawesi Selatan semakin bersemangat untuk bergabung kembali dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pada tanggal 30 Maret 1950 batalyon **Kapten Andi Azis** yang merupakan eks pasukan KNIL pertama, resmi diterima ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) dengan tujuan untuk memperkuat tentara NIT. Hal ini menimbulkan ketegangan antara pasukan **Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS)** dengan APRIS eks tentara KNIL, yang juga memicu demonstrasi-demonstrasi besar yang menuntut pembubaran NIT di Sulawesi Selatan.

Pada tanggal 5 April 1950, satu batalyon TNI/APRIS yang berkekuatan seribu orang di bawah Komando **Mayor H.V. Worang** dalam perjalanan menuju Makassar dihadang dengan kekerasan oleh pasukan Andi Azis. Dalam peristiwa ini Mokoginta dan stafnya ditawan pasukan Andi Azis. Tindakan Andi Azis yang dimaksudkan untuk melindungi Negara Indonesia Timur malah menyebabkan meningkatnya tekanan kaum nasionalis untuk membubarkan NIT. Pada tanggal 17 April 1950 dalam suatu konferensi di Polongbangkeng, suatu deklarasi yang disusun **Karaeng Djarung** atas nama rakyat Indonesia Timur menyatakan setia kepada pemerintah RI di Yogyakarta. Tanggal 21 April 1950 Presiden NIT, Sukawati menyatakan bersedia untuk membubarkan pemerintah NIT dan bergabung menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, pada tanggal 26 April 1950, pemerintah Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Wakil Ketua *Hadat Tinggi* (**Andi Idjo Karaeng Lalolang**, yang juga adalah **Raja Goa**) serta **Andi Burhanuddin (Ketua Dewan Sulawesi Selatan)** mengeluarkan proklamasi bahwa sesuai dengan keinginan rakyat, Sulawesi Selatan menarik diri dari NIT dan akan menggabungkan diri dengan Republik Indonesia sebagai suatu provinsi. Pembentukan Provinsi Sulawesi Selatan terbentuk menjadi satu kesatuan wilayah administratif tingkat provinsi atas kemauan dan ikrar raja-raja serta masyarakat setempat.

Setelah persetujuan resmi mengenai pembentukan suatu Negara kesatuan ditandatangani pada tanggal 19 Mei 1950, dan setelah diumumkannya Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tanggal 15 Agustus 1950, maka Indonesia kembali ke NKRI pada tanggal 17 Agustus 1950. Begitupun seluruh Sulawesi dipersatukan menjadi satu provinsi, dengan **B.W. Lapien** ditunjuk sebagai pejabat Gubernur.

Ketika Indonesia kembali ke bentuk Nagara Kesatuan, berbagai peristiwa yang berdampak nasional mewarnai Sulawesi Selatan, antara lain Peristiwa Pemberontakan **Kahar Muzakkar dan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/PRRI Perjuangan Rakyat Semesta/Permesta**). Kembalinya Sulawesi Selatan ke NKRI belum mengubah status Sulawesi Selatan. Daerah ini masih berstatus sebagai daerah otonom

yang dikepalai seorang kepala daerah sebagaimana pada masa NIT.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1950, Sulawesi Selatan menjadi Provinsi Administratif Sulawesi dan Makassar sebagai pusat pemerintahan. Selanjutnya, perubahan berlangsung ketika dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1951, dimana gabungan Sulawesi Selatan sebagai daerah otonom kembali masuk dalam Provinsi Sulawesi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 1952, Peraturan Nomor 56 Tahun 1951 dicabut dan Gabungan Sulawesi Selatan secara resmi dibubarkan, sedangkan wilayahnya dibagi dalam tujuh daerah otonom. Daerah tersebut setingkat dengan kabupaten sebagai daerah swatantra tingkat II. Ketujuh daerah tersebut adalah :

1. Kabupaten Makassar, meliputi bekas *Afdeling* Makassar
2. Kabupaten Bontaing, meliputi bekas *Afdeling* Bontaing
3. Kabupaten Bone, meliputi bekas *Afdeling* Bone
4. Kabupaten Mandar, meliputi bekas *Afdeling* Mandar
5. Kabupaten Pare-Pare, meliputi bekas *Afdeling* Pare-Pare
6. Kabupaten Luwu, meliputi bekas *Afdeling* Luwu
7. Kabupaten Sulawesi Tenggara, meliputi *Afdeling* Buton Laiwui

Dengan dikeluarkannya peraturan ini, maka ketujuh daerah ini menjadi Kabupaten Otonom yang berada di bawah hierarki Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan Propinsi Administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah RIS Nomor 21 Tahun 1950.

Pada tahun 1960 terjadi lagi perubahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 Sulawesi Selatan dan Tenggara ditetapkan menjadi daerah otonom tingkat I yang meliputi 27 daerah otonom tingkat II (2 kotapraja dan 25 kabupaten). Pada tahun 1964, terbit Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 yang memisahkan Sulawesi Tenggara dari Sulawesi Selatan. Bersamaan dengan dipecahnya Pulau Sulawesi menjadi 4 (empat) provinsi daerah tingkat I.

Sulawesi Selatan resmi menjadi provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan yang meliputi 21 (duapuluh satu) kabupaten dan 2 (dua) kotamadya, yaitu:

1. Kabupaten Selayar,
2. Kabupaten Bulukumba,
3. Kabupaten Bantaeng,
4. Kabupaten Jeneponto,
5. Kabupaten Goa,
6. Kabupaten Takalar,
7. Kabupaten Sinjai,
8. Kabupaten Bone,
9. Kabupaten Pangkajene Kepulauan,
10. Kabupaten Pinrang,
11. Kabupaten Barru,
12. Kabupaten Sidenreng Rappang,
13. Kabupaten Soppeng,
14. Kabupaten Wajo,
15. Kabupaten Maros,
16. Kabupaten Enrekang,
17. Kabupaten Tana Toraja,
18. Kabupaten Luwu,
19. Kabupaten Mamuju,
20. Kabupaten Majene,
21. Kabupaten Polewali Mamasa,
22. Kota Ujungpandang dan
23. Kota Pare-Pare.

Pada masa Reformasi terbit Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah. Undang-undang ini menjadi pedoman dalam penyusunan pemerintahan di daerah yang bersifat otonom. Undang-undang ini juga menjadi dasar munculnya tuntutan pemekaran wilayah di dalam lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada tanggal 20 April 1999 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1999 terbentuk Kabupaten Luwu Utara sebagai pemekaran dari wilayah Kabupaten Luwu. Kemudian Kota Palopo sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002 menjadi Kota Otonom. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tanggal 25 Pebruari 2003 terbentuk pula Kabupaten Luwu Timur sebagai pemekaran dari Kabupaten Luwu Utara.

Seiring dengan berdirinya Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 5 Oktober 2004 berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004, maka Kabupaten Majene, Mamasa, Mamuju, Mamuju Utara dan Polewali Mandar yang tadinya merupakan kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan resmi menjadi kabupaten di Propinsi Sulawesi Barat.

Setelah terbitnya Amanat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Nomor R.68/Pres/12/2007 tanggal 10 Desember 2007 mengenai pemekaran 12 kabupaten /kota, maka sampai Tahun 2008 Provinsi Sulawesi Selatan dibagi dalam 24 daerah Kabupaten/Kota, terdiri atas 21 (duapuluh satu) kabupaten dan 3 (tiga) kota, yaitu:

1. Kabupaten Bantaeng ibukota Bantaeng;
2. Kabupaten Barru ibukota Barru;
3. Kabupaten Bone ibukota Watampone;
4. Kabupaten Bulukumba ibukota Bulukumba;
5. Kabupaten Enrekang ibukota Enrekang;
6. Kabupaten Goa ibukota Sungguminasa;
7. Kabupaten Jeneponto ibukota Jeneponto;
8. Kabupaten Kepulauan Selayar ibukota Benteng;
9. Kabupaten Luwu ibukota Palopo;
10. Kabupaten Luwu Timur ibukota Malili;
11. Kabupaten Luwu Utara ibukota Masamba;
12. Kabupaten Maros ibukota Maros;
13. Kabupaten Pangkajene Kepulauan ibukota Pangkajene;
14. Kabupaten Pinrang ibukota Pinrang;
15. Kabupaten Sidenreng Rappang ibukota Sidenreng;
16. Kabupaten Sinjai ibukota Sinjai;
17. Kabupaten Soppeng ibukota Watan Soppeng;
18. Kabupaten Takalar ibukota Takalar;
19. Kabupaten Tana Toraja ibukota Makale;
20. Kabupaten Toraja Utara ibukota Rantepao;
21. Kabupaten Wajo ibukota Sengkang;
22. Kota Makassar ibukota Makassar yang juga merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan;
23. Kota Palopo ibukota Palopo;
24. Kota Pare-Pare ibukota Pare-Pare.

Sampai pada akhir tahun 2008, Sulawesi Selatan telah dipimpin oleh Gubernur dan pejabat gubernur yang telah membangun Sulawesi Selatan menjadi sebuah provinsi yang maju dan menjadi barometer di Indonesia bagian Timur. Para gubernur itu seperti yang terlihat pada tabel berikut:

<i>Gubernur dan Pejabat Gubernur Sulawesi sampai terbentuknya Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara</i>	
1945 – 1949	DR. G.S.S.J. Ratulangi
1950 – 1951	B.W. Lopian (Pejabat)
1951 – 1953	R. Sudiro
1953 – 1954	Winarno (Pejabat)
1953– 1956	Lanto Daeng Pasewang
1955 – 1956	Andi Burhanuddin (Pejabat)
1956 – 1959	Andi Pangerang Pettarani

Gubernur dan Pejabat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara	
1959 – 1960	Andi Pangerang Pettarani
1960 – 1964	Letnan Kolonel A.A. Rivai

Gubernur dan Pejabat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan	
1964 – 1966	Letnan Kolonel A.A. Rivai
1966 – 1978	Letnan Kolonel Achmad Lamo
1978 – 1983	Andi Odang
1983 – 1993	A. Amiruddin
1993 – 2003	H.Zainal Basri Palaguna
2003 – 2007	H.M. Amin Syam
2008	Ahmad Tanri Bali Lamo (Pejabat sementara sampai terpilihnya Gubernur definitif hasil Pilkada ulang di 4 Kabupaten).
2008 – 2013	DR. H. Syahrul Yasin Limpo, SH, M.Si, M.H

E. WISATA BUDAYA DAN ASET SUMBER ALAM

Sulawesi Selatan merupakan wilayah yang sangat penting dalam catatan lintasan sejarah Indonesia, serta memiliki adat dan budaya yang terkenal hingga mancanegara. Budaya Toraja serta Obyek Wisata Nostalgia peninggalan zaman penjajahan yang memiliki nilai sejarah, telah menjadikan provinsi ini sebagai tempat tujuan wisata pilihan di Indonesia bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

Benteng Rotterdam adalah salah satu aset wisata andalan Makassar. Benteng yang terletak di kawasan pesisir kota Makassar ini diserahkan Kerajaan Goa semasa pemerintahan Sultan Hasanuddin kepada VOC sebagai bentuk perjanjian Bongaya, 18 November 1667.

Benteng Somba Opu yakni dibangun pada tahun 1525 oleh Sultan Goa IX yang bernama Daeng Matanre Karaeng Tumapa'risi Kallonna. Benteng ini pada abad ke-16 menjadi pusat perdagangan dan pelabuhan rempah-rempah yang ramai dikunjungi pedagang asing dari Asia dan Eropa. Di dalam benteng ini terdapat beberapa bangunan rumah adat Sulawesi Selatan (yang mewakili suku Bugis, Makassar, Mandar dan Kajang) serta sebuah meriam "Baluwara Agung" sepanjang 9 meter dengan berat 9.500 kg serta sebuah museum yang berisi benda-benda bersejarah peninggalan Kesultanan Goa.

Masjid Tuo Palopo, merupakan masjid Kerajaan Luwu yang didirikan pada tahun 1604 M oleh Raja Luwu yang bernama Datu Payung Luwu XVI. Arsitektur masjid ini sangat unik yakni terdiri dari empat unsur penting yang melekat dalam konstruksi masjid tua, yaitu unsur lokal Bugis, Jawa, Hindu dan Islam.

Makam Sultan Hasanuddin di Kabupaten Goa, yang terletak di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Di makam ini terdapat informasi tentang sejarah hidup Sultan Hasanuddin

Lokasi Pendaratan Tentara Belanda dan Kuburan Tentara Jepang di Luwu di Desa Pantai Balandai

Sedangkan obyek wisata lain di sekitar Sulawesi Selatan yang memadukan adat Sulawesi Selatan dan alam yang Indah antara lain :

Makam Datuk Patimang (Pejuang dan Penyebar Syiar Islam) di Bimu Sawerigading, Masamba – Luwu Utara.

Tempat wisata lain yang menjadi aset Propinsi Sulawesi Selatan antara lain : **Pantai Losari, Pantai Tanjung Bira, Air Terjun Bantimurung, Danau Tempe, Danau Towuti, Danau Sidenreng, Hutan Wisata Malino, Taman Nasional Laut Taka Bonerate, Gunung Buttu Kabobong, dan lain-lain.**

Selain itu, ada pula Upacara adat **Pesta Rambu Tuka** (Pesta Panen) di Tana Toraja, yakni upacara adat yang berkaitan dengan ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada para dewa (dewata) yang telah memberikan perlindungan dan keberhasilan dalam hidup. **Rambu Solo** (Pesta Pemakaman) di Tana Toraja, yakni upacara kematian dengan mengorbankan sejumlah hewan dan dipimpin oleh tomealun yang dibantu To ma'pemali dan To Ma'kuasa. Upacara Adat Accera Kalompong, merupakan upacara adat untuk membersihkan benda-benda pusaka peninggalan Kerajaan Goa yang tersimpan di Museum Balla Lompoa. Berbagai tarian di Sulawesi Selatan yakni, Tarian Istana (Tari Pakarena, Pajoga, Pattudu), Tarian Keagamaan (Mabadong, Maro, Masallo, Padondan) serta Tarian Rakyat (Paraga, Pattenung, Mappuka dan Tari Gandrang Bulu).

Selain wisata budaya, aset lain yang dimiliki Propinsi Sulawesi Selatan adalah berupa aset sumber daya alam. Potensi sumber daya alam yakni berupa potensi pertambangan (emas di Tana Toraja, gips, biji besi di Luwu), Timah Hitam di Goa dan Toraja, Batuan Trans di Pangkajene Kepulauan, Pasir Besi di Takalar serta bahan galian golongan C yang cukup besar dan tersebar di seluruh wilayahnya. Di samping itu, propinsi ini sejak jaman penjajahan Belanda sudah dikenal sebagai lumbung beras dan penghasil terbesar tanaman pangan di kawasan Timur Indonesia. Oleh karena itu, Propinsi Sulawesi Selatan pun berpredikat sebagai salah satu lumbung padi nasional dan

menguatkan posisi Sulawesi Selatan sebagai produsen pangan yang cukup potensial.

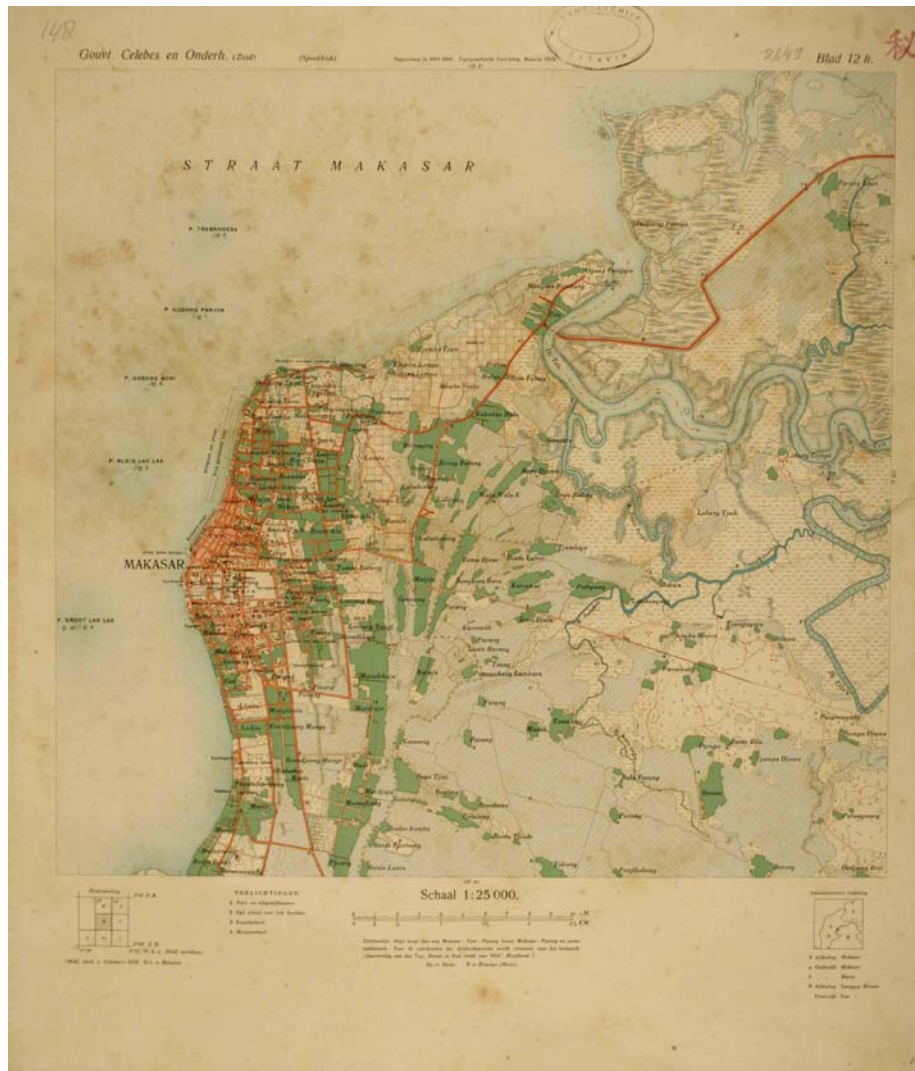
DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. 1992. *Profil Propinsi Republik Indonesia -Sulawesi Selatan*. Jakarta: Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara.
- Harvey, Barbara Sillars. 1989. *Pemberontakan Kahar Muzakkar : Dari Tradisi ke DI/TII*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Mattulada. 1990. *Menyusun Jejak Kehadiran Makassar Dalam Sejarah*. Ujung Pandang: Universitas Hasanuddin.
- M.D. Sagimun. 1975. *Sultan Hasanuddin Menentang VOC*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Nasution, A.H. 1978. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*. Jilid II. Bandung: Angkasa.
- Paeni, Mukhlis, dkk. 2002. *Batara Goa : Messianisme dalam Gerakan Sosial di Makassar*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Poelinggomang, Edward L. 2004. *Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan Makassar 1906–1942*. Yogyakarta: Ombak.
- Poesponegoro, Marwati D. dan Nugroho Notosusanto. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. 1984. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ricklefs, M.C. (2005). *Sejarah Indonesia Modern*. Jakarta.

www.sulsel.go.id

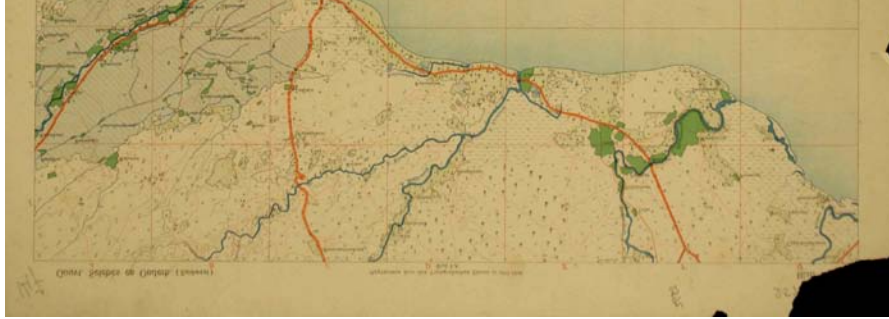
CITRA SULAWESI SELATAN DALAM ARSIP

GEOGRAFI



Peta Topografi Selat Makassar, Sulawesi Selatan
1922

ANRI: Dinas Topografi No. 2649/Blas-12h/148

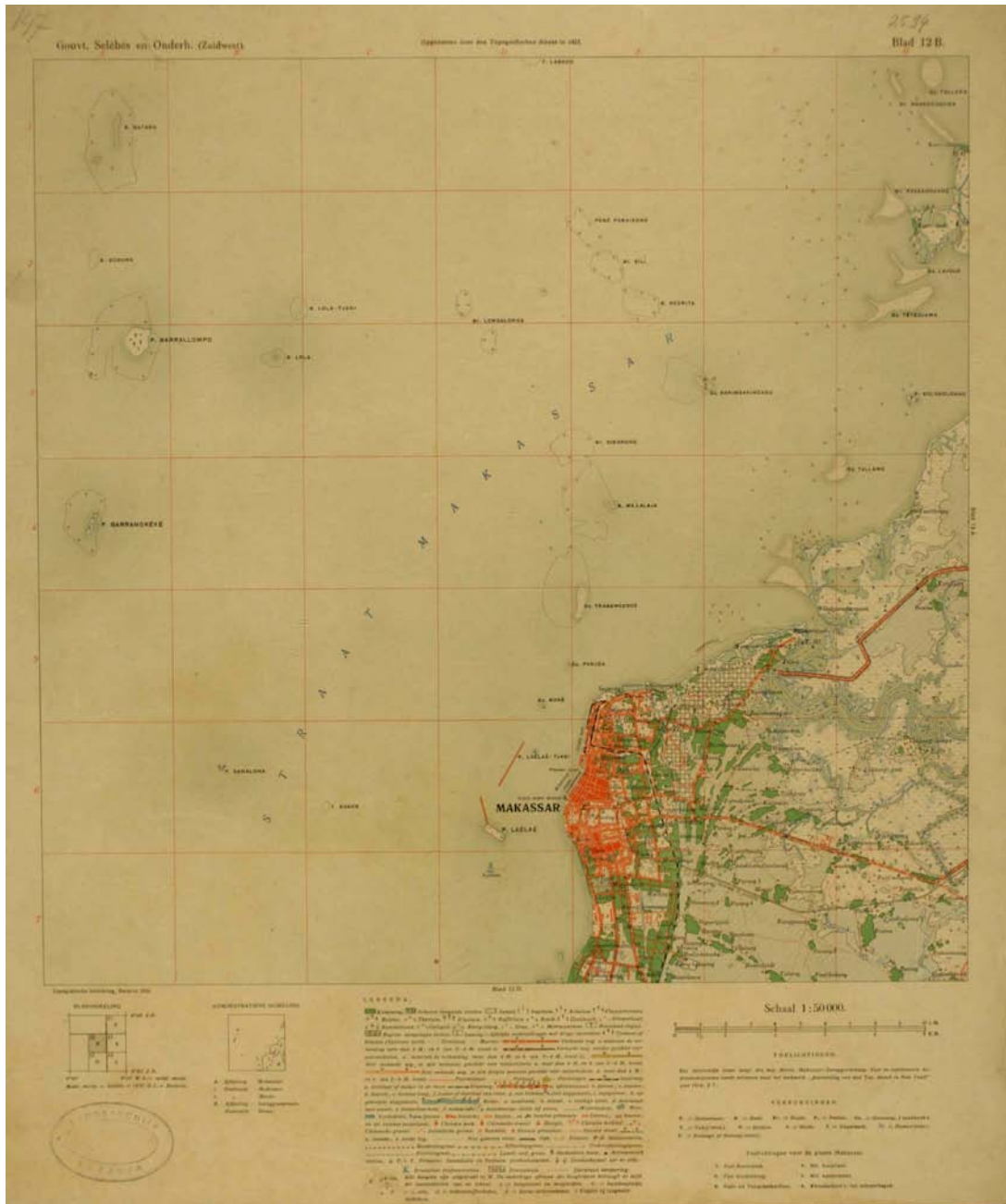


Peta Topografi Bulukumba, Sulawesi Selatan
1922

ANRI: Dinas Topografi No. 2592/Blad 7 C/147



Peta Topografi Jenepono, Sulawesi Selatan
1923
ANRI: Dinas Topografi No. 2585/Blad.5 D/147



Peta Topografi Makassar, Sulawesi Selatan
1924
ANRI: Dinas Topografi No. 2594/Blad 12 B/147



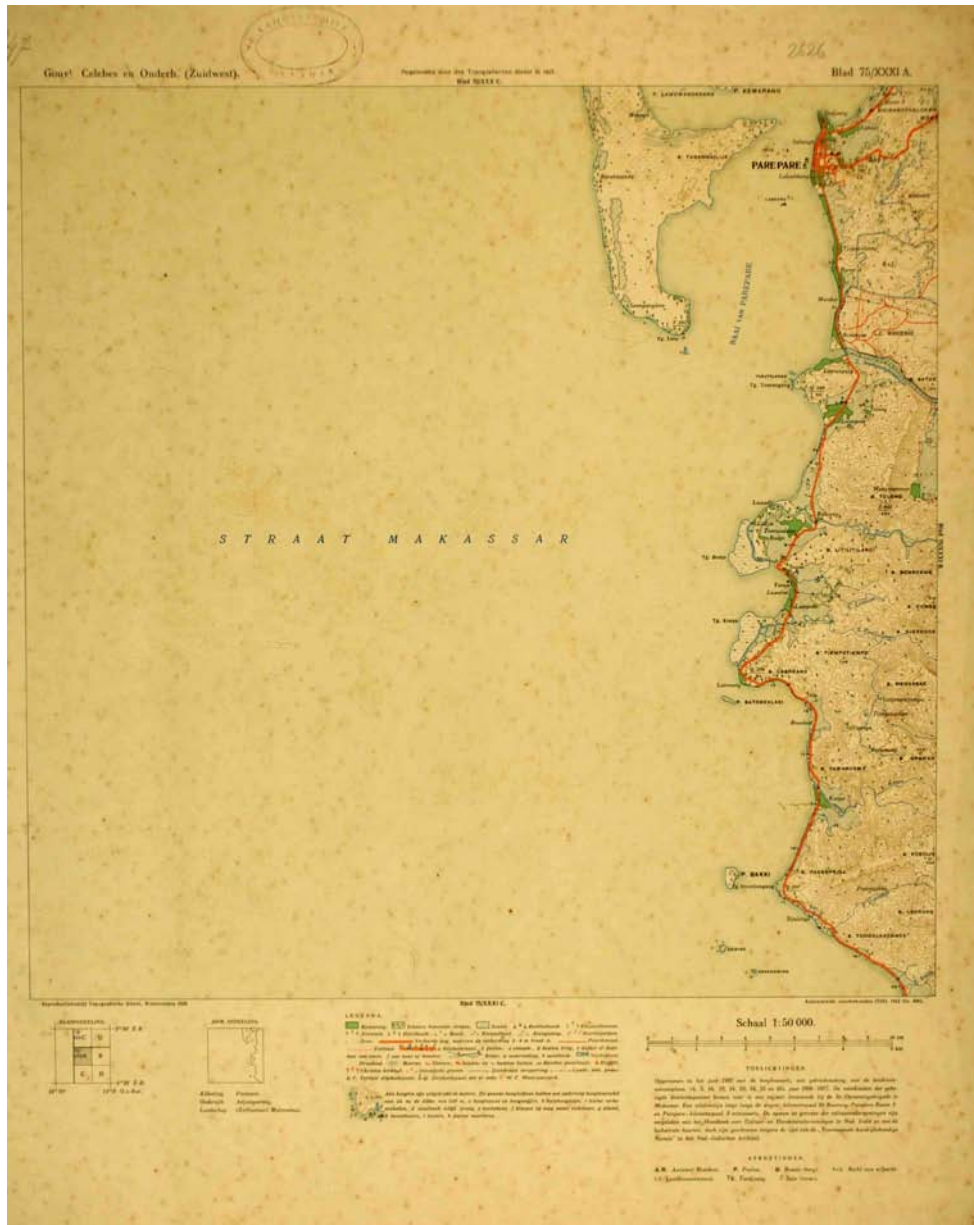
Peta Topografi Maros, Sulawesi Selatan
1924

ANRI: Dinas Topografi No. 2596/Blad 13 A
(Alg. No. XXXIV-75 A)/147

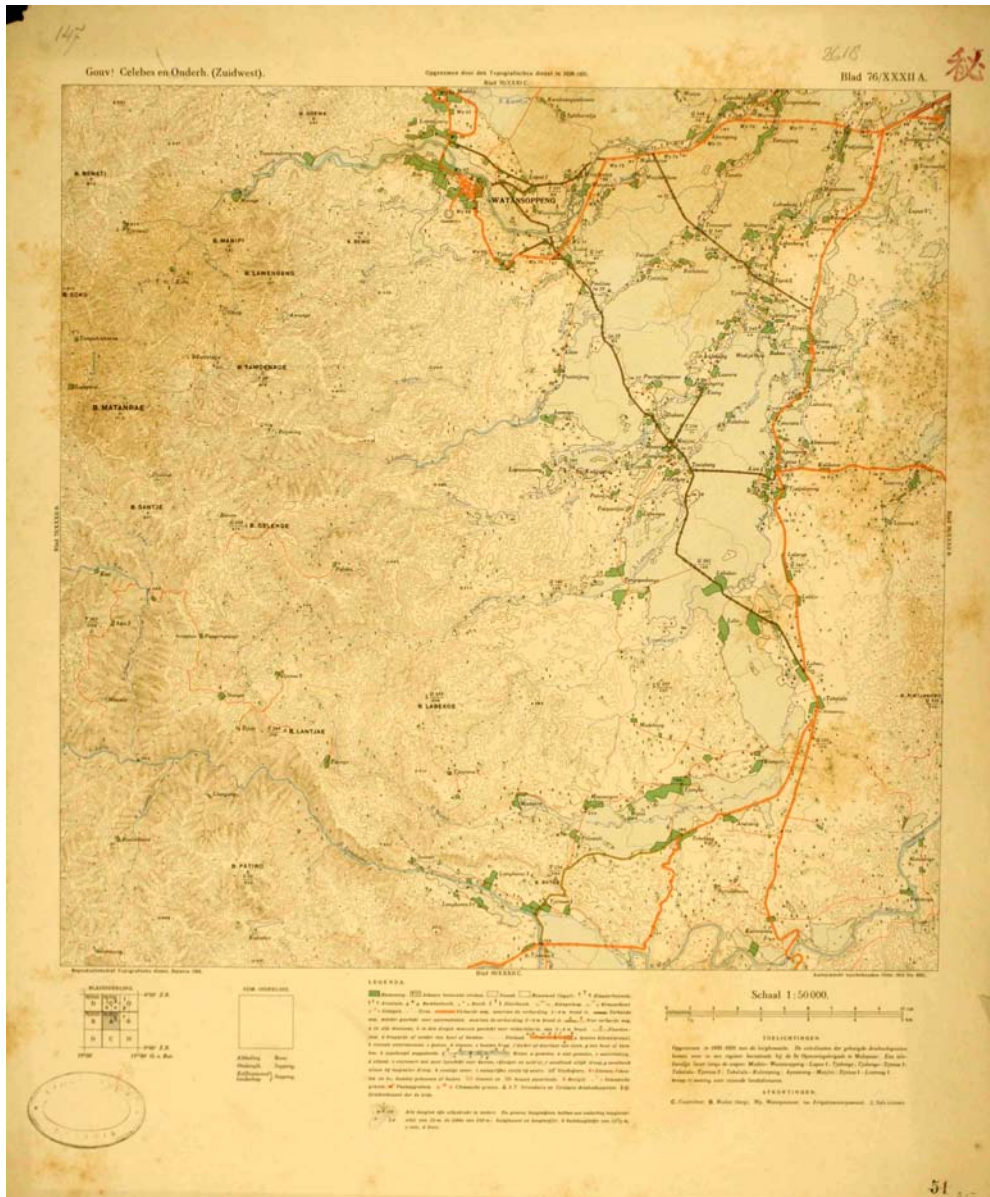


Peta Topografi Watampone, Sulawesi Selatan
1926

ANRI: Dinas Topografi No. 2625/Blad 31 D
(Alg. No. XXXII-77 D)/147



Peta Topografi Pare-Pare, Sulawesi Selatan
1929
ANRI: Dinas Topografi No. 2626/Blad 75/XXXI A/147



Peta Topografi Watan Soppeng, Sulawesi Selatan
1933
ANRI: Dinas Topografi 2618/Blad 76/XXXII A/147

Pemandangan di tepi Pantai Makassar, Sulawesi Selatan
12 Agustus 1953
[ANRI: Kempen, 530812 RR 2-2](#)

Pemandangan di Pantai Losari Makassar, Sulawesi Selatan
5 Oktober 1957

[ANRI: Kempen, 571005 RR 4-2](#)

Peta Selat Makassar, Sulawesi Selatan
1968
ANRI: Marzuki Arifin No. 23

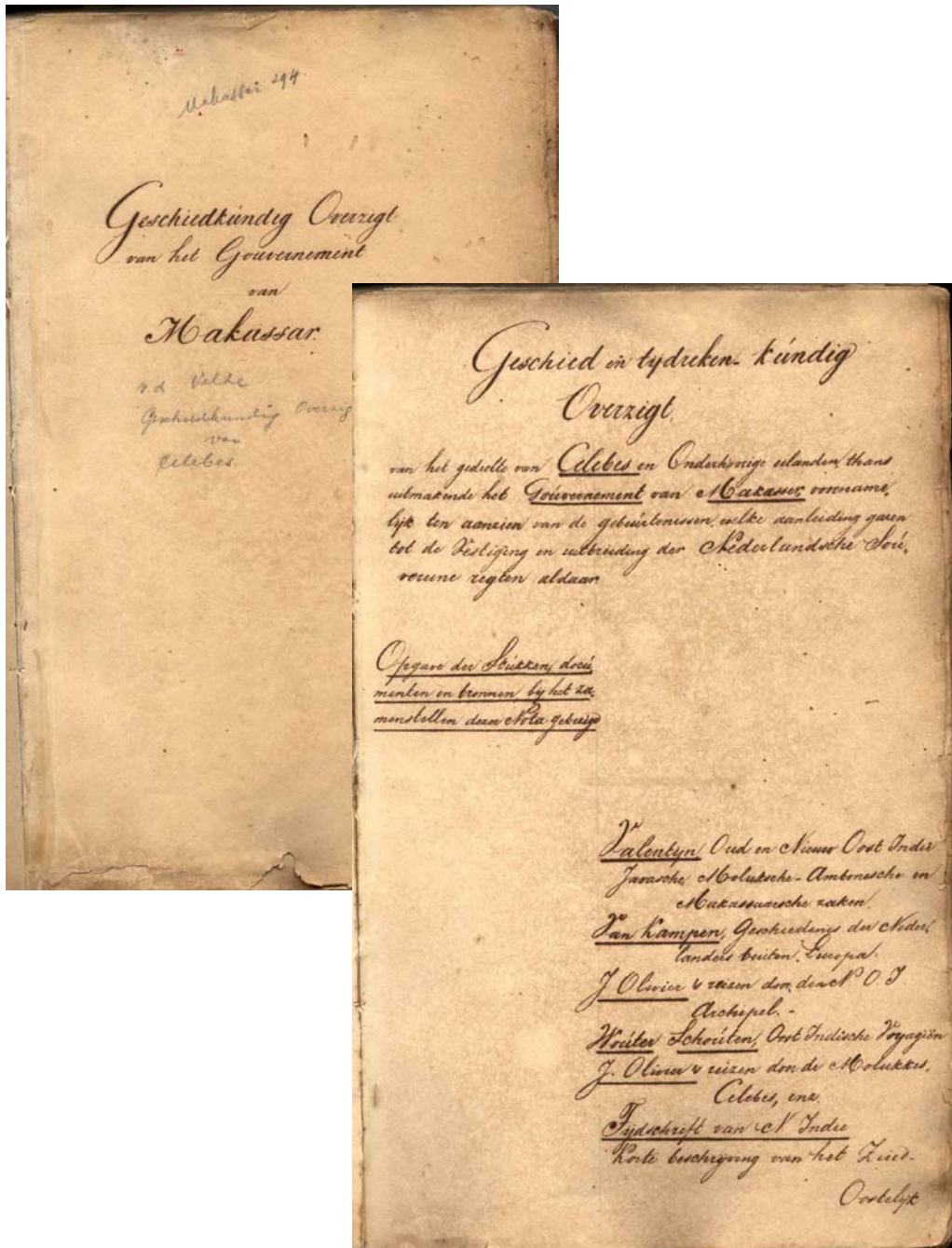
POLITIK dan PEMERINTAHAN



Bagian awal dan akhir dari Perjanjian Bongaya, yang memaksa Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Goa mengakhiri perlawanan terhadap Kolonialisme Belanda

1667

ANRI: Makassar 273.a



Bagian awal sejarah singkat mengenai Pemerintah Makassar
[± 1669]

ANRI: Makassar No. 294



Bagian akhir dari Akte Pengangkatan Raja Bone, Aru Palaka
20 Agustus 1698
ANRI: Makassar 273 t / 20

Extract uit het Verbalenboek der contracten van
1674-1702, folio 924

Acte van Remis off kwijtschietinge van
soken schuld die d' E. Comp^e van den Heering
en Groten van Maccassar te prebenderen
heeft, gedatert 22 februari 1701, waarbij
soken schuld die voorsz. heering en regi-
ring van Maccassar by 't benigayse contract
van 1674 verklaren aan d' E. Comp^e schuld-
dig te sijn, werd gemitteld, ten eynde hem
Lieden daar door dus te meer aan te moedigen
d' E. Comp^e gebruen en getrouwe te bliuen, met
belofte dat zo lange den presenten ~~heering~~
en groten, mitgeders derselver makendelingen
het verband van vrede en vriendschaps in
alle sijne deelen komen te onderhouden,
dese schuld zal quijtscholden sijn en bliuen

Per extract conform
De sijnmat Secretaris
Van het Gouvernement
J. C. P. R. A. M. J.

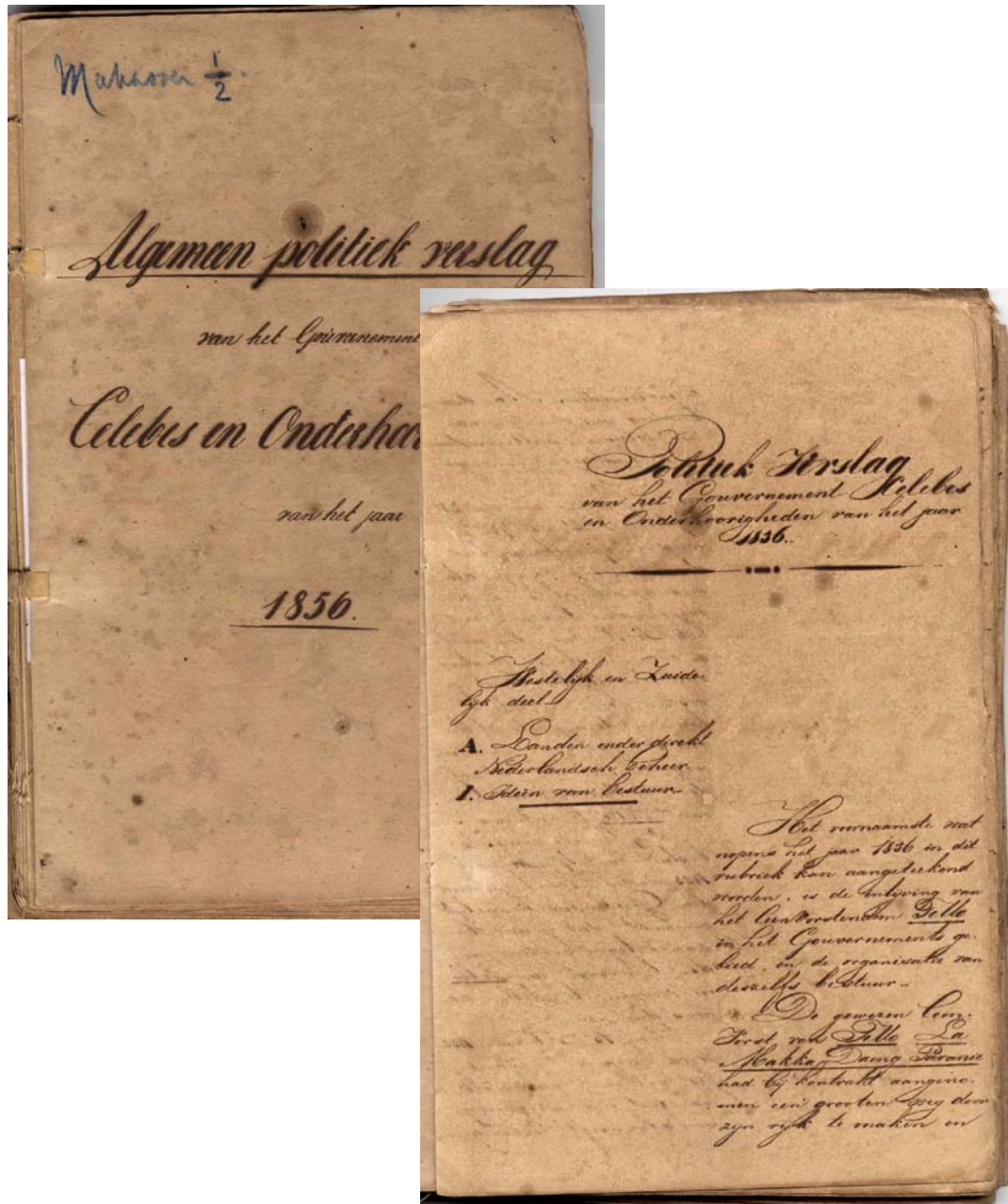
Intisari Kontrak antara Pemerintah Hindia Belanda
dengan Kerajaan Goa
22 Februari 1701
ANRI: Makassar 273/2

16
Aegeneend, Hand van Leebes aegesedib. -
Soort de beed dat den geesde allede goetb uog den
recht van paars tot uotland van gind waard
Janneidend den vinyt die de lano. er meed -
Oschuddy, Sine, u d Dagen uide an puaed
ring van waardig leedy beed d roek. Digid
den ondergeschiet en uooren gemoog met d
belingor, dallye -
L. J. gott. Meer.
Maccassar
in d Caskeel Rotterdam
den 14^{de} Junij a^o 1703.
W. de Roo
in Beuydwilligen Dienaar.
C. Bernick

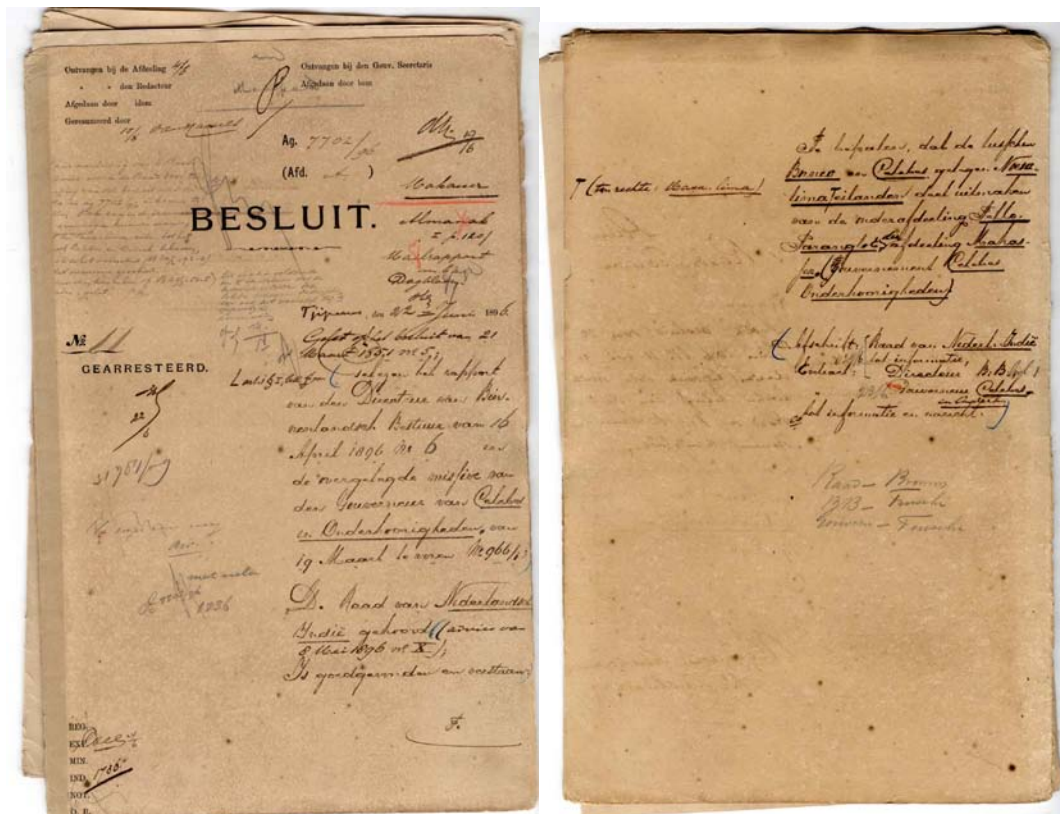
Bagian akhir dari *Memorie van Overgave*
(Memori Serah Terima Jabatan) Residen Makassar
antara Cornelis Beernick dan Willem de Roo
14 Juni 1703
[ANRI: Makassar No. 157](#)

Perjanjian antara Pemerintah Hindia Belanda dengan Raja Bone
1 Desember 1741
[ANRI: Makassar 274.a.1](#)

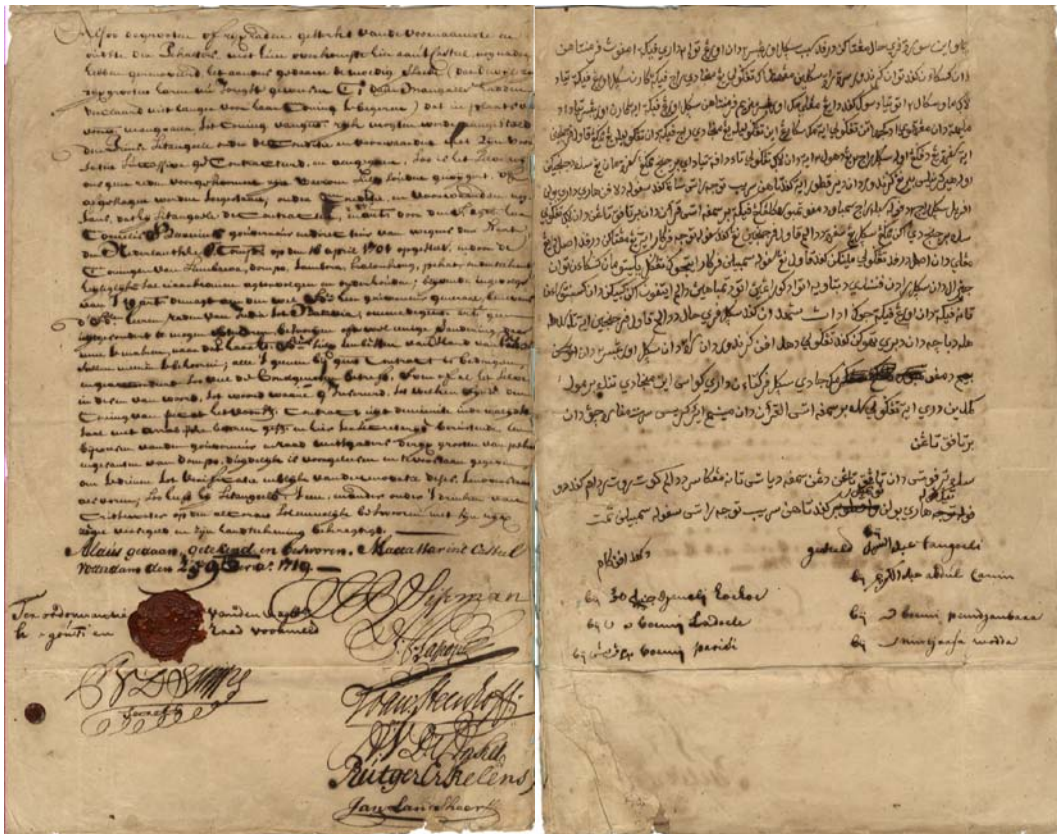
Bagian awal dan akhir dari Perjanjian antara Pemerintah Hindia
Belanda dengan Makaraeng dari Kerajaan Goa
30 Agustus 1770
[ANRI: Makassar 274.g/7](#)



Bagian awal Laporan Politik Umum dari Pemerintah Sulawesi
(Celebes) dan Daerah Kekuasaannya,
1856,
ANRI: Makassar 1.2



Bagian awal dari Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 11 tanggal 22 Juni 1896 mengenai Pulau Nusa Lima yang merupakan bagian dari wilayah Tallo, Sulawesi Selatan
 ANRI: BT 22 Juni 1896 No.11

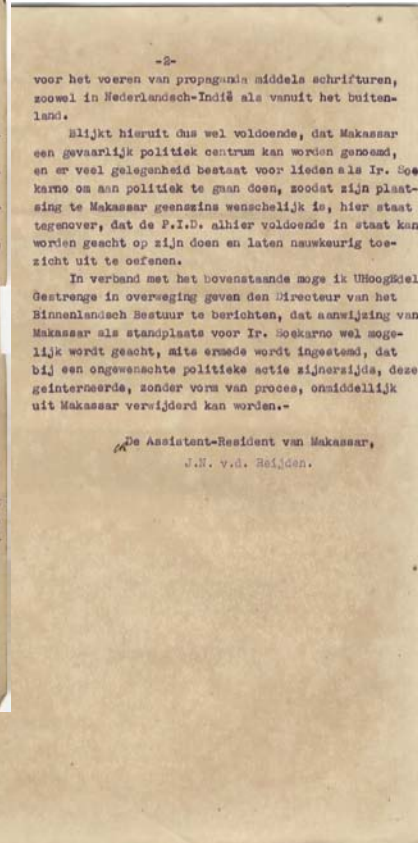
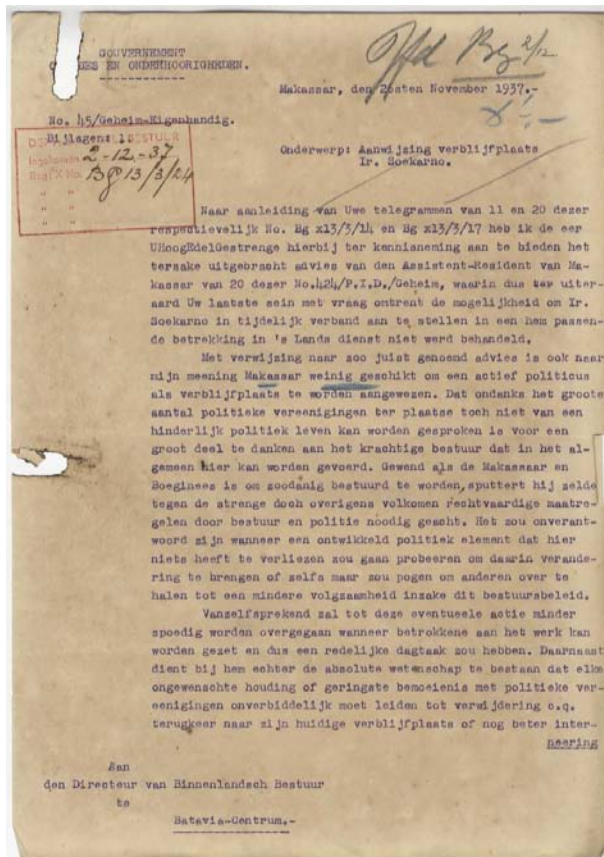


Surat Perjanjian Raja Makassar dengan Pemerintah Hindia Belanda tanggal 23 November 1719
ANRI: Makassar 374/16



Seorang Bupati dari Mandali, Sulawesi Selatan,
didampingi anaknya,
1913.

ANRI: KIT, 327/32



Surat dari *De Assistent Resident van Macassar* (Asisten Residen Makassar) kepada *Directur van Binnenlandsch Bestuur* (Direktur Departemen Dalam Negeri) tentang penunjukan tempat tinggal sementara Ir. Soekarno selama pengasingan di Makassar, Sulawesi Selatan, 26 November 1937
ANRI: Binnenlandsch Bestuur No. 2076

Afschrift à afschrift. No. 41/P.S./Geh.Zig.
 NEDERLANDS INDIES CIVIL ADMINISTRATION
 Onderwerp: Voorstel verandering
 Aroempone (Zelfbestuurder)
 van Bone en zijn zoon
 Andi Pangeran.
 Bijlagen. 3 in tussenvond.

Ik heb de eer UHoogEdelGestrenge's aandacht te vragen voor de navolgende aangelegenheid:

Reeds enkele maen was ik in de gelegenheid te wijzen op de non-coöperatieve houding, aangenomen door den Aroempone (Zelfbestuurder) van Bone en diens zoon, Andi Pangeran, die thans in het Zelfbestuur van Bone de functie bekleedt van Aro Matjege.

Alhoewel het in het huidige tijdsbestek nodig is, dat aan die volkshoofden, die zich op een non-coöperatief standpunt plaatsen, tijd gegund wordt hun politiek evenwicht te vinden, is het aan den anderen kant toch steviger noodzakelijk, dat maatregelen overwogen worden tegen hen, die blijk geven van een onverzettelijke houding, die van geen toegeven weten wil.

De onlangs uit Bone binnengekomen berichten wijzen er op, dat de Aroempone gerekend moet worden tot die lieden, wier houding van non-coöperatie zoo sterk is, dat ik niet kan verwachten, dat zij in de toekomst ooit tot andere gedachten gebracht zullen kunnen worden.

Teneinde U in staat te stellen een juist oordeel over dit volkshoofd te vormen, zal ik U in chronologische volgorde verslag geven van zijn houding:

A. tijdens de Japanse invasie van Zuid-Celebes;
 B. tijdens het Japansche tusschenbeleid;
 C. tijdens de bezetting der Australische Iegermacht en het optreden van de Mica;

Ad A. In Matampone, de hooftplaats van het landschap Bone, was voor den oorlog een stadsvaart opgericht. Commandant hiervan was de reserve-luitenant Seinstra, tevens Controleur van Bone. Bij de door de Stadsvaart uitgeoefende bewegingen is komen vast te staan:

1. dat de Aroempone opdracht heeft gegeven aan zijn zoon Andi Pangeran om met het Inaoneische deel van de Stadsvaart te deserteren;

2. dat hij er getuige van geweest is - staande op een afstand van ongeveer 200 meter - dat door een bende ongeregelde, bestaande uit leden van het Zelfbestuur van Bone, adalgemeenschaphoofden, politie en gedeserteerde Japansche schoten werd op het niet-gedeserteerde gedeelte van de Stadsvaart zelf. Voor de kennisgeving van bijzonderheden nopens de door de Stadsvaart van Matampone opgedane ervaringen wordt betoeld verwezen naar de dezen brief vergezeldende afschriften der verslagen, opgesteld door de Heeren Mr. J. Messing, Saiti en Sahuaka. Van den Heer Seinstra kan geen verslag worden overgelegd, aangezien hij momenteel nog niet op Celebes teruggekeerd is.

AAN
 den Chief Contre

MOROTAI.

onmiddellijk lezend beschikbaar is, die alessine in aanmerking komt de plaats van den Aroempone in te nemen. Zijn naam is Andi Fabenteng, zoon van den kroonprins van Bone, die in 1905 in den strijd tegen ons sneuvelde en van even hoog bloed als zijn vader, vroeger Aros Matjege, thans lid van het Zelfbestuur van Bone. Zijn invloed in Bone is groot.

Omtrent zijn antecedenen dient vermeld te worden, dat hij in 1939 verbannen werd naar Boston, omdat hij aanwezig geweest was bij een schakingsmoord. In Februari 1942 keerde vandaar naar Bone terug. Tijdens het tusschenbeleid hebben de Japanners tot vier maal toe getracht hem bij het bestuurwerk in te schakelen, doch hij heeft dit steeds afgewezen.

De Heer Emanuel is er eerst in geslaagd contact met hem op te nemen buiten Matampone. Later heeft Andi Fabenteng op een avond een bezoek gebracht bij den Heer Emanuel, waarbij hij zijn volle bereidheid om met de Nederlandse gezagsorganen samen te werken te kennen gaf.

Teneinde ook persoonlijk een indruk van hem te krijgen, noodigde ik hem uit op 12 November j.l. bij mij in het Empress Hotel te Makassar te verschijnen. Hij heeft hieraan voldaan en ik kan niet anders verklaren, dan dat hij een uitstekende indruk op mij gemaakt heeft. Na een langdurig onderhoud kreeg ik de overtuiging, dat deze man volkomen op onze hand is en dat hij, dank zij zijn intelligentie en tact, zeer zeker in staat zal zijn met beleid de Hadat- en Wanoea-hoofden te leiden.

De Brigadier zal eenzelfde voorstel indienen bij het Australische Hoofdkwartier te Morotai. Gaarne roep ik Ue bemiddeling in voor het verkrijgen van een spoedige beslissing.

Voor den Aroempone en voor Andi Pangeran zal geen verblijfplaats op Celebes kunnen worden aangewezen, omdat zij van daaruit altijd zullen trachten hun invloed te doen gelden. Daarom zal het noodig zijn, dat zij na hun ontheffing worden verwijderd en overgebracht naar een ander eiland van den Archipel. Transport per vliegtuig naar Nieuw-Guinea via Balikpapan en Morotai lijkt de aahgewezen oplossing. Hun zal kunnen worden medegedeeld, dat zij na verloop van tijd bevoegd zullen worden door een bijzondere rechtbank.

Het zij mij vergund UHoogEdelGestrenge te verzoeken aan het verkrijgen van een zoo spoedig mogelijke beslissing wel te willen medewerken.

Aangezien wordt hierbij nog, dat bij het transport per vliegtuig gerekend dient te worden op vier personen, opdat, behalve voor den Aroempone en zijn zoon Andi Pangeran, plaats zij voor twee volgelingen der hofhouding. Op de medeneming waarvan hij zonder twijfel prijs zal stellen.

De Coninc Makassar,
 w.g. Dr.G. Lion Cachet.
 Voor secretarisch afschrift:
 De 2de Comies.
 w.g. J. Sitania.
 Voor afschrift à afschrift:
 De 2de Comies,
 Emanuel

Surat dari Komandan Netherlands Indies Civil Administration (NICA) Makassar kepada Komandan NICA di Morotai tentang usul pemisahan pemerintahan sendiri Arumpone dari Bone, 27 November 1945, salinan.

ANRI: Algemeene Secretarie No. 135

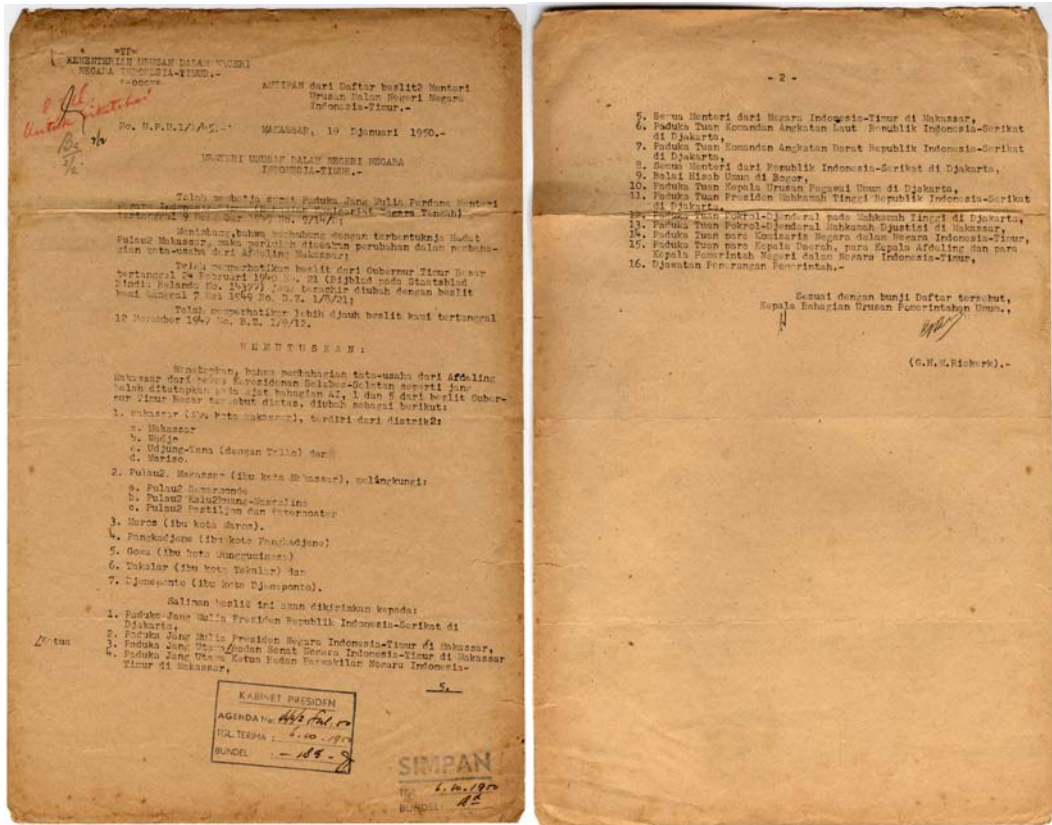


Arumpone Sultan Bone sedang berpidato dalam acara
Pelantikan Adat Tinggi di Sulawesi Selatan,
12 November 1948
[ANRI: RVD, 81112 RR 7](#)



Pelantikan Adat Tinggi Sulawesi Selatan,
dari kiri ke kanan: Raja Goa, Arumpone Sultan Bone dan
Sultan Buton masing-masing dalam pakaian adat, tampak Sultan
Buton memakai baju kebesaran abad ke-16,
12 November 1948.

ANRI: RVD, 81112 RR 4



Surat Keputusan Menteri Urusan Dalam Negeri Negara Indonesia Timur mengenai perubahan pembagian tata usaha dari *afdeling* Makassar dari bekas Keresidenan Selebes Selatan
19 Januari 1950
ANRI: RIS 164



Presiden Soekarno berfoto bersama masyarakat India
di Makassar,
1 Agustus 1950
[ANRI: Kempen, 500801 RR 23](#)

Bagian awal dan akhir Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1951
tentang Pembekuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan
Dewan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan, Persiapan
Pembubaran Daerah Sulawesi Selatan dan Pembagian
Wilayahnya dalam Lingkungan Daerah Otonom Provinsi
Sulawesi,
6 September 1951
[ANRI: Sekretariat Kabinet, Peraturan Pemerintah No. 88](#)



Presiden Soekarno tiba di Makassar dalam rangka kunjungannya ke Sulawesi Selatan, disambut oleh rakyat dengan meriah, 11 November 1951

[ANRI: Kempen, K 511111 RR 18](#)

Surat dari Gubernur Provinsi Sulawesi kepada Kementerian
Dalam Negeri Republik Indonesia mengenai persiapan
pengadaan Panitia Penuntut Provinsi Sulawesi Selatan.

16 Januari 1952

ANRI: Kabinet Presiden 1950-1959 No. 836



Kunjungan Kerja Perdana Menteri Wilopo dan Menteri Dalam Negeri Mr. Mohammad Roem ke Makassar, Sulawesi Selatan, dalam kunjungannya antara lain melihat harta benda negara dari Raja Goa di Makassar,
2 Juli 1952

[ANRI: Kempen, 520702 RR 2](#)

Bagian awal dan akhir Peraturan Pemerintah Nomor 34
Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Sulawesi Selatan dan
Pembagian Wilayahnya dalam Daerah-daerah Swatantra,
12 Agustus 1952

[ANRI: Sekretaris Kabinet, Peraturan Pemerintah No. 138](#)

6

Kata pengantar Kepala Daerah Makassar pada upacara
peresmian pemindahan ibukota Daerah Swatantra
Makassar ke Sungguminasa.-

J.M. Perdana Menteri, para Menteri, Bapa' Gubernur hadirin jang terhormat,

Sjukur Alhamdulillah, saja utjapkan, karena pada saat ini, kita dapat berkumpul ditempat ini, untuk bersama-sama menghadiri pengresmian pemindahan Ibu kota Daerah Swatantra Makassar ke Sungguminasa ini, jang sedjak sekian lamanya berhubung den gan beberapa hal terpaksa masih menumpang dalam wilayah daErah Otonoom Kota Besar Makassar.

Peristiwa ini sungguh mengandung arti jang besar bagi rakyat dalam daErah ini khususnya, bukan sahaja karena selain dari pada bertepatan dengan peringatan Pahlawan Hasanuddin jang kita telah peringati bersama beberapa saat jang lampau, akan tetapi djuga karena hal ini memberikan kejataan, bahwa DaErah Swatantra Makassar, jang dibentuk atas dasar P.P. 34/1952 sedjak 1 Djanuari 1955, telah mempunyai Ibu kota tersendiri.

Dengan pemindahan ibu kota ini, sedjarah akan mengalami riwayatnja, dimana kita diingatkan kepada zaman jang lampau, dimasa keradjaan Gowa mengalami masa keemasannja jang gilang-gemilang, suatu keradjaan jang daja, jang rajatnja mendapat djulukan "De haantjes van het Oosten". Harapan kami ialah, semoga dengan pindahnja e ibu kota ke Sungguminasa ini, daErah ini akan mengalami pula zaman keemasan, suatu zaman jang daja, dalam rangka Indonesia-Raya, jang adil dan ma'mur.

Hadirin jang terhormat,

Dibalik dari pada ini terpaksa saja menjatakan penjesalan saja, oleh karena pada saat jang bersedjarah ini, pengresmian pembukaan balai Pemerintah Daerah Swatantra Makassar, belum dapat dilangsungkan.

Sedjak dari bulan Pemerintah telah berusaha, dengan segala daja upaya

jang

Pencil 118012

-2-

jang ada, untuk menjelesaikan pembangunan balai ini dalam waktu jang sesingkatnja, akan tetapi Tuhan jang maha kuasa tidak memperkenankan pembukaan kantor DaErah ini, bertepatan dengan hari jang bersedjarah ini.

Hadirin jang mulia,

Izinkanlah saja atas nama Pemerintah DaErah Makassar menjatakan terima kasihnja kepada Pemerintah, jang telah memberikan bantuannja dalam pembangunan kantor jang indah ini. Dengan hati jang tulus ichlas saja menjatakan diini, bahwa sumbangan jang telah diberikan itu tidak akan sia2, dan semoga Allah s.w.a. memberikan taufik dan hidajat kepada kita sekalian, dalam membimbing rajat kearah tjita2 kita bersama, jaitu Negara R.I. jang aman, ma'mur dan sentosa. Amin.-

Sekian,

Pencil 118012

Kata pengantar Kepala Daerah Makassar pada upacara
peresmian pemindahan ibukota daerah Swatantra Makassar
ke Sungguminasa

Januari 1953

ANRI: Muhammad Yamin No. 329

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1953 tentang Mengubah
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1952 "Peraturan tentang
Pembubaran Daerah Sulawesi Selatan dan Pembagian
Wilayahnya dalam Daerah-daerah Swatantra",
7 Januari 1953
[ANRI: Sekretaris Kabinet, Peraturan Pemerintah No. 157](#)

Sambutan meriah dari masyarakat menyambut kedatangan
Presiden Soekarno di Pare-Pare, dalam rangka kunjungannya
ke Sulawesi Selatan,
5 Februari 1953

[ANRI: Kempen, K 530205 RR 13](#)

5.

P I D A T O Kepala DaErah Makassar pada upatjara
peringatan „SULTAN HASANUDDIN“, tang-
gal 12 Djuni 1954.-

Bapa' Perdana Menteri, Para Menteri jang kami muliakan,
para hadirin jang terhormat,

Izinkanlah kami pertama2 menjampaikan rasa s'jukur kami
kehadirat Allah Subehanahu Wataala, jang telah melimpahkan
rachmat dan taufiknja kepada kita sekalian, sehingga pada
saat ini, pada hari bersedjarah ini, kita dapat berkumpul
ditempat ini untuk turut menghadiri, meramaikan serta me-
muliakan hari jang dikandung oleh sedjarah, sebagai ternja-
ta pada saat ini. Kampun ta' lupa menjampaikan rasa terima
kasih kami kehadapan J.M. Perdana Menteri serta para Mente-
ri, jang telah mentjurahkan perhatiannja kepada upatjara
peringatan ini, jang dengan setjara kebetulan berlangsung
didaErah kami, hal mana adalah merupakan suatu kehormatan
dan kebanggaan bagai kami berserta dengan seluruh ra'jat
Kabupaten Makassar. Kehadiran Bapa' Perdana Menteri jang
kami muliakan, beserta para Menteri pada upatjara ini, sung-
guh ta' dapat disangkal merupakan suatu dorongan semangat
keprtjajaan ra'jat terhadap Pemerintahnja, jang sekian lama
dalam daErah ini dianggapnja selalu didjauhi, belum diberi-
kan perhatian sewadjaranja. Kini dengan terang, laksana ma-
tahari, ra'jat telah dapat menjaksikan akan perhatian Bapa2
jang kami muliakan, jang mana hal ini disambut dengan rasa
kesjukuran oleh ra'jat Kabupaten Makassar chususnja dan Su-
lawesi pada umumnja.

Hadirin jang terhormat,

Djika pada saat ini, kita berkumpul ditempat ini, maka
adalah maksud pertemuan ini ta' lain dan ta' bukan untuk
memperingati arwah almarhum Sultan Hasanuddin, seorang Pahlawan
jang dikagumi, baik di Timur, maupun di Barat. Masih
terdengung ditelinga akan gelaran jang diperoleh beliau
dari bangsa Barat, „ De haantjes van het Oosten „, sebagai
akibat dari tiap2 perlawanan jang telah diadakan oleh be-
lieu dalam memmentang tiap2 bentuk pendjadjahan jang dida-
tangkan oleh Bangsa Barat. Masih teringat oleh kita akan

kepahlawanan

Formulir 10002

Bagian awal Pidato Kepala Daerah Makassar pada Upacara
Peringatan Pahlawan Hasanuddin di Balai Pertemuan Masyarakat
di Makassar, Sulawesi Selatan
12 Juni 1954

ANRI: Muhammad Yamin No. 329a

Presiden Soekarno dan Ibu Fatmawati tiba di Bandar Udara
Mandai Makassar, dalam rangka kunjungannya
ke Sulawesi Selatan,
15 Juli 1954

[ANRI: Kempen, 540715 RR 6](#)

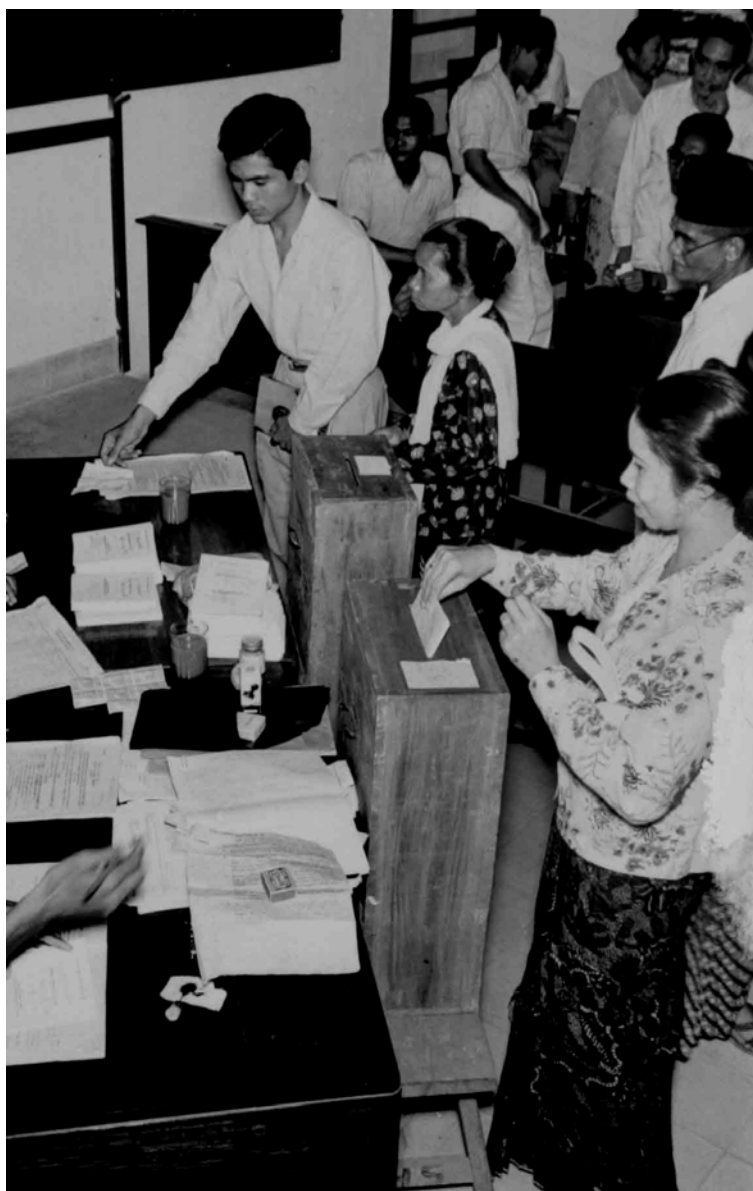


Gubernur Sulawesi Lanto Daeng Pasewang dan Panglima Teritorial VII menyambut kedatangan Wakil Presiden Mohammad Hatta dan Ibu Rahmi Hatta di Bandar Udara Makassar, dalam rangka kunjungannya ke Sulawesi Selatan
22 Oktober 1954

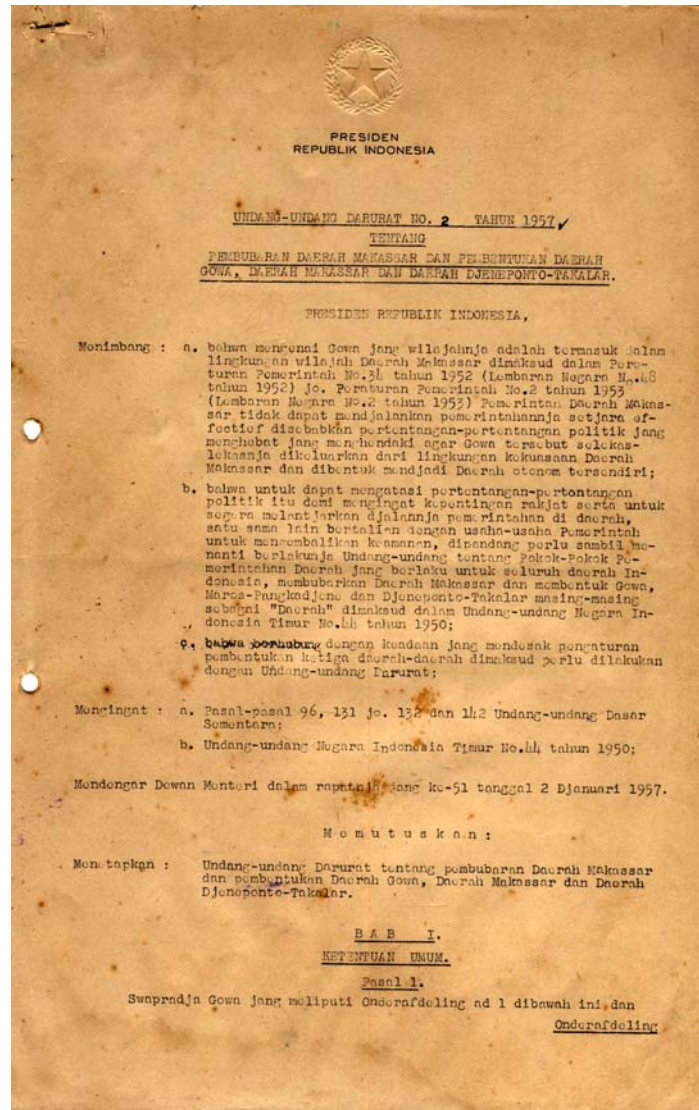
[ANRI: Djapen Sulawesi, M 10534](#)

Wakil Presiden Mohammad Hatta dan Ibu Rahmi Hatta
dalam rangka kunjungan ke Sulawesi, menghadiri Rapat Raksasa
didampingi Gubernur Sulawesi Lanto Daeng Pasewang,
22 Oktober 1954

ANRI: Kempen, K 541022 RR 1-3

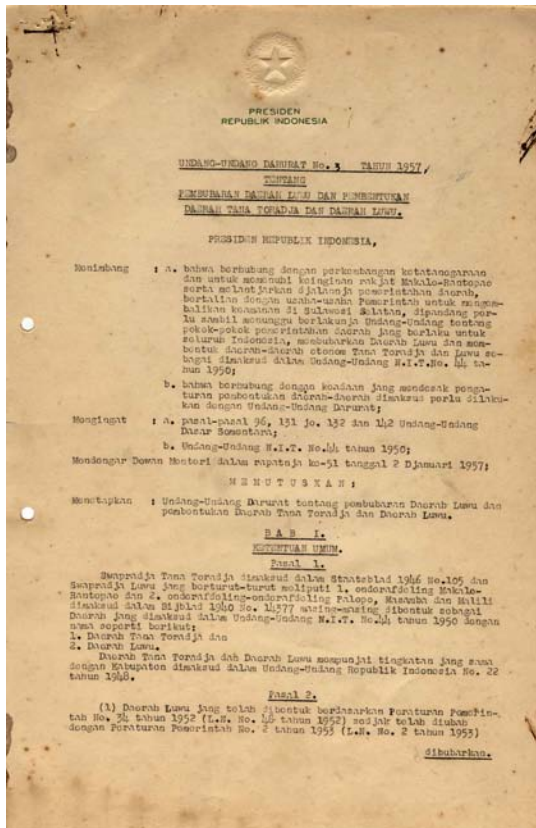


Pelaksanaan Pemilihan Umum di Makassar,
29 September 1955
ANRI: Djapen Sulawesi, M. 11856



Bagian awal Undang-Undang Darurat Nomor 2
Tahun 1957 tentang Pembubaran Daerah Makassar dan
Pembentukan Daerah Goa, Daerah Makassar dan
Daerah Jeneponto-Takalar,
16 Januari 1957

ANRI: Sekretaris Kabinet, Undang-Undang Darurat No. 137



Bagian awal dan akhir Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1957 tentang Pembubaran Daerah Luwu dan
Pembentukan Daerah Tana Toraja dan Daerah Luwu,
16 Januari 1957

ANRI: Sekretaris Kabinet, Undang-Undang Darurat No. 138

Bagian awal dan akhir Undang-Undang Darurat Nomor 4
Tahun 1957 tentang Pembubaran Daerah Bone dan
Pembentukan Daerah Bone, Daerah Wajo dan Daerah Soppeng,
16 Januari 1957
[ANRI: Sekretaris Kabinet, Undang-Undang Darurat No. 139](#)



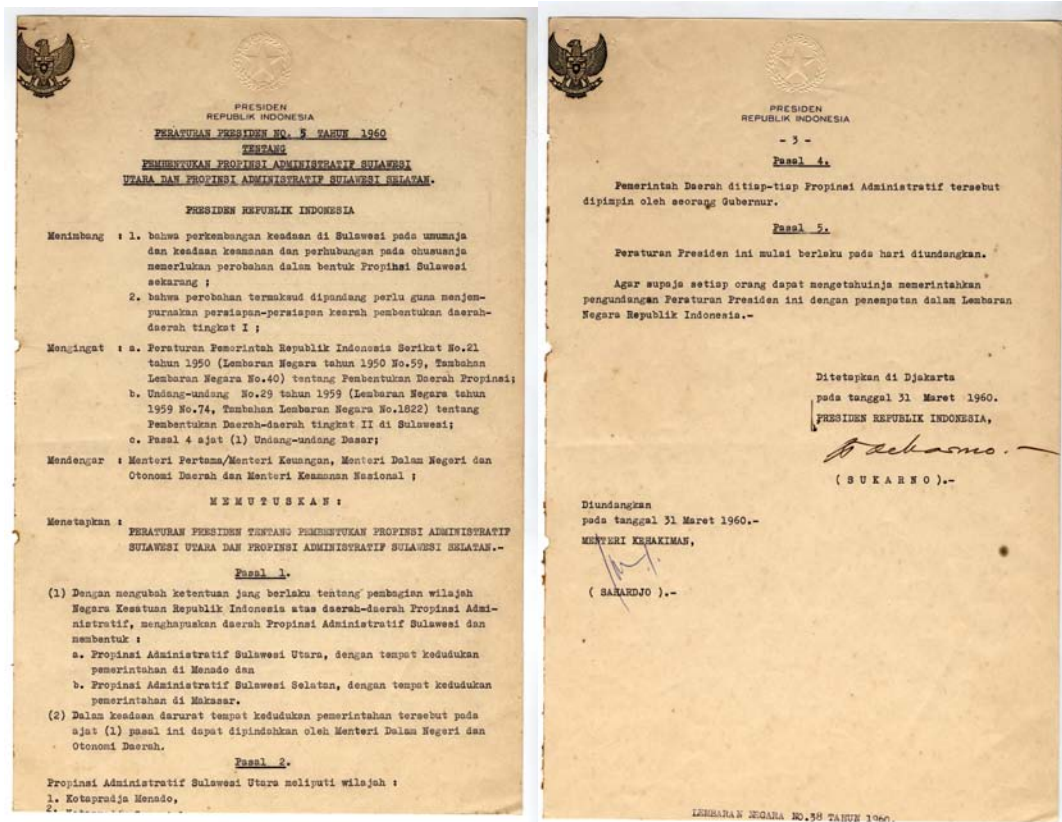
Pelantikan Andi Mappanjuki menjadi Kepala Daerah/
Raja Bone di Bone, Sulawesi Selatan
21 Desember 1957

[ANRI: Djapen Sulawesi, M. 14415](#)



Pelantikan Abdul Latief Daeng Massikki menjadi Walikota
Makassar, di Makassar, Sulawesi Selatan
7 Januari 1958.

[ANRI: Djapen Sulawesi, M. 14451](#)



Bagian awal dan akhir Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pembentukan Provinsi Administratif Sulawesi Selatan dan Provinsi Administratif Sulawesi Utara, 31 Maret 1960
ANRI: Sekretaris Kabinet, Perpres No. 20



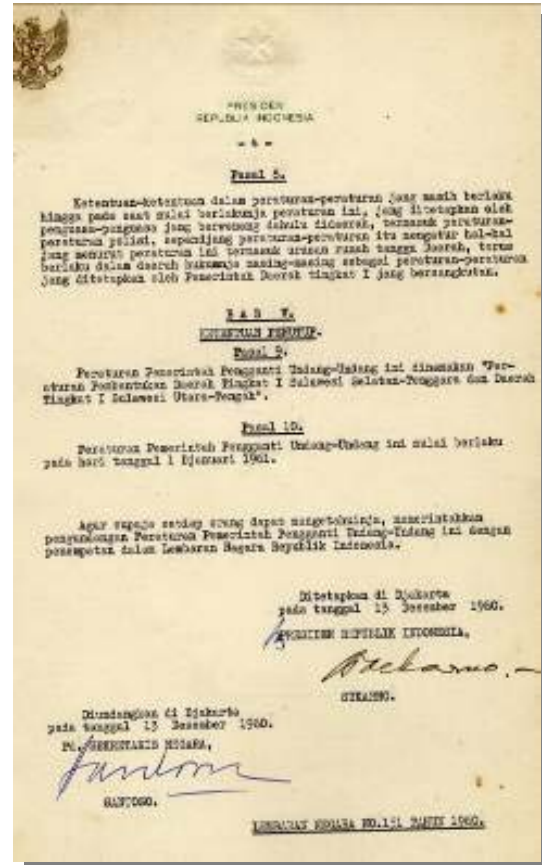
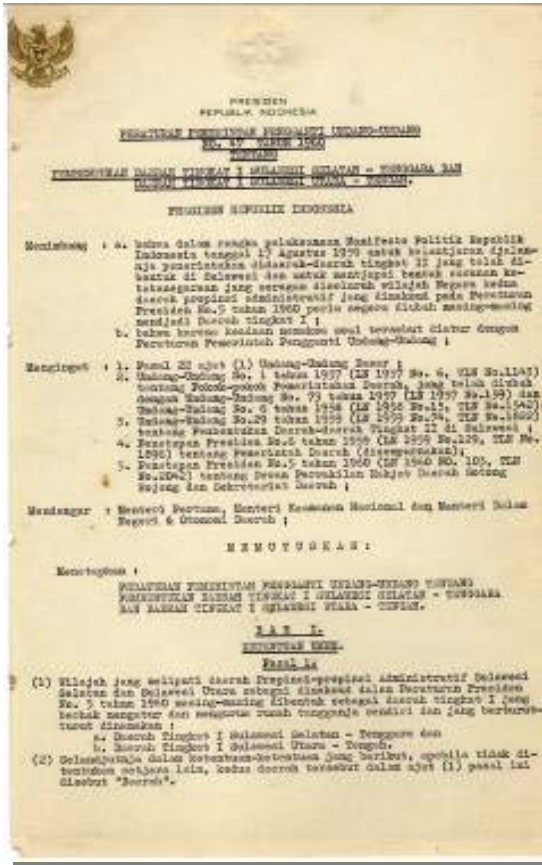
Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Ipi Gandamana
membacakan sumpah pada Pelantikan dan Serah Terima
Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan-Tenggara
dari Andi Pangerang kepada H. Andi Rivai
20 April 1960.

ANRI: Djapen M 15836



Gubernur Sulawesi Selatan Tenggara H. Andi Rivai sedang berpidato pada Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan Tenggara dari Andi Pangerang kepada H. Andi Rivai,
20 April 1960.

ANRI: Djapen M 15845



Bagian awal dan akhir dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah, 13 Desember 1960.

ANRI: Sekretariat Kabinet Perpu 77



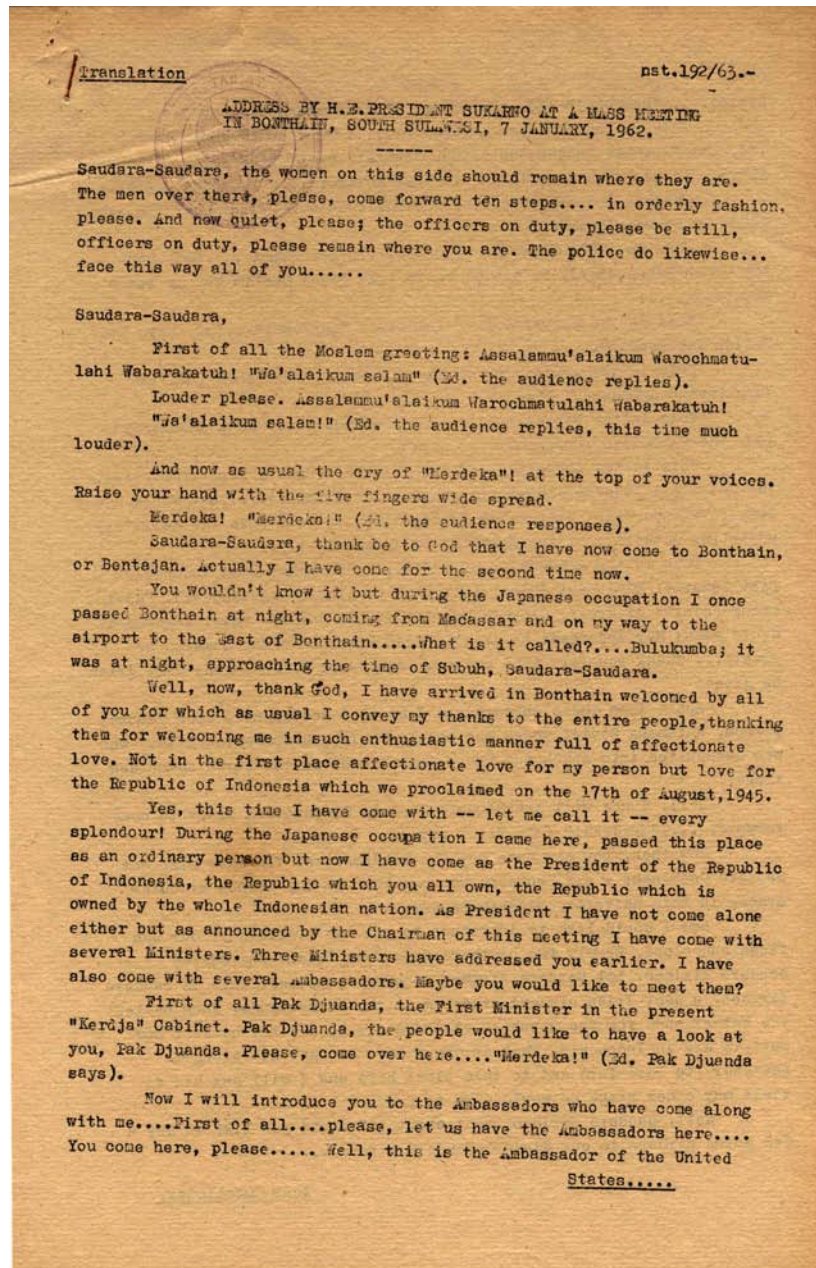
Presiden Soekarno dan tamunya Mayor G. Titou Austranaul II
disambut barisan penari Cakalele dalam rangka menghadiri
Rapat Raksasa Pembebasan Irian Barat di Makassar,
Sulawesi Selatan
4 Januari 1962.

[ANRI: Kempen, 620104 RR 5](#)



Kunjungan Presiden Soekarno ke Makassar dalam rangka menghadiri Rapat Raksasa "Pembebasan Irian Barat" di Makassar, Sulawesi Selatan, 4 Januari 1962.

[ANRI: Kempen, M 16589/1](#)



Bagian awal Pidato Presiden pada Rapat Umum di Bantaeng,
Sulawesi Selatan yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris
untuk dipublikasikan
1 Juli 1962

ANRI: Pidato Presiden tahun 1950-1959 No.363



DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 903.53-362.

TENTANG
PENGESEHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 1984/1985

MENTERI DALAM NEGERI,

Membaca : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor : 903/1056/Keu tanggal 29 Maret 1984 perihal Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor : 2 Tahun 1984 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1984/1985 ;

Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 1984/1985 merupakan suatu rencana kerja keuangan yang menjadi landasan bagi semua kegiatan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dalam Tahun Anggaran 1984/1985, untuk dapat dilaksanakannya perlu diberikan pengesahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. Tahun 1974 Nomor 38 T.L.N. Nomor : 3037) ;
3. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1984 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1984/1985 (L.N. Tahun 1984 Nomor : 8 ; T.L.N. No. 3268) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (L.N. Tahun 1975 Nomor : 5) ;

5. Peraturan

1598/MWan/Bu

Bagian awal Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.53-362 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 1984/1985.

17 Mei 1984

ANRI: Sekretariat Wakil Presiden Umar Wirahadikusuma No. 14

PERTAHANAN dan KEAMANAN



Sketsa Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Goa yang melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda di Sulawesi terutama Sulawesi Selatan pada abad ke-17.
Atas jasa-jasanya, Sultan Hasanuddin dianugerahi Pemerintah RI sebagai Pahlawan Nasional,
[ANRI: Kempen, R 530312 FG 1-1](#)

NO. 49.

Enkele gegevens
over
Robert Wolter Mongisidi

uit verschillende ver-
sies.

Wolter Mongisidi, meestal genoemd Wolter,
fanatiek Menadonees ex- Heiho.

Onder Karaeng Polombangkeng . Zetel bende in Polombang-
keng, doch ageert veel in en om Makassar.

Karaeng Polombangkeng had gouden lipan badjeng. Mongisidi
had silveren, buiten hem nog maar één andere silveren bij
Endang.

Medeoprichter van de Lapris (Mei 1946) te Polombangkeng)
nl. Mongisidi en Endang; eveneens Lipan Badjeng, voorheen
tentara Badjeng, vertakking van de Lapris.

Het kantoor van de P.A.I. (Perzatoean Annemer Indone-
sia) Verlengde Schijfbergweg 69 werd door Mongisidi gebruik
als verzamelplaats.

Was October/November 1946 in kampong Paniloekan ten
huise van Dabing Matte; had 2 schrijfmachines en 1 stencil-
apparaat; tikte pamfletten (voorbeeld hierbij);
maakte in October de kepala kampong van Batoea af omdat
deze belasting wilde innen.

Liefje: Remy Saelan alias Soekertini; trad op als verpleeg-
ster van de bende;uster van bendelid Maulid Saelan; zij
sneuvelde bij treffen eind Januari 1947 bij kampong Kapala.

1e.helft October treffend met politie-kampong Batoe, bij de
bende waren toen: Ali Malakka, Hassan bin Tahir, Endang,
Mongisidi, Sangcala, Doellah, T-Inri, Kimo, Montjo, Aliman,
J.Uritman, Maranis, Ambe Dalle, Dg.Beta,Dg.Matte,Moesa, Nau-
wi en Remy Saelan.Politie verloor 1 Owen-gun en Karabyn, 2
politieagenten.

-2-

politieagenten gevangen genomen door bende Mongisidi;
tegenfabriek in kampong Patjinaug bezocht; geruchten over
aanval 250 extremisten op radiostation, gasfabriek en po-
litiekazerne.

Begin November. Bende verhuist naar Parang. Gevecht met mi-
litairen bij Goenoeng-Suri.

1e.helft November 1946. Mongisidi houdt zich op in de stad.
Endang was op dat moment reeds neergelegd.

Medio November kreeg schotwond bij treffen in Barabong waar
Maranis sneuvelde.

Mongisidi ging weg van de bende, was bij ieder gehaal en ge-
vreesd wegens ruw optreden; bijna vuurgevecht met Endang.
Mongisidi was toen alleen met Remy Saelan, ging vermoedelijk
richting Maros.

Mongisidi kwam in October veel bij den Menadonees Rotinsulu
in Djongaja. Verdere contacten van hem waren: Toko Sian,
t.o. Wadio Barpa en Toko Sabar aan de Patoenampang.
Overnachtte ook een paar keer bij toko Lotang, 3e.Beroe-
straat No. 12.

Mongisidi ontving geld, papier, schrijfmachinelinten, rijst
van Moh.Joenees, de eigenaar van de toko. 10 - eind Decem-
ber weer in de stad.

Uitme Februari 1947 Mongisidi gearresteerd door Nolie-
le Brigade van de Stads politie te Makassar.-

--oO--

Riwayat singkat Robert Wolter Monginsidi yang dibuat oleh
Netherlands Expeditionary Forces Intelligence Service (NEFIS).

Februari 1947

ANRI: NEFIS No. 49

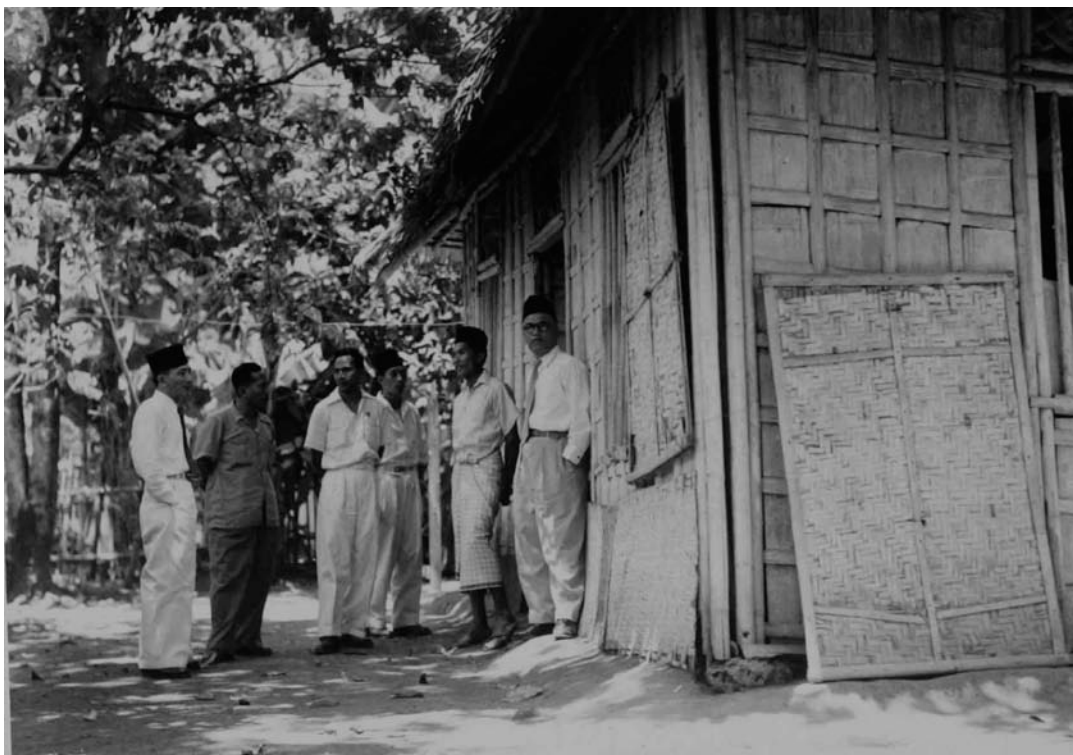


Sketsa Robert Wolter Monginsidi,
ANRI: Kempen, R 521009 FG 1-1



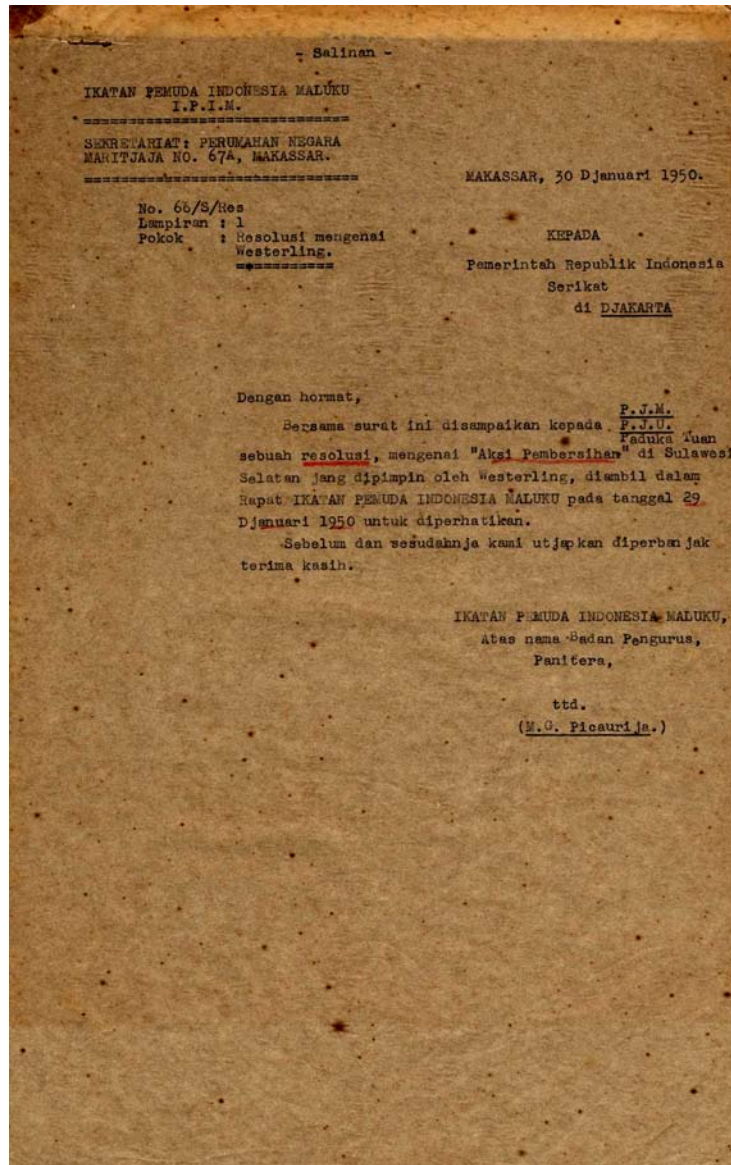
Presiden Soekarno berfoto bersama keluarga Pahlawan Nasional
Robert Wolter Monginsidi,
1 Agustus 1950.

ANRI: [Kempen, 500801 RR 23](#)



Komisi Parlemerter Makassar mengunjungi rumah dimana
Robert Wolter Monginsidi ditangkap tentara Belanda,
7 November 1950

[ANRI: Djapen Sulawesi M. 5435](#)



Surat dari Ikatan Pemuda Indonesia Maluku kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat mengenai resolusi tentang aksi pembersihan di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Westerling.
30 Januari 1950
ANRI: Kabinet Presiden RIS No. 275



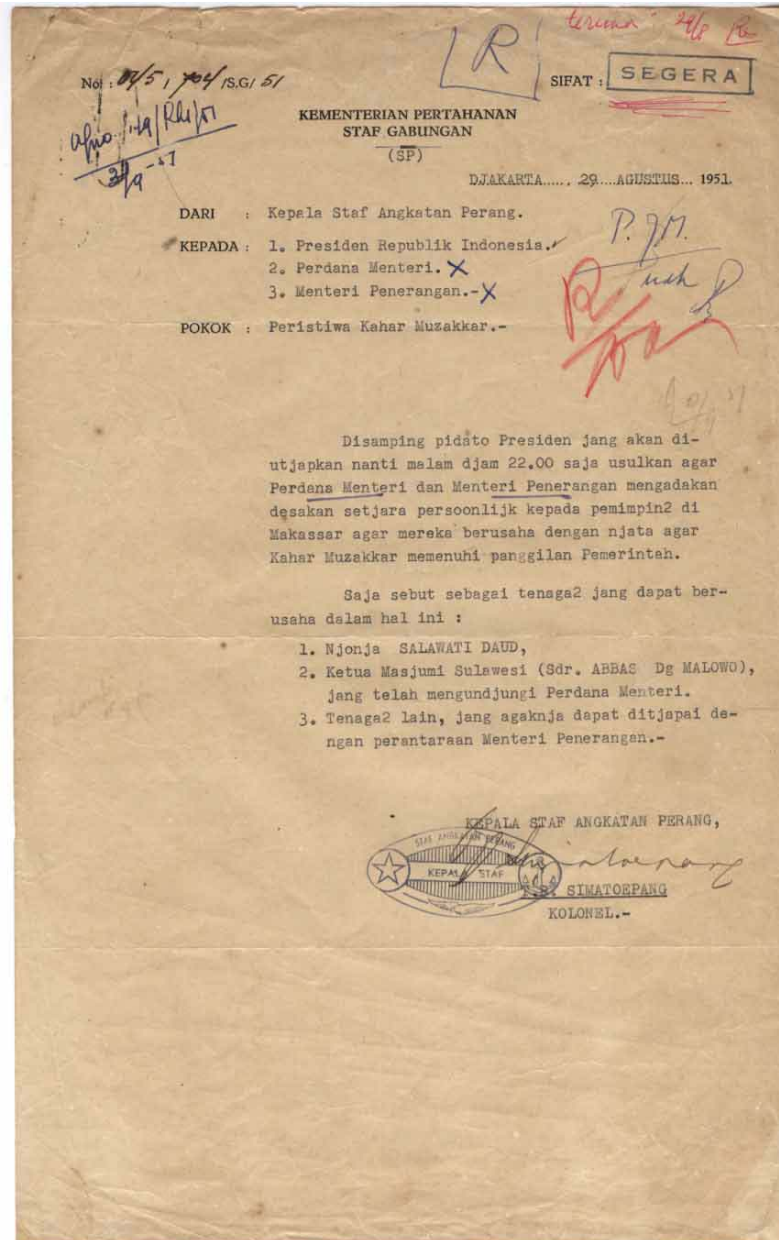
Pasukan TNI pimpinan H.V. Worang (Batalion Worang)
mendarat di Jeneponto untuk merebut Makassar
yang diduduki pemberontak Andi Azis.

20 April 1950.

ANRI: IPPHOS 5/29



Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Koordinator
Keamanan Sri Sultan Hamengku Buwono IX ketika tiba di
Bandara Hassanudin Makassar dalam rangka kunjungannya
ke Makassar,
24 Februari 1951
[ANRI: Kempen, 5647](#)



Surat dari Kepala Staf Angkatan Perang kepada Presiden Republik Indonesia tentang usul agar Perdana Menteri dan Menteri Penerangan mendesak secara personal kepada Pemimpin-pemimpin Makassar untuk berusaha nyata agar Kahar Muzakkar memenuhi panggilan pemerintah.

29 Agustus 1951

ANRI: Kabinet Presiden 1950-1959 No.1762

Penyerahan diri Andi Sose beserta pasukannya kembali ke pangkuan Republik Indonesia, di Makalla Sulawesi Selatan.

4 April 1952

[ANRI: Djamal Marsudi No. 190](#)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No.199 TAHUN 1953

TENTANG

PENGANGKATAN HAKIM-HAKIM-PERWIRA PADA PENGADILAN TENTARA DI MAKASSAR.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : perlu menambah djumlah Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Makassar;

Mengingat : a. pasal 9 ayat (5) Undang-undang No.5 tahun 1950 (Lembaran Negara No.52 tahun 1950);
b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.98 tahun 1953 (Berita Negara No.49 tahun 1953);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- I. Mengangkat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Makassar:
1. KAPTEN GEORGE KANDOU MONTOBALU
N.R.P.15960.Kep.Staf R.I.24. T.T.VII.
 2. KAPTEN JOOST ALEXANDER WUISAN
N.R.P.16266. Kmd.Bn. 717. T.T.VII.
- II. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 18 Nopember 1953.

S.M. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno

SUKARNO.

MENTERI PERTAHANAN,

Iwa Kusumasumantri

IWA KUSUMASUMANTRI.

MENTERI KEHAKIMAN,

Djody Gondokusumo

DJODY GONDOKUSUMO.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 199 tahun 1953
tentang Pengangkatan Hakim-Hakim Perwira pada Pengadilan
Tentara di Makassar.

18 November 1953

ANRI: Sekretaris Kabinet, Keppres 882



Konferensi Pers Kepala Staf Angkatan Darat
Jenderal A.H.Nasution di Lapangan Terbang Mandai, Makassar,
menjelaskan tentang Operasi Pembebasan Irian Barat dari
Penjajahan Belanda yang akan bermarkas di Makassar,
Sulawesi Selatan.

Tampak Letnan Kolonel M. Yusuf mendampingi KASAD.
30 Maret 1960.

[ANRI: Kempen, K 600330 RR 1](#)



Pertemuan Menteri Keamanan Nasional/Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal A.H. Nasution dengan Mayor Gerungan dari Kelompok Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) di perbatasan Bone dan Soppeng, Sulawesi Selatan
31 Maret 1960.

[ANRI: Kempen, K 600329 RR 3-3](#)



Dari kiri ke kanan: Kolonel M.Yusuf, Panglima Operasi Mandala:
Mayor Jenderal Soeharto, Letnan Jenderal Achmad Yani dan
Letnan Jenderal Gatot Subroto saat menghadiri Timbang Terima
Deputi Kepala Staf Angkatan Darat Wilayah Indonesia Timur
di Makassar,
22 Januari 1962.

ANRI: Djapen Prop Sulselra, M 16641



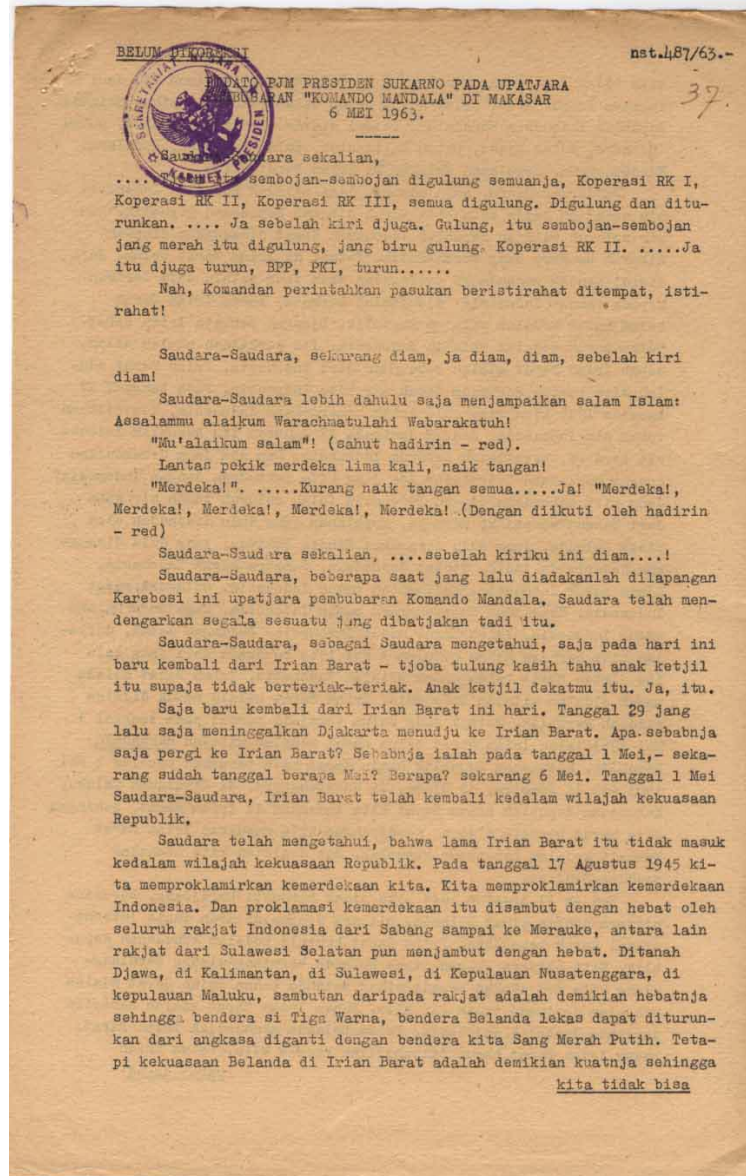
Kedatangan gelombang I Pasukan Sukarelawan Pembebasan
Irian Barat di Makassar, Sulawesi Selatan.
15 Februari 1962.

[ANRI: Djapen Prop Sulselra, M. 16668.](#)



Panglima Operasi Mandala Mayor Jenderal Soeharto menyambut kedatangan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal A.H. Nasution di Lapangan Terbang Panaikan, Makassar, dalam rangka menghadiri peringatan Hari Pahlawan, 10 November 1962.

[ANRI: Djapen Prosul Sulselra, M 16807](#)



Bagian awal Pidato Presiden Soekarno pada upacara
Pembubaran "Komando Mandala" di Makassar, Sulawesi Selatan.
6 Mei 1963

ANRI: Pidato Presiden Soekarno No. 492

Bagian awal Amanat Presiden Soekarno pada peringatan 40.000
korban Westerling di Sulawesi Selatan, di Senayan, Jakarta.
10 Desember 1964
[ANRI: Pidato Presiden Soekarno No. 676](#)

AMATAN PTF PRESIDEN SUKARNO PADA PERINGATAN HARI
PAHLAWAN DAN PEMBERIAN TANDA JASA BINTANG MAHA PUTRA III
KEPADA ALMARHUM ROBERT WOLTER MONGINSIDI DI ISTANA NEGARA,
DJAKARTA., 10 NOVEMBER 1965.

Saudara-Saudara,

Hari Pahlawan, 10 Nopember, yang saudara-saudara semuanya mengetahuinya dulu saja tentukan 10 Nopember itu resmi sebagai Hari Pahlawan, oleh karena pada tanggal 10 Nopember 1945-lah meledak di Surabaya perbuntaran-perbuntaran kepehlawanan daripada bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita, mempertahankan kemerdekaan bangsa kita, 10 Nopember 1945 di Surabaya. Maka berhubung dengan itu hari 10 Nopember itu saja ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Dan tiap-tiap tahun 10 Nopember kita peringati dengan mengingati arwah-arwah pahlawan-pahlawan Indonesia yang telah gugur mendahului kita dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan negara dan bangsa itu.

Saja dengan bangsa saudara-saudara, dengan bangsa bisa mengatakan bahwa bangsa Indonesia ini adalah salah satu bangsa yang banyak sekali mempunyai pahlawan-pahlawan, bukan saja itu, tetapi pahlawan-pahlawan yang telah gugur. Pernah saja menceritakan kepada orang-orang resmi bahwa pada suatu waktu kita didatangi disini oleh seseorang tamu Agung. Terus terang saja pada waktu itu ialah Madame Pandit, Widjaja Laksmi Pandit, adiknya saudara Jawaharlal Nehru, datang di Indonesia. Dan saja bawa beliau keliling ke beberapa tempat di Indonesia ini. Bukan saja di Djakarta, tetapi saja bawa beliau itu ke Bandung, ke Jogja, ke Sala, ke Bali dan lain-lain tempat. Dan ditiap-tiap tempat yang kami bawa beliau itu, beliau melihat adanya taman-taman pahlawan, beliau keluar air matanya, sambil berkata, hai yang demikian ini kami di India tidak mempunyai, taman pahlawan. Such things we have not in India, kata beliau. Tapi di Indonesia dimana-mana. Madame Widjaja Laksmi melihat adanya taman-taman pahlawan. Bahkan kadang beliau misalnya di Bali mendengar dari mulut saja, bahwa di satu tempat Ketjil, Tobanan, ada taman pahlawan dengan kuburan hampir 1000 buah, hampir 1000 buah pahlawan Tobanan. Itu satu bukti, kata beliau, dan perkataan beliau itu adalah tepat, bahwa Indonesia ini mantjapai kemerdekaannya dengan perjuangan, bukan perjuangan yang ketjil tetapi perjuangan yang sangat hebat, perjuangan yang nista korban-korban jiwa dan raga yang senasional-nasionalnya.

Berhubung dengan itu maka beliau meneteskan air matanya. Dan berhubung dengan itu pula saja dengan bangsa membenarkan perkataan beliau, yes, Indonesia has achieved its independence with
sacrifices and with

Bagian awal Amanat Presiden Soekarno pada Peringatan Hari Pahlawan dan Pemberian Tanda Jasa Bintang Mahaputra III kepada Robert Wolter Monginsidi di Istana Negara, 10 November 1965

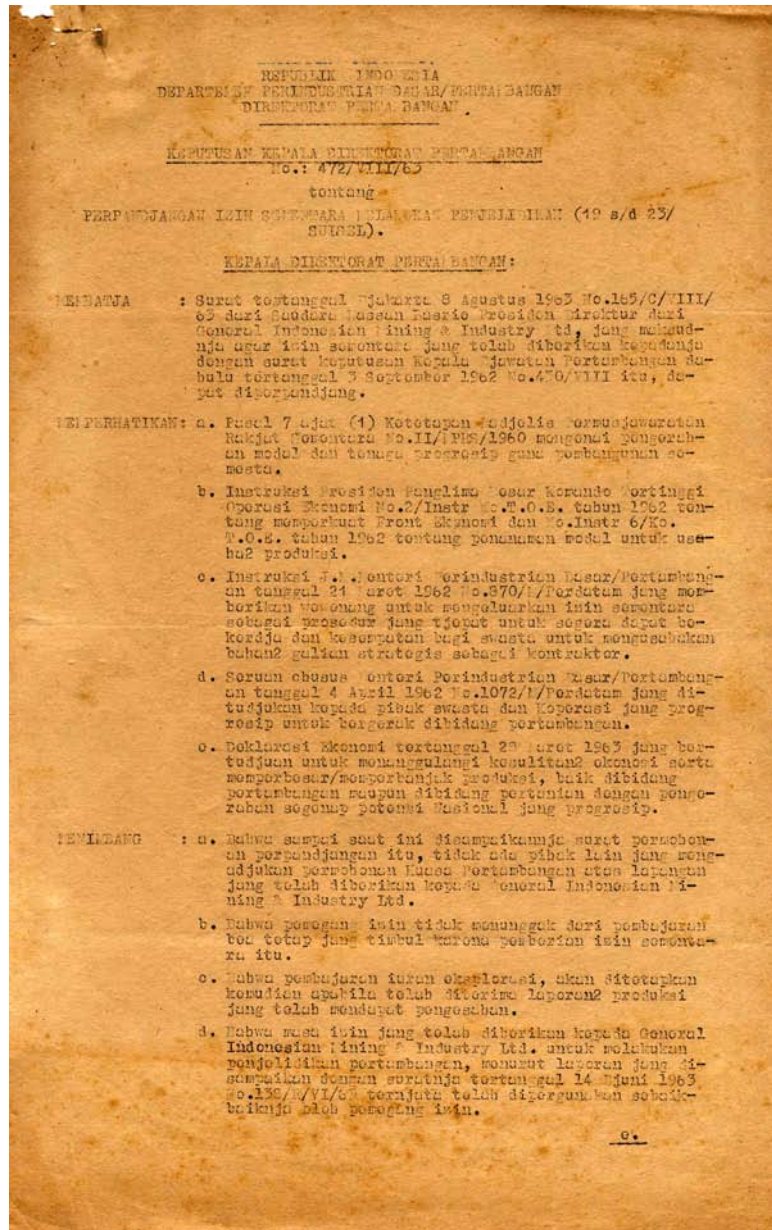
ANRI: Pidato Presiden Soekarno No. 882

PERTAMBAANGAN



Gudang minyak di Pare-Pare, Sulawesi Selatan
1 Mei 1951.

ANRI: Kempen, 515001



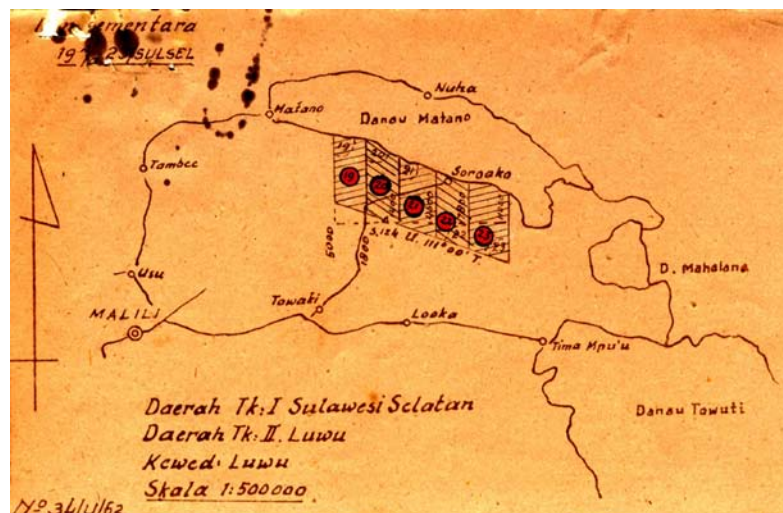
Keputusan Kepala Direktorat Pertambangan Departemen
Pertambangan Nomor 472/VIII/63 mengenai perpanjangan ijin
sementara melakukan penyelidikan pertambangan nikel di
Sulawesi Selatan

21 September 1963

ANRI: Ekonomi Keuangan dan Pembangunan 753

Surat dari Direktur Utama Badan Pimpinan Umum Perusahaan-
Perusahaan Tambang Umum Negara kepada Menteri
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi mengenai *contractorship*
dalam penambangan bijih nikel di Soroako, Sulawesi Selatan
7 April 1966

ANRI: Ekonomi Keuangan dan Pembangunan 753



Surat dari Deputi Menteri Pertambangan kepada Menteri
Pertambangan dan Migas mengenai Kontrak Kerja Badan
Pertambangan Umum Tambang Umum dengan *General Mining
Co. Ltd.* tentang tambang nikel di Soroako,
Sulawesi Selatan

11 Juni 1966

ANRI: Ekonomi Keuangan dan Pembangunan 753

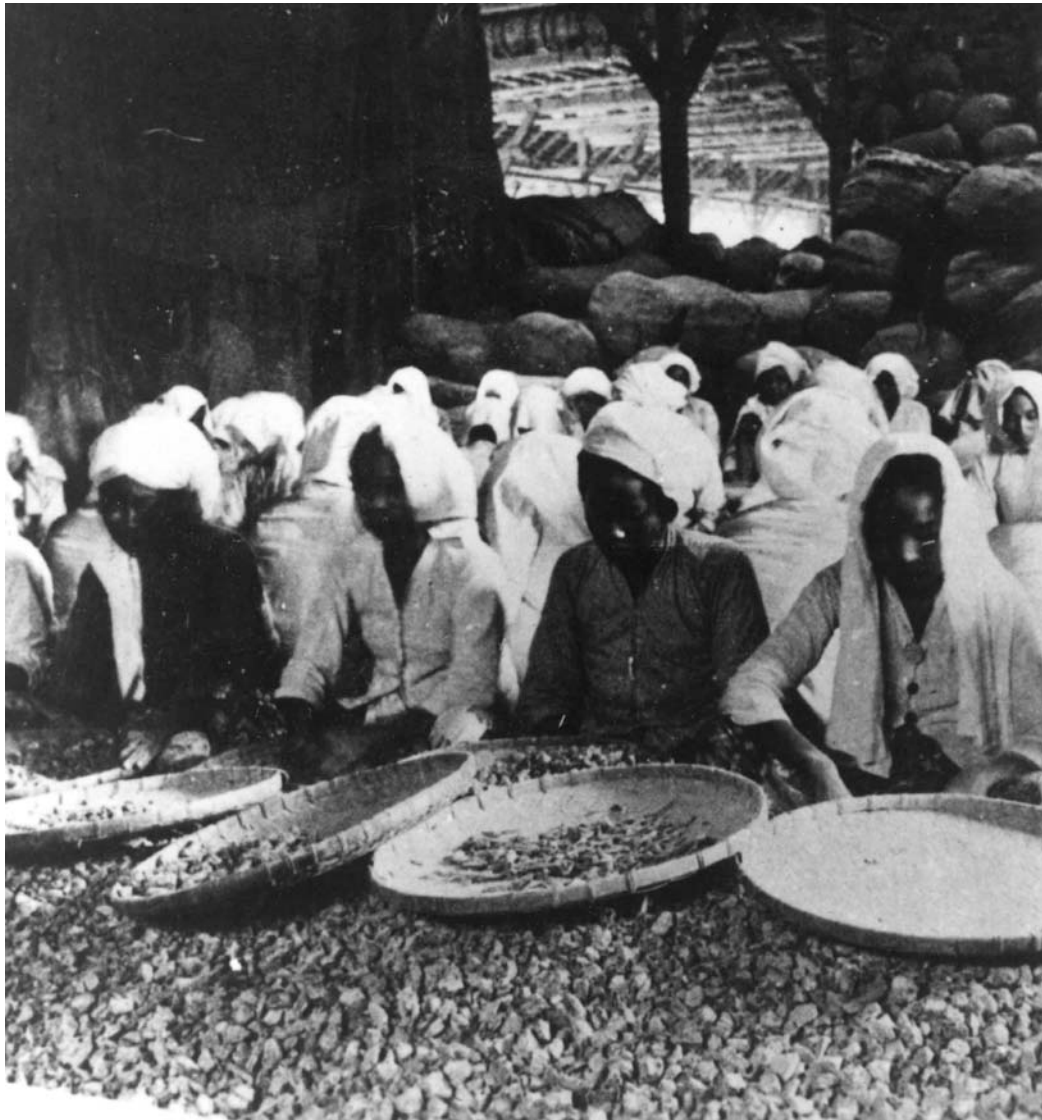
PEREKONOMIAN dan PERDAGANGAN



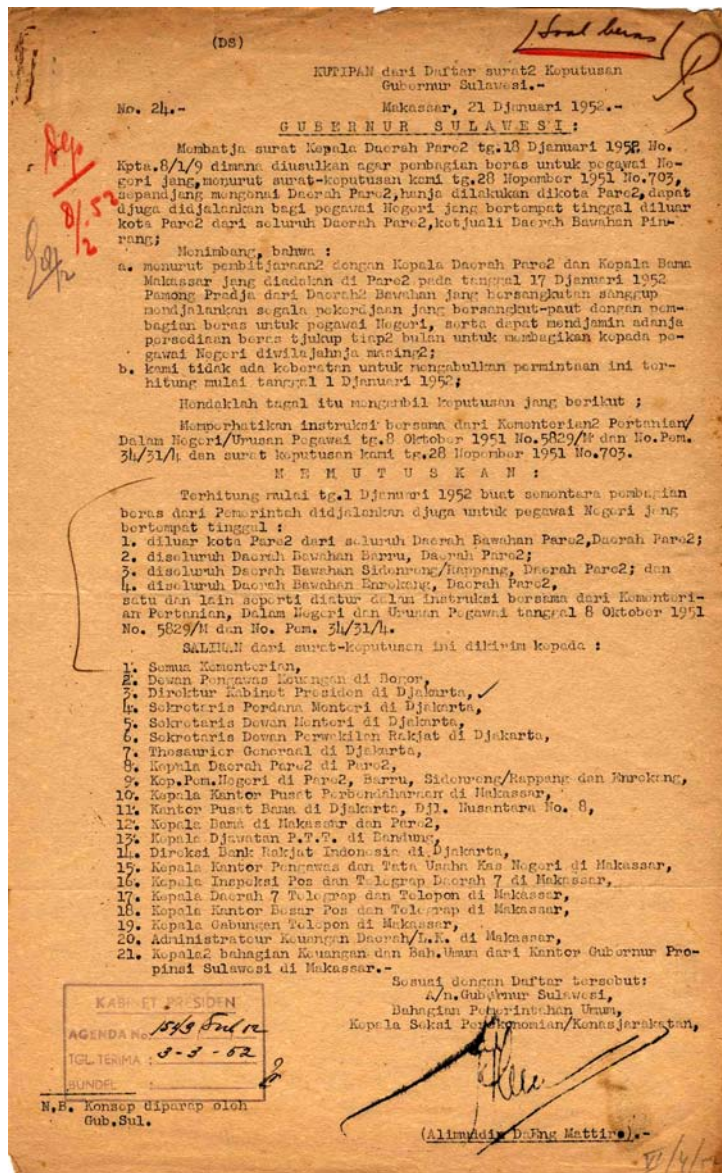
Suasana Pasar Makale, Sulawesi Selatan.

[± 1930]

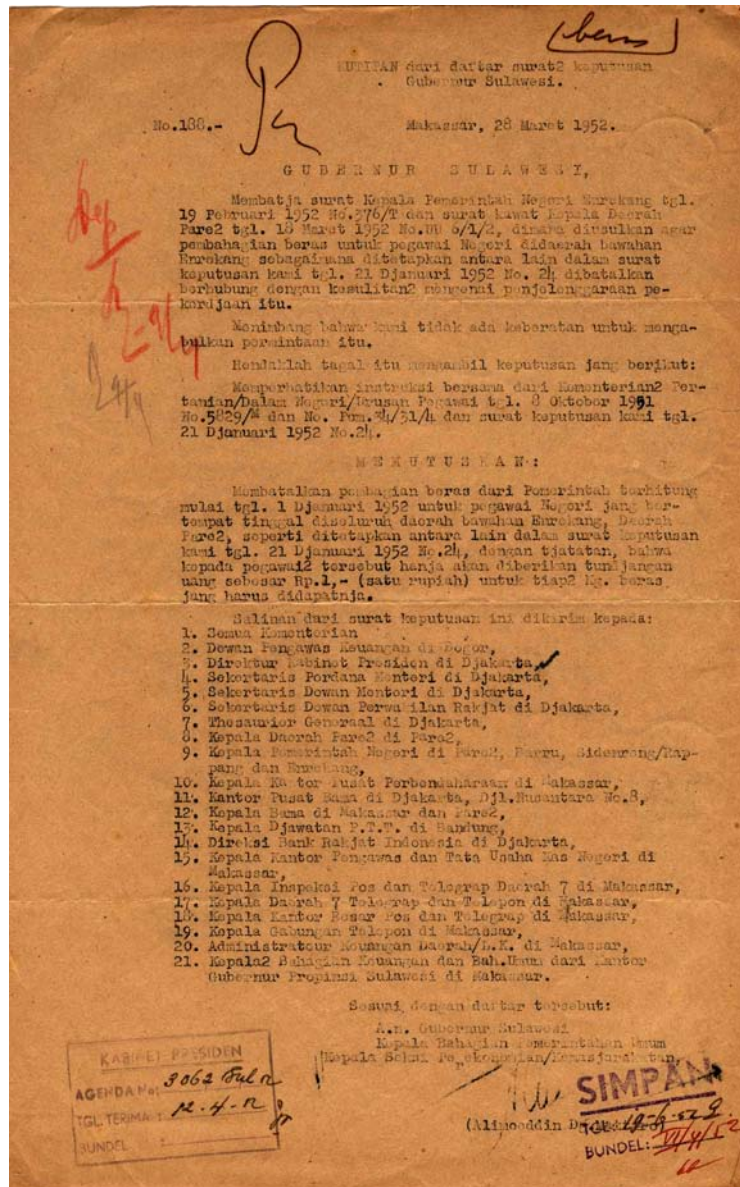
ANRI: KIT, 373/72



Para pekerja wanita sedang menyortir biji damar di Makassar,
Sulawesi Selatan.
[± 1930]
ANRI: KIT, 649/70



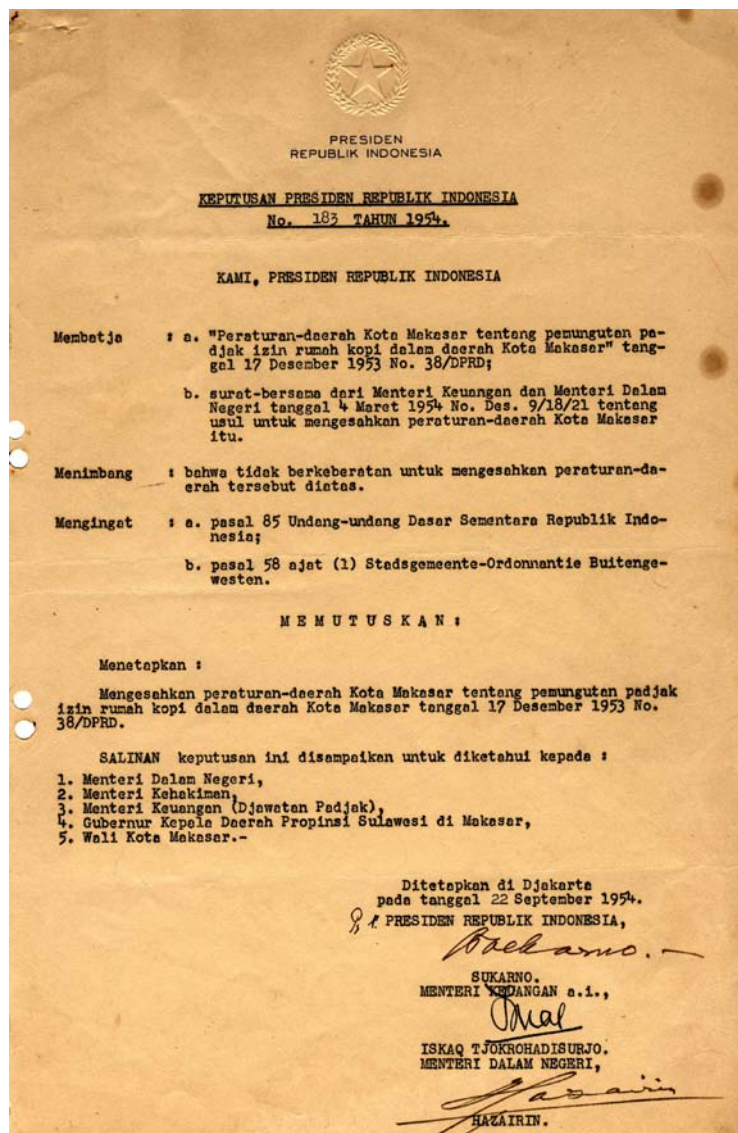
Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Nomor 24/1952 mengenai pemberian beras dari pemerintah untuk pegawai negeri yang ada di luar Pare-Pare dan daerah bawahan Pare-Pare, Sulawesi Selatan
21 Januari 1952
ANRI: Kabinet Presiden 1950-1959 No.693



Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Nomor 188/1952 mengenai pembatalan pemberian beras dari pemerintah untuk pegawai negeri yang ada di daerah bawahan Enrekang, Pare-Pare dan kepada pegawai tersebut hanya akan diberikan tunjangan uang sebesar 1 rupiah untuk tiap satu kilo gram beras yang akan didapatnya.

28 Maret 1952

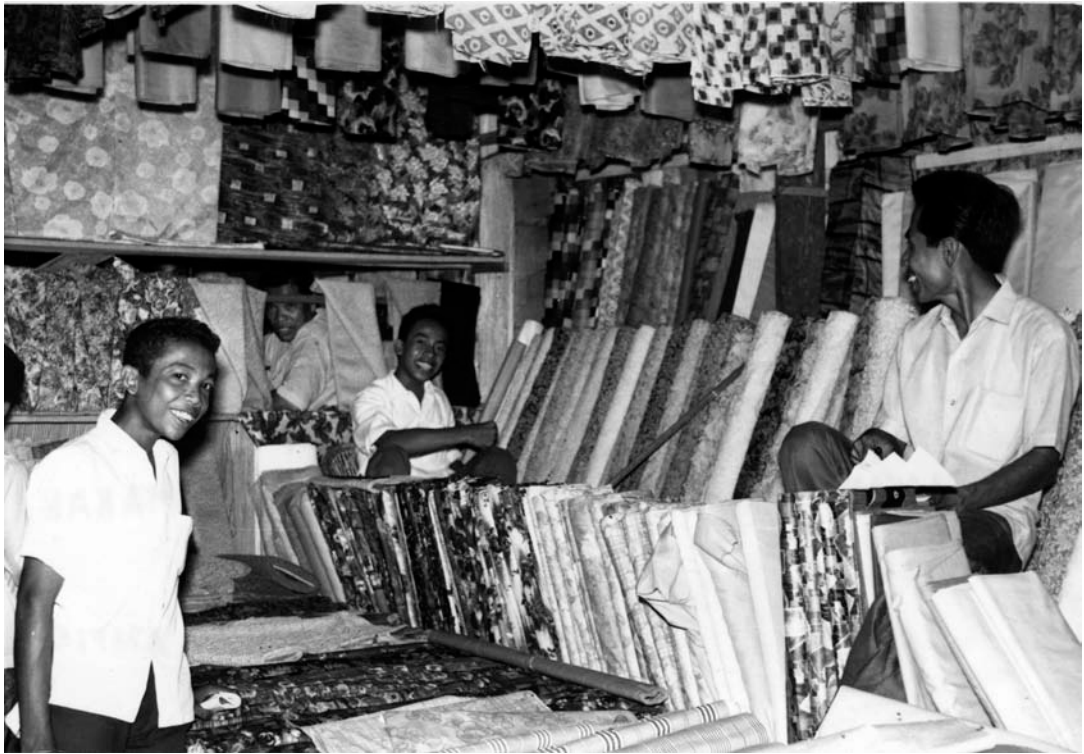
ANRI: Kabinet Presiden 1950-1959 No.693



Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 183 tahun 1954 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kota Makassar mengenai Pemungutan Pajak Ijin Rumah Kopi dalam Daerah Kota Makassar tanggal 17 Desember 1953 No. 38/DPRD.

22 September 1954

ANRI: Sekretaris Kabinet, Keppres 1074



Suasana pasar tekstil di Makassar, Sulawesi Selatan
26 November 1965.

ANRI: Kempen, 65-14911



Suasana pasar tradisional di Makassar, Sulawesi Selatan
26 November 1965
[ANRI: Kempen, 1-24-1](#)

Surat dari Kepala Perwakilan Departemen Perdagangan Dalam Negeri/Urusan Perdagangan Luar Negeri Provinsi Sulawesi Selatan kepada Menteri Perdagangan dan Koperasi mengenai jenis barang yang dapat diimpor dalam rangka bonus ekspor daerah.

13 Juli 1966

[ANRI: Ekonomi Keuangan dan Pembangunan No. 422](#)

PERHUBUNGAN



Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan sebagai salah satu tempat singgah pelayaran/perdagangan yang cukup ramai di Indonesia Bagian Timur.

[± 1930]

ANRI: KIT, 55/17



Kerbau selain digunakan sebagai alat pertanian juga digunakan sebagai salah satu alat transportasi di Makassar, Sulawesi Selatan

[± 1930]

ANRI: KIT, 674/78



Kapal Motor "Bango" sebagai salah satu alat transportasi laut
di Makassar, Sulawesi Selatan.

11 Desember 1952.

ANRI: Djapen Sulawesi, M.7876



Pemandangan di Pelabuhan Makassar dengan perahu layar
yang akan memuat rotan,
12 Agustus 1953
[ANRI: Kempen, 530812 RR 5](#)



Lalu lintas di Kota Makassar dan beca sebagai salah satu alat transportasi yang murah,
8 Oktober 1953.

ANRI: Kempen, K531008 RR 3-3



Perahu–perahu Layar Bugis sebagai salah satu alat transportasi sedang berlayar di sekitar Pelabuhan Palopo, Sulawesi Selatan.

11 Oktober 1953

ANRI: Kempen, 531011 RR 3



Sepeda merupakan salah satu alat transportasi yang
menyehatkan dan sudah mulai dimanfaatkan masyarakat
di Makasar, Sulawesi Selatan
26 November 1953.

ANRI: Kempen, K 531126 RR 1-9

UNDANG-UNDUNG No. 63 TAHUN 1954
ANGGARAN BELAKANG DARI PELABUHAN MAKASSAR DARI TAHUN-TAHUN 1952 DAN 1953.

Terdah rupiah dilanjutnya

Muti- ra	Keterangan	T A H U N		Pa- sai	Keterangan	T A H U N	
		1952	1953			1952	1953
	PERKULIAHAN.				PERKULIAHAN.		
	Persewaan, pembebasan, pengalihan dan pemeliharaan yang tidak termasuk pendapatan untuk perbekalan dasar			4	Persewaan dari Segari sebagai tambahan dan lain-lain untuk perbekalan, pembebasan, pengalihan dan pemeliharaan yang tidak termasuk pendapatan untuk perbekalan dasar	1 250 000	3 500 000
a	Persewaan dasar laut lepas						
b	Pemukatan dan sekuritas baru	1 850 000	3 500 000	5	Pemukatan dari Segari sebagai tambahan dan lain-lain untuk perbekalan, pembebasan dan pemeliharaan yang tidak termasuk pendapatan untuk perbekalan dasar		
		1 850 000	3 500 000				
	Dijualnya harga persediaan-persediaan perusahaan pada akhir tahun-tahunnya yang memiliki harga persediaan-persediaan pada awal tahun itu			6	Dijualnya harga persediaan-persediaan perusahaan pada awal tahun-tahunnya yang memiliki harga persediaan-persediaan pada akhir tahun itu		
	Pemukatan kepada Segari sebagai tambahan dari harga persediaan-persediaan perusahaan pada permulaan tahun-tahunnya dari pada harga persediaan-persediaan perusahaan pada akhir tahun itu						
	Dijualnya	1 850 000	3 500 000		Dijualnya	1 850 000	3 500 000

Undang-Undang Nomor 63 tahun 1954 tentang Penetapan Bagian *Indische Bedrijven Wet* (IBW/Peraturan Perusahaan Indonesia) Pelabuhan Makassar dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1952 dan 1953.

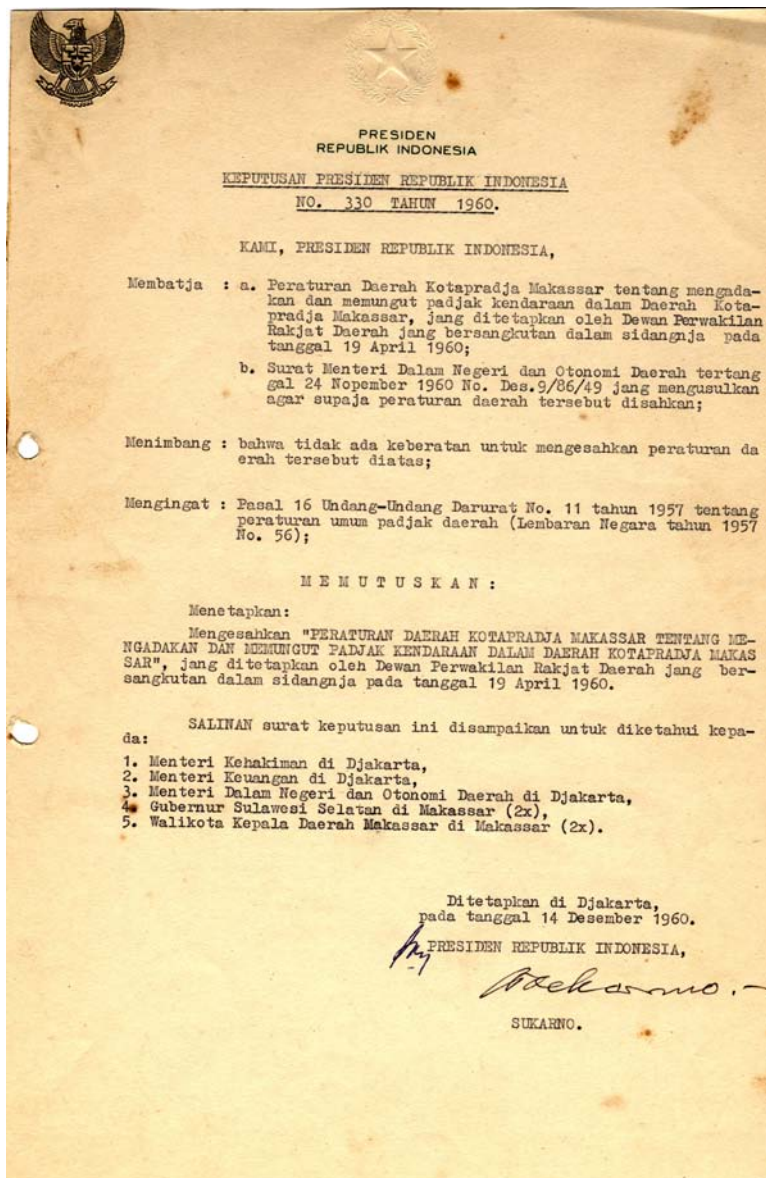
29 November 1954

ANRI: Sekretaris Kabinet, Undang-Undang No. 156

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 328 Tahun 1960
tentang Pengesahan Peraturan Daerah Tk. II Bone Mengenai
Pemungutan Pajak Sepeda, yang Ditetapkan oleh Bupati Kepala
Daerah yang Bersangkutan Pada Tanggal 14 Juli 1960.

14 Desember 1960

ANRI: Sekretaris Kabinet, Keppres No. 1962



Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 330 tahun 1960
tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotapraja Makassar
mengenai Pengadaan dan Pemungutan Pajak Kendaraan dalam
Daerah Kotapraja Makassar.

14 Desember 1960

ANRI: Sekretaris Kabinet, Keppres No. 1964

PERTANIAN dan PERKEBUNAN



Menyadap karet di Malili, Sulawesi Selatan

[± 1930]

ANRI: KIT, 650/71



Pembuatan garam di Sulawesi Selatan
[± 1930]
ANRI: KIT, 522/58

Pembangunan irigasi di Sungai Sadang, Sulawesi Selatan.
[± 1940]
ANRI: KIT, 556/48

Persawahan di sepanjang jalan antara Makale – Rantepao,
Tana Toraja, Sulawesi Selatan,
1949.

ANRI: KIT, 932/84



Penangkapan ikan dengan jala di Danau Tempe,
Sulawesi Selatan

[± 1950]

ANRI: RVD, 80519 RR 28



Pintu air di Sungai Sadang, Sulawesi Selatan
18 Juli 1951
ANRI: Kempen, 515012

DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
 KEMENTERIAN PERTANIAN
 WATUBARA, SULAWESI SELATAN
 12 JULI 1966
 NO. EKON.12/18/20
 4390/16

PENGUMPUAN PELAKSANAAN TUGAS PENGUMPULAN PANGAN PEMERINTAH TAHUN 1966
 QUEBENUR KEPALA PROVINSI SULAWESI SELATAN SELAKU KOMANDO KOLONDA

MEMORANDUM

1. Peraturan Pemerintah dalam hal ini **DEKRI BAHAN MAKANAN No.001/1966** tgl. 3-1-1966 tentang Pengawasan sebagian Protokol Bahan Pangan oleh Pemerintah;
2. Surat Keputusan **KEKUP Pertanian dan Agraria No.263/Kompag/1965**, tgl. 23-11-1965 tentang pembentukan EPJ yang tugas operasionalnya dibawakan Kepala Gubernur Kepala Propinsi;
3. Ketentuan tentang **KOPERJA**, yang selaku salah satu sekopora Revolusi harus diberi bimbingan hidup sehat keseharian;
4. Instruksi Ketua **DEKRI BAHAN MAKANAN No.001/Instr/1966**, tgl. 3-1-1966 tentang penetapan target untuk tiap2 Propinsi;
5. Penilaian **KOLONDA** dalam seputarnya tgl. 18-7-1966 atas evaluasi terhadap kegiatan **KOPERJA**, EPJ, OPS BULIR dan **PROKITA** dan kerabat yang di berikan oleh Akuntan Negara selaku Penerimaan Pemerintah kepedanja.

MEMORANDUM
 Bahwa menghadapi **pasca-raja** j.a.a.4. perlu segera diadakan rehabilitasi dalam aktivitas pengumpulan pangan Pemerintah, guna mempertinggi intensitas pembelian dan meminimalkan angka halai yang tidak di-lindungi.

REKOMENDASI

Dengan menjabat Instruksi Gubernur Kepala Propinsi Sulaw. 2/8/63, tgl. 16-5-1966, dan Instruksi Penjeputan No.KEKOR.2/9/50, tgl. 2-6-1966.

MEMORANDUM

PUCUKAN :

1. Dengan ditantu oleh unsur2 Panitia-Tunggal Kabupaten, Bupati Kepala Daerah sebagai Komando Operasi Pengumpulan Pangan Pemerintah, dalam arti sebagai seluruh fungsi2 Command (i.e. supervisi dan kontrol) seluruh titik sampai keakhir2 terkecil terhadap semua unsur2 pelaksanaan pembelian Pangan Pemerintah, dan penetapan target tentang hari maksimum sampai dari tiap2 titik tersebut, tiap2 Des. sampai kepada petani j.a. untuk dibali oleh Pemerintah.
2. Untuk keperluan ini, maka EPUP, EPJ, KOPERJA setempat, OPS PERMANTAN dengan anggawabaja, dengan unsur Pemerintah lainnya ditempatkan dibawah Komando dan Supervisi Bupati Kepala Daerah selaku operasional.
3. Dalam tugas2 ini, EPUP ditetapkan sebagai Instansi yang menerima hasil pembelian, EPJ (dengan OPS BULIR di-integrasikan kedalamnya) sebagai Pengolah/processing, sedang yang lainnya sebagai Pelaksana Operasi. Pembelian dari kaum petani dan pasar terminal, yang untuk keperluan ini setelah ditutup kontrak terlewat dahulu, EPUP dapat memberikan panjar operasi sebesar 20%, menurut pertimbangan dijumlahkan/borg yang ada. Penjabaran Gash & Curry lebih ditanyakan dan tidak memerlukan kontrak.

Dalam kedudukan Kepala Tjibang EPUP selaku Pemeliharaan, maka operasi selanjut mungkin harus diberikan atas dasar konfiditas (commercial) dalam arti kata Bupati/Komando harus benar2 menggunakan agar **pengalir selaku dengan dijumlahkan/borg**, minimal untuk Instansi Pemerintah yang terpacu dipikirkan (jika memungkinkan), harus ditinjau oleh KAS Pemerintah Daerah/Kabupaten. Tjibang kontrak ditetapkan maksimal 100-ton/bulan atau 200-ton/padi. Pelaksanaan pembelian padi dari petani tidak dipertimbangkan sampai kemungkinan dari para petani (petani harus menerima harga palija penuh), maupun dari EPUP. Kepadanja diberikan bimbingan pengumpulan sebesar 20%.

Dalam kedudukan Bupati Kepala Daerah selaku Komando Pangan yang bertanggung-jawab penuh, maka di-lindungi seanehng kabilakomandan2 operasional atas dasar konfiditas daerah yang ada, untuk mengedukasi target pengumpulan pangan Pemerintah ini.

4. Penjabaran hasil pembelian, baik padi maupun beras harus langsung ke-**Quabang EPUP** guna mengijab sebagai titik kesong (distinjilir selanjut). Kontrol penerimaan di-Quabang EPUP tersebut harus terdiri dari anggota EPUP, Djwa, Pertanian dan EPJ.

Pemerintah

- 2 -

Penjabaran physis langsung ke-**Quabang EPJ** harus disertai dengan kontrak gilas; yang hasil beranjan harus segera diserahkan ke-**Quabang EPUP**. EPJ harus sesuai ketentuan untuk mengiriskan laporan PI a/d. PV tiap 10 hari ke-EPUP sebagai proses report dan pertanggung-jawaba.

5. Karena EPUP beroperasi selaku komersial dalam pembelian padi/beras ini, maka dengan mempertimbangan segala situasi yang ada (taktik pembelian dengan tidak mengabaikan harga), EPUP dipertimbangkan sebagai kontrak dengan **gila** yang mengura dan konfiditas dalam rangka pembelian yang simultan dan ber-**PP** (dalam rangka mendobrak limited ability dari tiap unsur pelaksanaan). Hal ini untuk menjamin, bahwa seluruh unit marketable supply dapat tertampung dalam masa sebelum pet.lekik datang, supaya benar2 terjual, bahwa Pemerintah sudah mempunyai iron stock yang dipertimbangkan untuk menjamin seluruh peserta 77-10, stock nasional dan stabilisasi harga pangan.
6. Pembelian pangan lebih ditukarkan kepada padi daripada beras, karena dipertimbangkan harga padi ditetapkan lebih mahal seperiuna daripada harga ekuivalent beras, padahal ditetapkan harga maksimum sebagai leader price. Dengan demikian, diharapkan maksimalis para petani akan menjual pedija menurut target masing2 yang telah ditetapkan dengan tidak mengimani rugi, sedang pembelian simultan pada masa pangan dapat lebih terjamin.
7. Penetapan harga setempat dilakukan oleh Panitia-Tunggal bersama KOPERJA, sebagai wakil petani, EPUP selaku mawarab, agar tertajap suatu persamaan harga yang objektif dengan mematuhi prinsip kompetisi harga seperiuna eq. sedikit lebih tinggi dari harga pasar.
8. Beras/padi **BAKKA** juga masuk dalam antara pembelian, untuk menbantu target Propinsi sedang harga2 (i.e. kretek) harus lebih rendah daripada dijenis lainnya, menurut situasi pasaran setempat.
9. Pembelian dijenis2 pangan lainnya (dijagung, sagu dan arbohpratan yang lain) yang ditanyakan untuk substitution approach terutama dijenis pet.lekik guna menakan demand terhadap beras, akan dilakukan seperiuna selanjut insiditil.
10. Kepada unsur2 pelaksana tersebut diatas (EPUP, EPJ, KOPERJA, OPS-Perantara dll.), supaya menyesuaikan segala rencana dan aksija sesuai dengan isi akudul ketentuan2 tersebut diatas dan segera memberikan perintah2 pelaksanaannya kepada Tjibang/Perakliannya dari tingkat Kabupaten sampai ke-Desa guna mengatur segala peritapannya sedajab mungkin serta melakukan supervisi dan kontrol organik/teknis terhadap semua Tjibang/Perakliannya tersebut, sehingga sesuai dengan taktik operasional yang telah digambarkan oleh Gubernur dan Bupati/Komando pangan setempat.
11. Tiap2 Kabupaten ditugaskan untuk ikut dalam pembelian, minimal untuk keperluan selingan 77-10 dalam Kabupaten tersebut guna keperluan a bukan selaku pet.lekik. Untuk ini supaya segera berhubungan dengan EPUP guna di-lak lebih lanjut.

KEMERINTAH ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya, dan apabila kemudian teraja2 terdapat kekeliruan, akan ditinjau perubahan/perbaikan seperiuna.

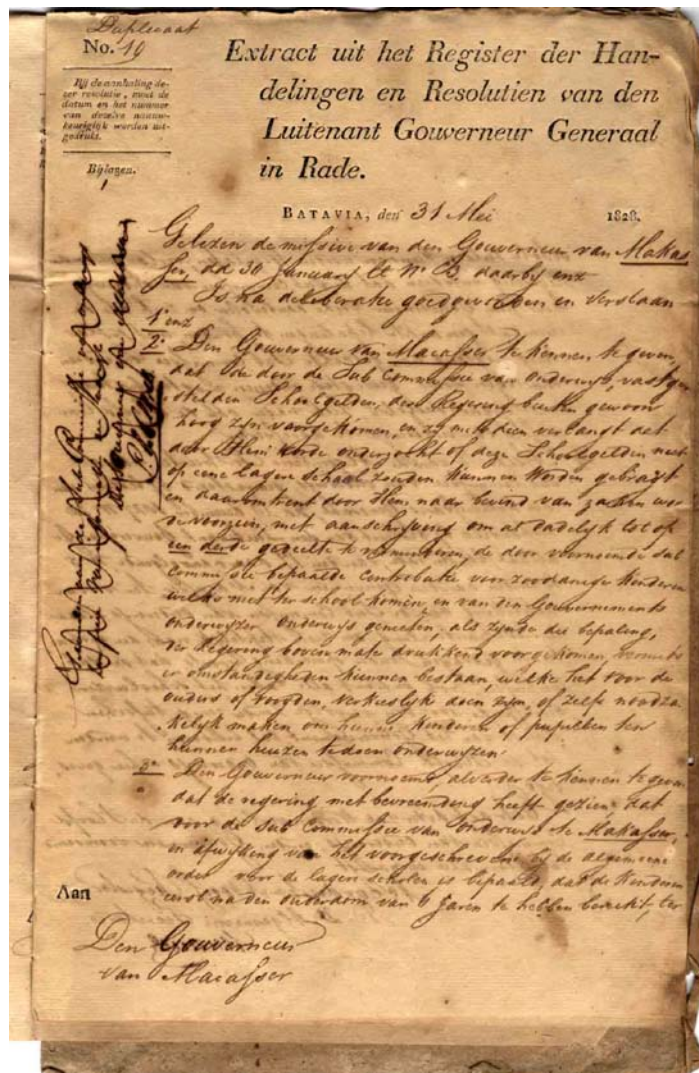
Kepada: Jb. INTYANI MALINDU Jb., Ditetapkan di-**M a k a s s a r**.
 Pada tanggal 12 - JULI - 1966.

1. **WAKIL GUBERNUR**
 2. **KOMANDO LOGISTIK NASIONAL**
 3. **KEMENTERIAN DALAM NEGERI**
 4. **KEMENTERIAN PERTANIAN**
 5. **KEMENTERIAN PERUMAHAN**
 6. **DIREKSI EPUP-PURAT**
 7. **KOORDINATOR PERTANIAN-IT**
 8. **PELAKSANA SULAWESI**
 9. **AREA TUGAS SULAWESI**
 10. **D.P.R.D. SULAWESI SELATAN**
 11. **D.B.I. UNIT I dan II**
 12. **PANITIA TUGAS SULAWESI**
 13. **KEPALA STAF KOLONDA SULAWESI**
 14. **A B S I P.**

Instruksi Gubernur /Kepala Provinsi Sulawesi Selatan selaku Komandan Komando Logistik Daerah (Kologda) Nomor EKON.12/18/20 mengenai penyempurnaan pelaksanaan pengumpulan pangan pemerintah tahun 1966.
 21 Juli 1966
 ANRI: Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan 648

Bagian awal Surat dari Menteri Pertanian kepada Gubernur/
Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengenai integrasi
Inspektorat Perkebunan Besar Daerah dan
Dinas Perkebunan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan.
17 Februari 1973
[ANRI: Kementerian Pertanian No. 238](#)

PENDIDIKAN



Bagian awal Surat dari Kepala Misi Pengajaran kepada Gubernur Makassar tentang dasar-dasar ketertiban di Makassar.

31 Mei 1828

ANRI: Makassar 458.a

Pemberian ijazah kepada peserta Kursus Pemberantasan
Buta Huruf yang telah lulus di Lembaga Pemasyarakatan
Kota Makassar, Sulawesi Selatan
23 November 1951.

[ANRI: Kempen, 511123 RR 3](#)



Presiden Soekarno berbincang dengan murid-murid Sekolah Rakyat dalam rangka kunjungan kerja Presiden ke Bone, Sulawesi Selatan
9 Oktober 1953.

ANRI: [Kempen, 531009 RR 64](#)

Presiden Soekarno dengan para Mahasiswa Fakultas Ekonomi
Universitas Hasanuddin di Makassar, Sulawesi Selatan,
7 November 1953.

[ANRI: Kempen, 531007 RR 7](#)



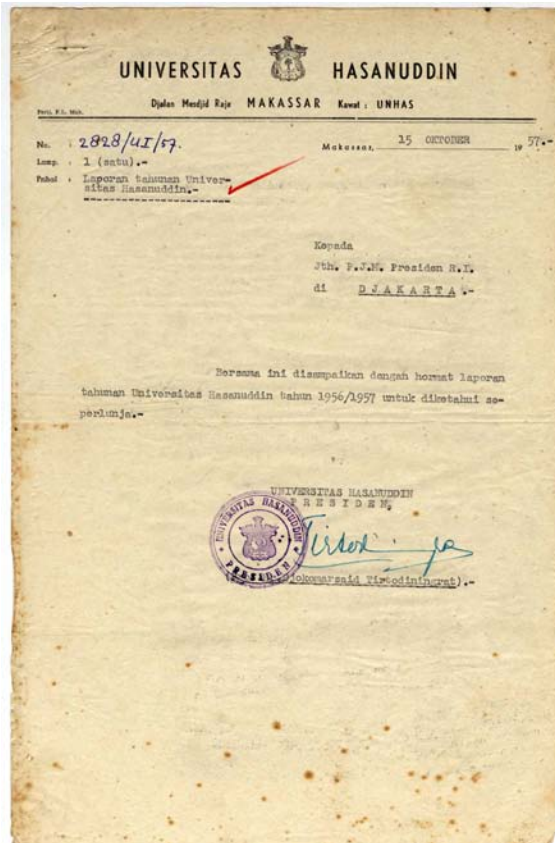
Wakil Presiden Mohammad Hatta tiba di Makassar dalam rangka
menghadiri Pembukaan Fakultas Kedokteran Universitas
Hasanuddin di Makassar, Sulawesi Selatan

10 September 1956

[ANRI: Kempen, M. 12851](#)



Wakil Presiden Mohammad Hatta ketika menghadiri Pembukaan
Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin di Makassar,
Sulawesi Selatan
11 September 1956
[ANRI: Djapen Sulawesi, M 12867](#)



- 8 -

Hadirin jang Mulia,

Mengenai keadaan gedung2, walaupun masih kurang, dapat dikatakan tjukup memuaskan, berkat kerja-sama jang erat dengan Kementerian P.P. dan K., dan Pemerintah Daerah jang senantiasa siap membantu kami mengenai kebutuhan2. Djika para hadirin melihat2 di Baraja ini, kiranya merasa heran dengan apa jang telah dibangun dalam waktu jang singkat. Dimana dahulu didjumpai rawa jang sangat luas, lambat laun berdiri sebuah kampung Universitas dengan gedung2nja dan rumah2 kediaman.

Kami merasa bangga dengan adanya gedung Fakultas Hukum jang bertingkat dua dengan ruangan2 kuliah dan lain ruangan jang tjukup luas dan jang beberapa hari jang lalu telah diremikan. Gedung2 Fakultas Kedokteran kian hari kian bertambah. Dalam banjak hal kita tidak sia2 minta bantuan dari Gubernur SST karena beliau benar2 mengerti makna sebuah Universitas bagi sesuatu Daerah. Dalam hal ini dibantu pula oleh Pemerintah Kota Besar Makassar, bantuan jang sangat kami hargai.

Disamping gedung2 kuliah dan laboratoria sudah banjak dibangun rumah2 tinggal bagi dosen2 jang menetap, dan pegawai.

Djika ditarik kesimpulan dari laporan kami diatas, maka akan berbunyi sebagai berikut:

1. tenaga dosen sangat kurang,
2. djumlah pegawai sangat kurang,
3. djumlah mahasiswa kian hari kian bertambah,
4. demikian halnya dengan gedung2, walaupun masih kurang.

Gambaran ini tidak mengotjewankan dan kita semua dapat berkerja sebagaimana diharapkan dari kita semuanya.

Hadirin jang Mulia,

Pada akhirnya sepetah kata dua kepada Mahasiswa jang baru saja meninggalkan sekolah landjutan dan telah mendaftarkan diri pada Universitas kita.

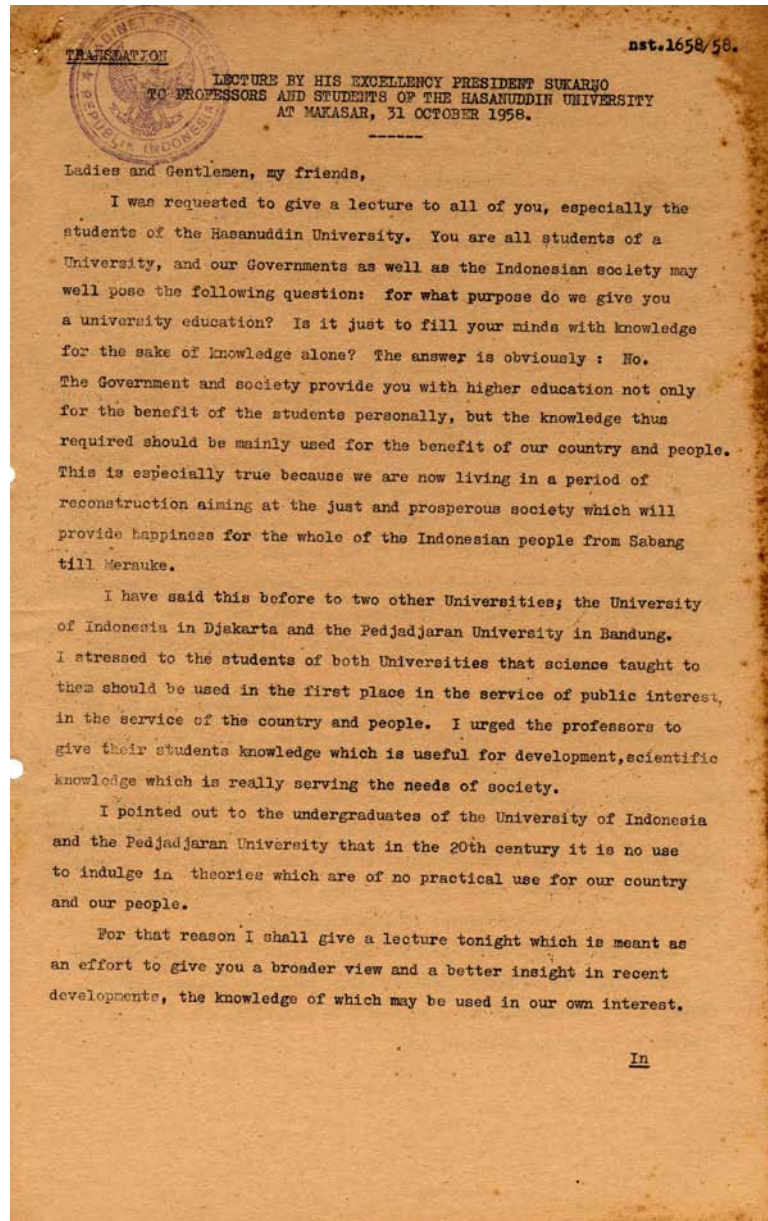
Saudara2 Mahasiswa,

Dari Sdr2 diharapkan, dimana Pemerintah sudah memberikan kesempatan untuk beladjar pada Perguruan Tinggi, kesempatan itu dipergunakan se-baik2nja, salah dengan beladjar jang sungguh2. Pula kiranya tidak berkelabihan, djika kami mengingatkan akan perbedaan antara tjara beladjar pada sekolah menengah dengan tjara beladjar pada Perguruan Tinggi. Disekolah landjutan siswa menerima pelajaran dari bapak guru sebagai menerima sesuatu

jang benar

Surat dari Prof. Mr. Djokomarsaid Tirtodiningrat (Presiden Universitas Hasanuddin) kepada Presiden Republik Indonesia mengenai Laporan Tahunan Universitas Hasanuddin, 15 Oktober 1957

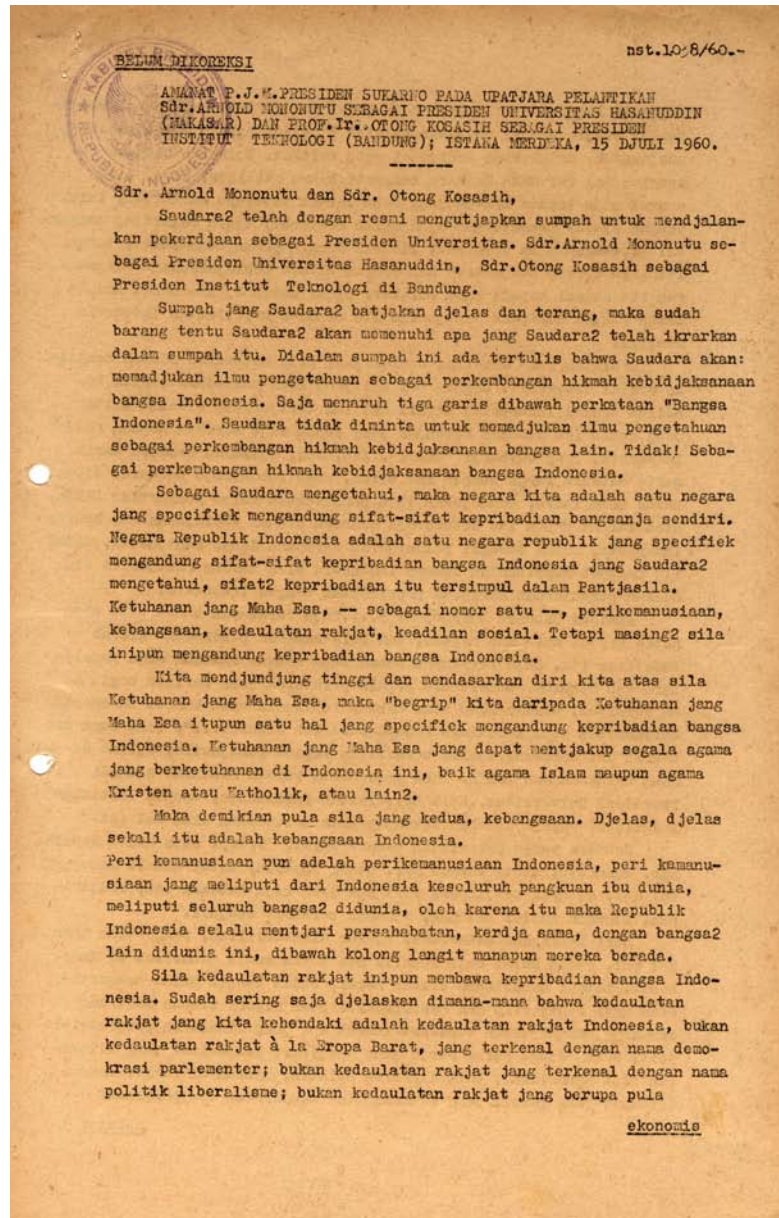
ANRI: Kabinet Presiden 1950-1959 No.1233



Bagian awal dari Kuliah Umum yang disampaikan oleh Presiden Soekarno di depan dosen dan mahasiswa Universitas Hasanuddin di Makassar, Sulawesi Selatan, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris.

31 Oktober 1958

ANRI: Kabinet Presiden 1950-1959 No.929



Bagian awal Amanat Presiden Soekarno pada upacara pelantikan Arnold Mononutu sebagai Presiden Universitas Hasanuddin dan Ir. Otong Kosasih sebagai Presiden Institut Teknologi Bandung.

15 Juli 1960

ANRI : Pidato Presiden Soekarno No. 197

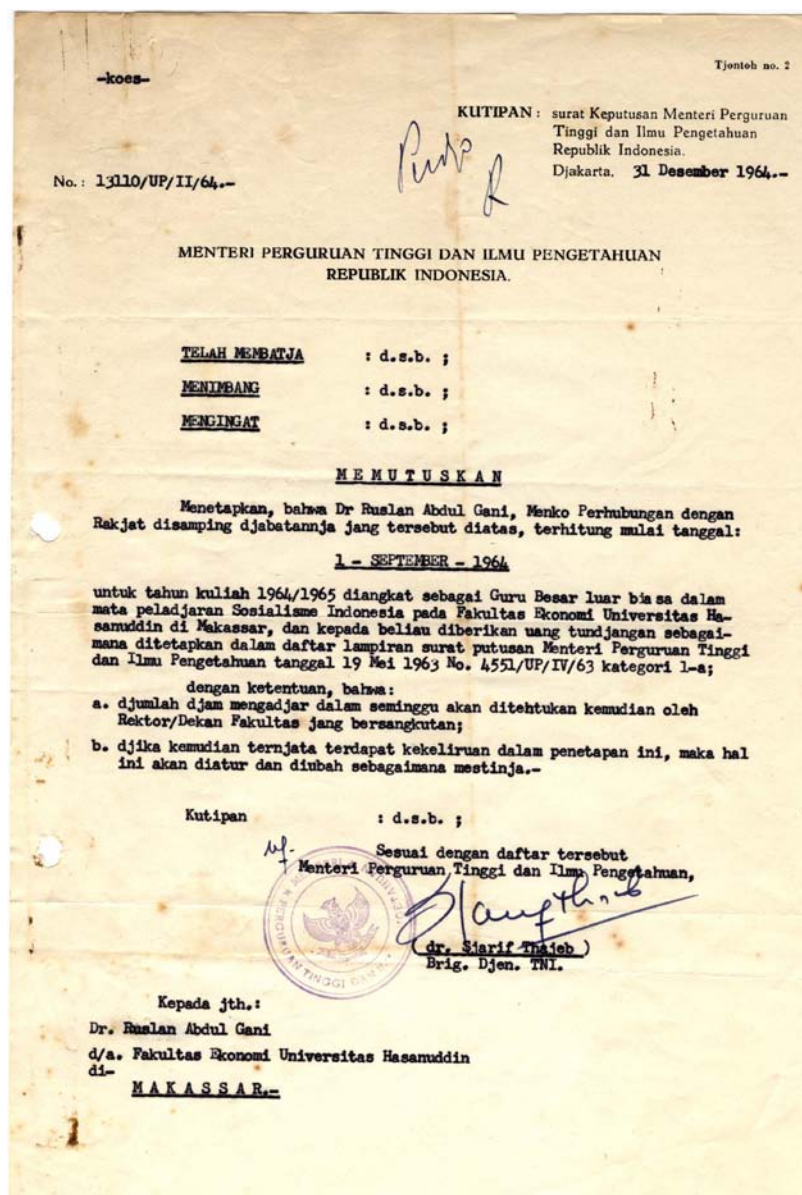
Panglima Operasi Mandala Mayor Jenderal Soeharto sedang menandatangani Naskah Peresmian Universitas Muslimin di Makassar, Sulawesi Selatan, 10 November 1962.
[ANRI: Deppen RI, 62-7336.](#)

Upacara Pemberian gelar *Doctor Honoris Causa*
dalam Bidang Ilmu Politik Khusus Hubungan Antar Negara
kepada Presiden Soekarno oleh Universitas Hasanuddin
di Makassar,
29 April 1963.

ANRI: Djapen Prop Sulselra, M. 16947

Saat menerima gelar *Doctor Honoris Causa* dalam Bidang Ilmu Politik Khusus Hubungan Antar Negara dari Universitas Hasanuddin di Makassar. Panglima Operasi Mandala Mayor Jenderal Soeharno sedang memberikan ucapan selamat kepada Presiden Soekarno 29 April 1963.
ANRI: Djapen Prop Sulselra, M. 16950.

Bagian awal dari Pidato Presiden Soekarno pada Upacara
Pemberian gelar *Doctor Honoris Causa* dalam Bidang Ilmu Politik
Khusus Hubungan Antar Negara kepada Presiden Soekarno
oleh Universitas Hasanuddin di Makassar,
29 April 1963
[ANRI: Pidato Presiden 1950-1959 No.485](#)



Kutipan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Republik Indonesia Nomor 13110/UP/II/64 tentang Pengangkatan Dr. Ruslan Abdul Gani (Menko Perhubungan dengan Rakyat) sebagai Guru Besar Luar Biasa dalam mata pelajaran Sosialisme Indonesia pada Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.

31 Desember 1964

ANRI: Roeslan Abdul Gani No. 1372



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN
Nomor : 745/V/1986

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN

- Menimbang :
- bahwa setelah diadakan penyerahan tanggung jawab - serta wewenang pelaksanaan pembangunan gedung Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas di Sulawesi Selatan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kepada Departemen Pekerjaan Umum belum berjalan secara lancar sebagaimana yang diharapkan, maka perlu dilakukan koordinasi secara mantap agar pelaksanaan proyek di lapangan dapat berjalan lancar.
 - bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan proyek sangat kompleks dan berbeda-beda antar Dati II maka perlu penanganan secara terpadu dan terkoordinasi.
 - bahwa berhubung hal-hal tersebut diatas dipandang perlu membentuk tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Gedung Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas di Propinsi Dati I Sulawesi Selatan.

- Mengingat :
- Undang-undang No.5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (LN. tahun 1974 No.38, TLN. No.3037);
 - Undang-undang No.1 tahun 1986 tentang Anggaran Pembangunan Belanja Negara;
 - Keputusan Presiden No.29 tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pembangunan Belanja Negara;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri No.9 tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah;
 - Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Pekerjaan Umum No.0253/M/1985 dan 298/KPTS/1985 tanggal 6 Juni 1985;
 - Keputusan Bersama Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud dan Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum No.117/C/Kep/R 85 tanggal 19 Juni 1985, 109/KPTS/CK/1985.

Memperhatikan: Hasil rapat konsultasi antara Gubernur KDH Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Kepala Kanwil Depdikbud-Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 27 Mei 1986 bertempat di Gubernuran Ujung Pandang.

MEMUTUSKAN

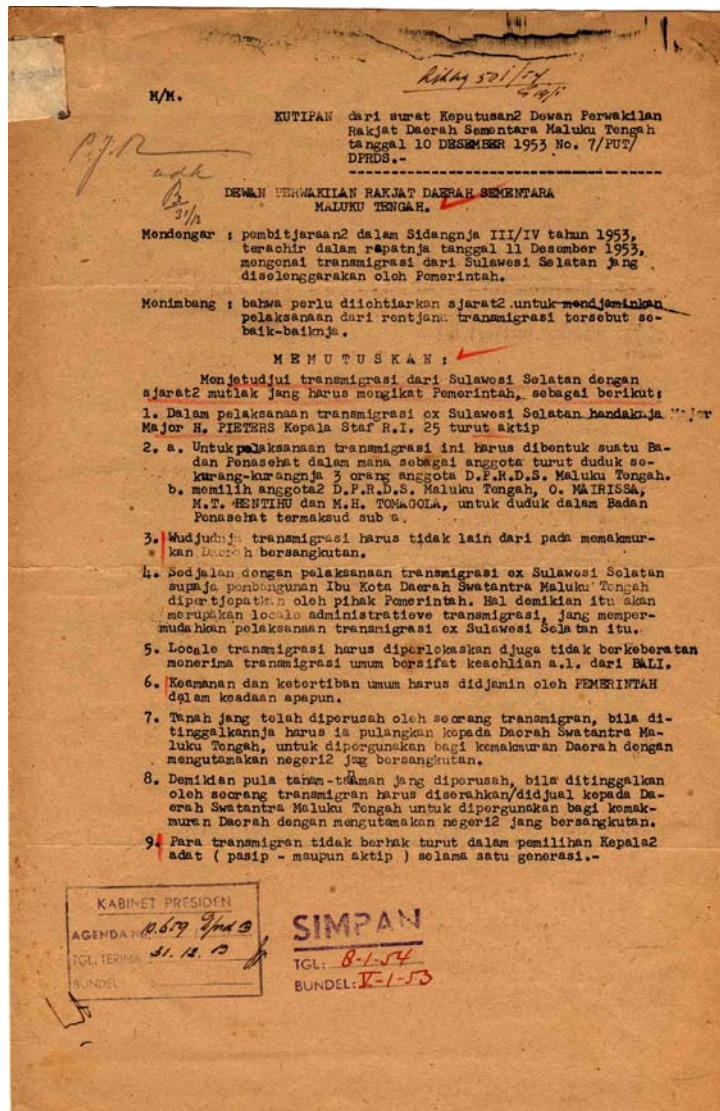
1881/W/Don/B-6

Bagian awal Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 745/V/1986 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Gedung Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas di Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.

31 Mei 1986

ANRI: Sekretariat Wakil Presiden Umar Wirahadikusuma No. 446


LINGKUNGAN HIDUP dan KEPENDUDUKAN



Kutipan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Maluku Tengah No.7/PUT/DPRDS mengenai transmigrasi dari Sulawesi Selatan.

10 Desember 1953

ANRI: Kabinet Presiden 1950-1959 No. 2256



Jakarta, 29 Desember 1986.

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 644/Menhut -II/86
Lampiran :
Perihal : Pengelolaan Hutan
Borisallo, Goa,
Sulawesi Selatan.

Kepada Yth. :
Sdr. MENTERI DALAM NEGERI
DI
J A K A R T A.

Sehubungan dengan surat Sdr. Menteri Perindustrian tanggal 26 Februari 1986 No.210/M/2/1986 yang ditunjukkan kepada kami dan tembusannya disampaikan kepada Saudara perihal seperti tersebut pada pokok surat diatas maka dengan ini kami sampaikan bahwa kami sangat menghargai dan menyetujui saran Saudara Menteri Perindustrian untuk menyerahkan areal hutan Borisallo kepada Departemen Kehutanan untuk dikelola lebih lanjut sebagai kawasan Hutan Tanaman Industri.

Kami telah menunjuk PT. Inhutani I untuk melaksanakan pembangunan Hutan Tanaman Industri di daerah tersebut, sehingga harapan dari Departemen Perindustrian untuk dapat memenuhi kebutuhan kayu bagi PT. Kertas Gowa pada dewasa ini maupun perluasannya dimasa yang akan datang dapat terlaksana / tercukupi.

Sesuai dengan penjelasan Direktur Jenderal Agraria dalam Rapat Team POKJA I Dewan Gula Indonesia pada bulan September 1986, bahwa areal Hak Pengusahaan Tanah kompleks Borisallo seluas 24.100 ha yang di berikan kepada Departemen Perindustrian dan Pertambangan oleh Menteri Pertanian dan Agraria melalui Surat Keputusan No. 45/ka/64 tanggal 9 Mei 1984 telah didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Tanah Makassar menurut ketentuan PP 10 tahun 1981.

Mengingat hal tersebut maka prosedur penyerahan tanah kompleks Borisallo untuk dijadikan kawasan hutan perlu dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, dalam hal ini tunduk pada ketentuan UUPA No. 5 tahun 1960. Apabila Surat Menteri Perindustrian tanggal 26 Februari 1986 No. 210/M/2/1986 tersebut diatas dapat dianggap sebagai penyerahan kembali hak Pengusahaan kepada Departemen Dalam Negeri, maka selanjutnya kami harapkan agar Saudara Menteri Dalam Negeri dapat menyetujui perubahan status tanah tersebut menjadi kawasan hutan.

Dalam rangka perubahan status tanah dari kawasan budidaya menjadi kawasan hutan serta pemenuhan tanah untuk Proyek Gula Takalar, Team POKJA I Dewan Gula Indonesia (yang diketuai oleh Dirjen Agraria) mensepakati langkah-langkah sebagai berikut :

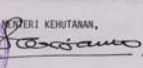
- a. Team Daerah yang dibentuk dengan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan tetap bekerja untuk memperoleh areal hutan Fabrik Gula Takalar seluas 2.190 ha di kompleks Borisallo, termasuk yang sudah dikuasai seluas 940 ha.
- b. Areal yang telah jadi kampung atau telah ada pemukiman akan dikeluarkan dari kompleks Borisallo.
- c. Sisa areal

- 2 -

c. Sisa areal kompleks Borisallo setelah memperhatikan butir a dan b, dijadikan kawasan hutan untuk dikelola sebagai areal Hutan Tanaman Industri.

Mengingat kontinuitas pengadaan kayu untuk pabrik kertas Gowa harus terjamin antara lain dengan segera diwujudkan unit Hutan Tanaman Industri, maka persetujuan Saudara Menteri Dalam Negeri tentang pelepasan status tanah kompleks Borisallo untuk dijadikan kawasan hutan dan proses pelaksanaannya dapat kiranya diberikan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


MENTERI KEHUTANAN,
SUTEDJO

D I J A K A R T A.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bapak Presiden RI (sebagai laporan) di Jakarta. -
2. Bapak Wakil Presiden RI di Jakarta.
3. Sdr. Menteri Koordinator Bidang EKUIN di Jakarta.
4. Sdr. Menteri Perindustrian di Jakarta.
5. Sdr. Direktur Jenderal Agraria di Jakarta.
6. Sdr. Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan di Jakarta.
7. Sdr. Direktur Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi lahan di Jakarta.
8. Sdr. Kepala Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan di Jakarta.
9. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan di Ujungpandang.
10. Sdr. Ketua Satdal Pembangunan Hutan Tanaman Industri di Jakarta.
11. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan di Ujungpandang.
12. Sdr. Direktur PT. Kertas Gowa di Ujungpandang.

Surat dari Menteri Kehutanan kepada Menteri Dalam Negeri mengenai pengelolaan hutan Borisallo, Goa, Sulawesi Selatan.
29 Desember 1986
ANRI: Sekretariat Wakil Presiden Umar Wirahadikusuma No. 390

KEAGAMAAN



Salah satu masjid di Makassar, Sulawesi Selatan.

[± 1930]

ANRI: KIT, 808/37



Salah satu gereja di Makassar, Sulawesi Selatan
[± 1930]
ANRI: KIT, 757/41



Gereja Katolik di Makassar, Sulawesi Selatan.

[± 1930]

ANRI: KIT, 809/42



Kelenteng Cina di Makassar,
Sulawesi Selatan.

[± 1930]

ANRI: KIT, 792/3



Masyarakat Makassar melaksanakan Sholat Idul Fitri
di Lapangan Karebosi, Makassar
13 Juni 1953.

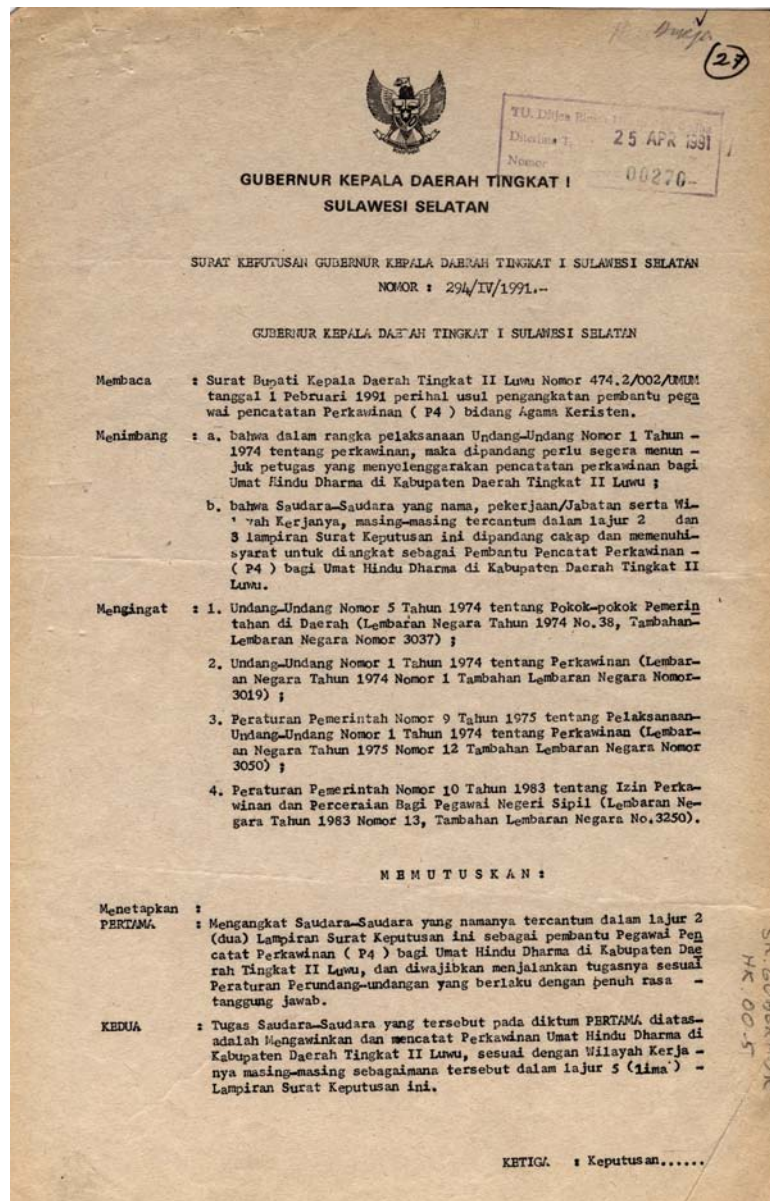
ANRI: Djapen Prosul, M.8559



Pemandangan di depan Masjid Raya Kota Makassar,
26 November 1954.

ANRI: Kempen, 531126 RR 4

Surat dari I Gusti Made Ngurah (Pembimbing Masyarakat Hindu dan Budha) Kantor Wilayah Departemen Agama Sulawesi Selatan kepada Dirjen Bimas Hindu dan Budha mengenai *pensudhian* (pernyataan masuk agama Hindu),
5 Oktober 1988
ANRI: Departemen Agama No. 156



Bagian awal Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 249/IV/1991 tentang Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) bagi Umat Hindu Dharma di Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu, Sulawesi Selatan.

10 April 1991

ANRI: Departemen Agama No. 047

KEBUDAYAAN dan PARIWISATA



Profil laki-laki Mandar dengan pakaian adat,
5 Desember 1948.

[ANRI: Kempen, 81205 RR 14](#)



Profil Masyarakat Adat dari Goa, Makassar dengan pakaian adat membawa barang perhiasan Sultan Goa.

16 Desember 1948.

[ANRI: Kempen, 81216 RR 9](#)

Surat dari Direktur Pendidikan dan Pengajaran kepada Gubernur
Jenderal Hindia Belanda tentang restorasi Benteng Rotterdam
di Makassar, Sulawesi Selatan.

25 Februari 1927

[ANRI: Algemene Secretarie No. 732](#)



Sekelompok lelaki Makassar memainkan alat musik gantang (*tromels*), kecap dua senar dan gong, Sulawesi Selatan.
[± 1940]

ANRI: KIT, 909/53



Upacara seremonial pemakaman raja dari Goa,
Sulawesi Selatan.

[± 1940]

ANRI: KIT, 392/60



Kelompok musik Hinton (anak-anak), Tana Toraja, Mamasa,
Sulawesi Selatan.

[± 1940]

[ANRI: KIT, 304/12](#)

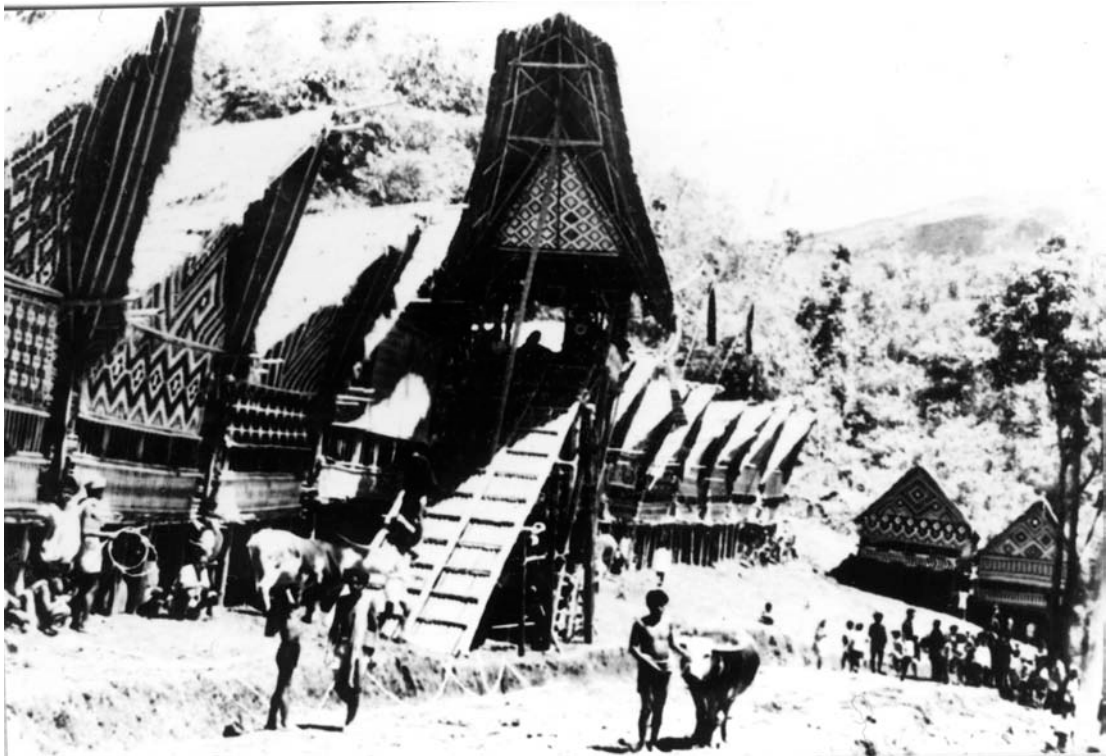


Alat Musik gendang terbuat dari tembaga,
berasal dari Kerajaan Goa, Sulawesi Selatan
[± 1940]

[ANRI: KIT, 914/73](#)



Beberapa lelaki Toraja, Sulawesi Selatan memainkan salah satu alat musik khas Toraja, seruling,
[± 1940]
[ANRI: KIT, 910/25](#)



Barisan rumah Toraja, paling tengah dijadikan sebagai rumah duka, Rantepao, Toraja, Sulawesi Selatan.

[± 1940]

ANRI: KIT, 393/44



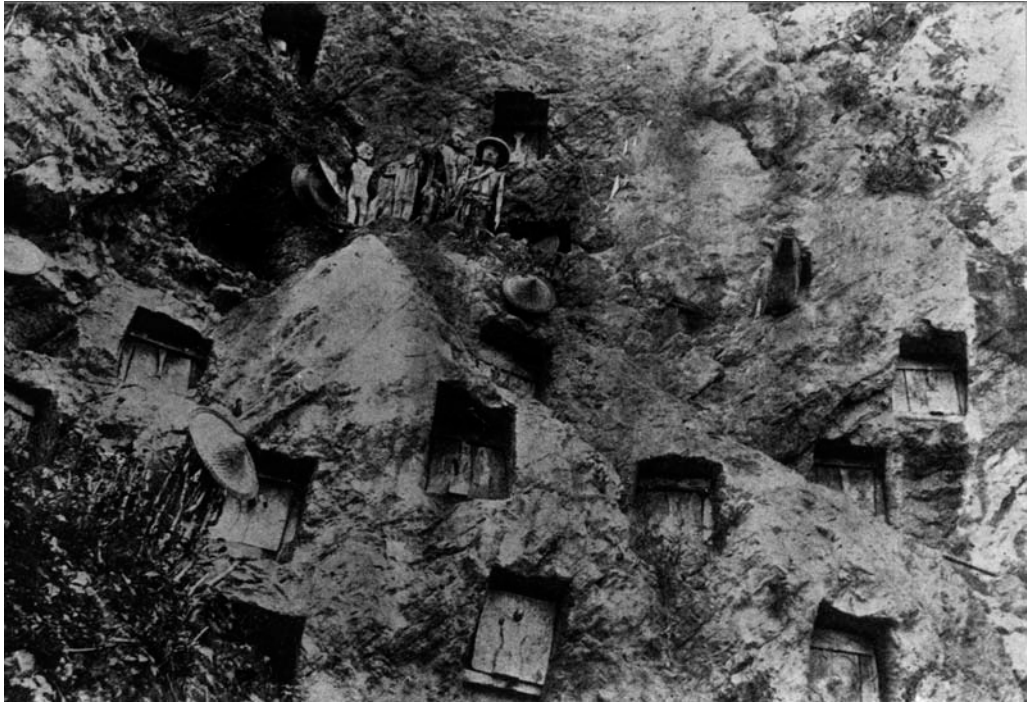
Makam dari batu di Rantepao, Sulawesi Selatan.
[± 1940]
ANRI: KIT, 392/70



Rumah pemakaman dalam bentuk rumah Toraja
dan makam dari batu, Sulawesi Selatan.

[± 1940]

[ANRI: KIT, 393/42](#)



Makam Suku Toraja dalam gua, Toraja, Sulawesi Selatan.

[± 1940]

ANRI: KIT, 48/90



Wanita Toraja dengan putrinya dalam pakaian adat Toraja,
Sulawesi Selatan.

[± 1940]

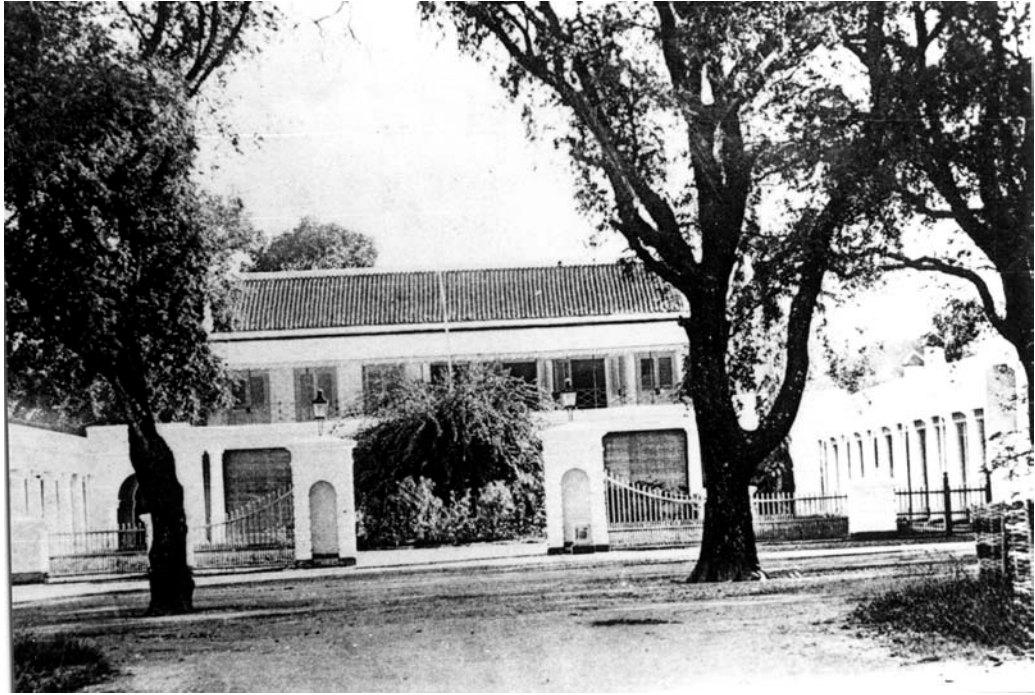
ANRI: KIT, 48/30



Rumah panggung Raja Goa ke V, Makassar, Sulawesi Selatan.

[± 1940]

ANRI: KIT, 221/70



Rumah Gubernur di Makassar, Sulawesi Selatan.

[± 1940]

ANRI: KIT, 54/45



Presiden Soekarno berziarah ke Makam Pangeran Diponegoro,
di Makassar, Sulawesi Selatan,
28 Juli 1950.

[ANRI: Kempen, 500728 RR 1-43](#)



Presiden Soekarno berziarah ke Makam Pahlawan Nasional
Robert Wolter Monginsidi di Makassar,
28 Juli 1950.

[ANRI: Kempen, 500728 RR 1-29](#)



Presiden Soekarno mendapat hadiah sebilah keris dari Raja Goa, ketika berkunjung ke Makassar, Sulawesi Selatan, 28 Juli 1950.

[ANRI: Kempen, 500728 RR 7](#)



Profil gadis Makassar dengan pakaian adatnya,
1 Agustus 1950.

[ANRI: Kempen, 500801 RR 13](#)



Presiden Soekarno berfoto bersama para gadis
dengan menggunakan pakaian adat Makassar,
1 Agustus 1950.

[ANRI: Kempen, 500801 RR 152.](#)



Makam Raja-raja Goa abad ke-19 yang letaknya
di Kampung Katangka, Makassar, Sulawesi Selatan
Juli 1951.

[ANRI: Kempen, M. 5878](#)



Orkes Kulu-kulu Wa dari Sulawesi Selatan
ketika sedang bermain di Studio RRI Makassar,
28 November 1952.

[ANRI: Kempen, 521128 RR 1](#)



Profil laki-laki Suku Bugis dalam pakaian adat dengan gendang sebagai salah satu alat kesenian khas Bugis, Sulawesi Selatan
29 November 1952.

[ANRI: Kempen, 521128 RR 4](#)



Makam Pangeran Diponegoro dan keluarganya di Makassar,
8 Oktober 1953.

[ANRI: Kempen, 531008 RR 2-3](#)



Profil laki-laki suku Bone dari keluarga raja
dengan berpakaian kebesaran kerajaan,
9 Oktober 1953.

ANRI: Kempen, K 531009 RR 3 – 13



Pertunjukan Tari Pakarena oleh gadis-gadis Palopo pada malam kesenian di rumah Kepala Daerah Palopo, Sulawesi Selatan 10 Oktober 1953.

ANRI: Kempen, 531010 RR 2-1



Rumah Adat Bugis di Palopo, Sulawesi Selatan
11 Oktober 1953.

ANRI: Kempen, K 531011 RR 1-2



Makam Sultan Hasanuddin di Makassar,
10 Oktober 1957.

[ANRI: Kempen, 571010 RR 4-7](#)



Barisan Penari Cakalele menyambut kedatangan
Presiden Soekarno di Lapangan Terbang Hasanuddin,
Makassar, Sulawesi Selatan
4 Januari 1962.

[ANRI: Kempen, 620104 RR 14](#)

SAMBUTAN PJM PRESIDEN SUKARNO SESUDAH MALAM KESENIAN
SULAWESI DI GEDUNG OLAAHRAHA, PARE-PARE,
5 JANUARI 1962.

Saudara-Saudara sekalian,

USDEK, U-S-D-E-K, UUD '45, Sosialisme, Demokrasi Terpimpin,
Ekonomi Terpimpin, Kepribadian.

Satu bangsa yang tidak berdiri diatas kepribadian sendiri, sebenarnya bukan bangsa. Bangsa adalah satu individualiteit. Sebagaimana individu, perseorangan, juga bangsa mempunyai tjorak djiwa sendiri, mempunyai "raison d'être" sendiri, mempunyai karakter sendiri, mempunyai kepribadian sendiri. Manusia berupa-ruya kepribadiannya. Ada manusia yang peramah, ada manusia yang pemarah, ada manusia yang suka seni, ada manusia yang suka mentjari harta-benda. Itu semuanya adalah kepribadian-kepribadian daripada individualiteit. Maka bangsapun mempunyai kepribadian, djikalau ia benar-benar bangsa. Ada bangsa yang kepribadiannya suka kepada seni, misalnja bangsa Italia. Ada bangsa yang kepribadiannya suka kepada falsafah, misalnja bangsa India. Ada bangsa yang kepribadiannya suka mentjari kekuasaan, misalnja bangsa Inggris. Tiap-tiap bangsa mempunyai kepribadian sendiri, djikalau ia benar-benar satu bangsa.

Maka, Saudara-Saudara mengetahui bahwa didalam perdjangan kita yang berpuluh-puluh tahun ini, kita hendak mendjadi satu bangsa yang benar-benar bangsa. Maka oleh karena itulah saja selalu tandaskan, djangan melupakan kepribadian sendiri.

Tari-tarian yang saja lihat di Makassar, tari-tarian yang saja lihat di Pare-Pare, dan demikian pula tari-tarian yang saja lihat didaerah-daerah lain, di Atjeh, didaerah Batak, di Minangkabau, di Lampung, di Pasundan Djawa Barat, di Djawa Tengah, di Madura, di Bali, di Lombok, di Maluku, didaerah-daerah Sulawesi, tampaknya saja Saudara-Saudara berbeda-beda, tetapi garis besar daripada tari-tarian dan seni itu yang kita lihat didaerah-daerah kita itu mempunyai dasar garis yang sama. Dan itulah yang dinamakan kepribadian Indonesia didalam hal seni tari.

Misalnja apa yang saja lihat dibelakang saja sekarang ini, garis besarnya saja lihat djuga di Minangkabau, garis besarnya saja lihat djuga di Palembang, garis besarnya saja lihat djuga di Bengkulu, garis besarnya saja djuga melihat di Bali, garis besarnya saja djuga melihat di Djawa Tengah. Di Djawa Tengah orang namakan pa yang Saudara lihat itu amben tengah, atau kamar tengah. Satu bagian yang dianggap keramat dalam rumah tangga di Djawa Tengah.

Maka oleh

Bagian awal Sambutan Presiden Soekarno pada Malam Kesenian
Sulawesi di Gedung Olahraga, Pare-Pare, Sulawesi Selatan
5 Januari 1962

ANRI: Pidato Presiden tahun 1950-1959 No.360



Rumah Adat Toraja, Sulawesi Selatan
13 Desember 1962.
ANRI: Djapen Prop Sulselra, M. 16842



Tari Paruju oleh gadis-gadis Mandar, Sulawesi Selatan,
1962

ANRI: Kempen, 81205 RR 9

OLAH RAGA dan KESEHATAN

Presiden Soekarno ketika sedang menjenguk pasien
di Rumah Sakit Makassar, Sulawesi Selatan
1 Agustus 1950.
[ANRI: Kempen, 500801 RR 128](#)

Pembukaan sebuah pavilyun kanak-kanak penderita penyakit kusta di Rumah Sakit Kusta Jongaya, Makassar, Sulawesi Selatan
1 November 1952.
[ANRI: Djapen Prosul, M. 7784](#)

Penyuntikan untuk memberantas penyakit TBC
di Makassar, Sulawesi Selatan
26 Agustus 1954.
[ANRI: Djapen Prosul, M. 10149](#)

Suasana pada hari pembukaan Pekan Olah Raga Nasional IV
di Stadion Makassar, Sulawesi Selatan.

28 September 1957.

ANRI: Kempen, 570928 RR 2-3

Gedung Stadion Makassar tempat diselenggarakannya
Pekan Olah Raga Nasional IV di Makassar, Sulawesi Selatan
30 September 1957.

ANRI: Kempen, 570930 RR 2-1

Pada perlombaan lari jauh 10.000 meter, Pekan Olah Raga Nasional IV di Makassar, seorang atlit dari Sulawesi Selatan yang sudah lelah ditolong oleh para juri,
1 Oktober 1957.

[ANRI: Kempen, 571001 RR 1-34](#)

Penyerahan medali kepada pemenang perlombaan lari
800 meter putra pada Pekan Olah Raga Nasional IV
di Makassar, Sulawesi Selatan.

5 Oktober 1957.

[ANRI: Kempen, 571005 RR 1-3](#)

Persatuan Sepak Bola Makassar (PSM) sebagai juara nasional
Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI),
10 September 1959.

[ANRI: Djapen Prosul, M. 15547](#)

DAFTAR ARSIP

Citra Sulawesi Selatan dalam Arsip

A.GEOGRAFI

1. Peta Kota Makassar dan sekitarnya, [\pm 1910]
ANRI: Dinas Topografi No. C. 79
Halaman: 36
2. Peta Topografi Selat Makassar, Sulawesi Selatan, 1922
ANRI: Dinas Topografi No. 2649/Blas-12h/148
Halaman: 37
3. Peta Topografi Bulukumba, Sulawesi Selatan, 1922
ANRI: Dinas Topografi No. 2592/Blad 7 C/147
Halaman: 38
4. Peta Topografi Jenepono, Sulawesi Selatan, 1923
ANRI: Dinas Topografi No. 2585/Blad.5 D/147
Halaman: 39
5. Peta Topografi Bantaeng, Sulawesi Selatan, 1924
ANRI: Dinas Topografi No. 2687/152
Halaman: 40
6. Peta Topografi Makassar, Sulawesi Selatan, 1924
ANRI: Dinas Topografi No. 2594/Blad 12 B/147
Halaman: 41
7. Peta Topografi Maros, Sulawesi Selatan, 1924
ANRI: Dinas Topografi No. 2596/Blad 13 A
(Alg. No. XXXIV-75 A)/147
Halaman: 42
8. Peta Topografi Watampone, Sulawesi Selatan, 1926
ANRI: Dinas Topografi No. 2625/Blad 31 D
(Alg. No. XXXII-77 D)/147
Halaman: 43
9. Peta Topografi Pare-Pare, Sulawesi Selatan, 1929
ANRI: Dinas Topografi No. 2626/Blad 75/XXXI A/147
Halaman: 44

10. Peta Topografi Watan Soppeng, Sulawesi Selatan, 1933
ANRI: [Dinas Topografi 2618/Blad 76/XXXII A/147](#)
Halaman: 45
11. Pemandangan di tepi Pantai Makassar, Sulawesi Selatan
12 Agustus 1953
ANRI: [Kempen, 530812 RR 2-2](#)
Halaman: 46
12. Pemandangan di Pantai Losari Makassar, Sulawesi Selatan
5 Oktober 1957
ANRI: [Kempen, 571005 RR 4-2](#)
Halaman: 47
13. Peta Selat Makassar, Sulawesi Selatan, 1968
ANRI: [Marzuki Arifin No. 23](#)
Halaman: 48

B.POLITIK DAN PEMERINTAHAN

14. Bagian awal dan akhir dari Perjanjian Bongaya, yang memaksa Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Goa mengakhiri perlawanan terhadap Kolonialisme Belanda 1667
ANRI: [Makassar 273.a](#)
Halaman: 50
15. Bagian awal sejarah singkat mengenai Pemerintah Makassar, Tahun [±1669]
ANRI: [Makassar No. 294](#)
Halaman: 51
16. Bagian akhir dari Akte Pengangkatan Raja Bone, Aru Palaka, 20 Agustus 1698
ANRI: [Makassar 273 t /20](#)
Halaman: 52

17. Intisari Kontrak antara Pemerintah Hindia Belanda dengan Kerajaan Goa, 22 Februari 1701
[ANRI: Makassar 273/2](#)
[Halaman: 53](#)
18. Bagian akhir dari *Memorie van Overgave* (Memori Serah Terima Jabatan) Residen Makassar antara Cornelis Beernick dan Willem de Roo, 17 Juni 1703
[ANRI: Makassar No. 157](#)
[Halaman: 54](#)
19. Perjanjian antara Pemerintah Hindia Belanda dengan Raja Bone, 1 Desember 1741
[ANRI: Makassar 274.a.1](#)
[Halaman: 55](#)
20. Bagian awal dan akhir dari Perjanjian antara Pemerintah Hindia Belanda dengan Makaraeng dari Kerajaan Goa, 30 Agustus 1770
[ANRI: Makassar 274.g/7](#)
[Halaman: 56](#)
21. Bagian awal Laporan Politik Umum dari Pemerintah Sulawesi (Celebes) dan Daerah Kekuasaannya, 1856
[ANRI: Makassar 1.2](#)
[Halaman: 57](#)
22. Bagian awal dari Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 11 tanggal 22 Juni 1896 mengenai Pulau Nusa Lima adalah merupakan bagian dari wilayah Tallo, Sulawesi Selatan
[ANRI: BT 22 Juni 1896 No.11](#)
[Halaman: 58](#)
23. Surat Perjanjian Raja Makassar dengan Pemerintah Hindia Belanda tanggal 23 November 1719
[ANRI: Makassar 374/16](#)
[Halaman: 59](#)

24. Seorang Bupati dari Mandali, Sulawesi Selatan, didampingi anaknya, 1913
[ANRI: KIT, 327/32](#)
[Halaman: 60](#)

25. Surat dari *De Assistent Resident van Macassar* (Asisten Residen Makassar) kepada *Directur van Binnenlandsch Bestuur* (Direktur Departemen Dalam Negeri) tentang penunjukan tempat tinggal sementara Ir. Soekarno selama pengasingan di Makassar, Sulawesi Selatan, 26 November 1937
[ANRI: Binnenlandsch Bestuur No. 2076](#)
[Halaman: 61](#)

26. Surat dari Komandan Netherlands Indies Civil Administration (NICA) Makassar kepada Komandan NICA di Morotai tentang usul pemisahan pemerintahan sendiri Arumpone dari Bone dan anaknya Andi Pangeran, 27 November 1945, salinan.
[ANRI: Algemeene Secretarie No. 135](#)
[Halaman: 62](#)

27. Arumpone Sultan Bone sedang berpidato dalam acara Pelantikan Adat Tinggi di Sulawesi Selatan, 12 November 1948
[ANRI: RVD, 81112 RR 7](#)
[Halaman: 63](#)

28. Pelantikan Adat Tinggi Sulawesi Selatan, dari kiri ke kanan: Raja Goa, Arumpone Sultan Bone dan Sultan Buton, masing-masing dalam pakaian adat tampak Sultan Buton memakai baju kebesaran abad ke-16, 12 November 1948
[ANRI: RVD, 81112 RR 4](#)
[Halaman: 64](#)

29. Surat Keputusan Menteri Urusan Dalam Negeri Negara Indonesia Timur mengenai perubahan pembagian tata usaha dari *afdeling* Makassar dari bekas Karesidenan Selebes Selatan, 19 Januari 1950
[ANRI: RIS 164](#)
[Halaman: 65](#)
30. Presiden Soekarno bersama masyarakat India di Makassar, 1 Agustus 1950
[ANRI: Kempen, 500801 RR 23](#)
[Halaman: 66](#)
31. Bagian awal dan akhir Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1951 tentang Pembekuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan, Persiapan Pembubaran Daerah Sulawesi Selatan dan Pembagian Wilayahnya dalam Lingkungan Daerah Otonom Provinsi Sulawesi, 6 September 1951
[ANRI: Sekretariat Kabinet, Peraturan Pemerintah No. 88](#)
[Halaman: 67](#)
32. Presiden Soekarno tiba di Makassar dalam rangka kunjungannya ke Sulawesi Selatan, disambut oleh rakyat dengan meriah, 11 November 1951
[ANRI: Kempen, K 511111 RR 18](#)
[Halaman: 68](#)
33. Surat dari Gubernur Provinsi Sulawesi kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengenai persiapan pengadaan Panitia Penuntut Provinsi Sulawesi Selatan, 16 Januari 1952
[ANRI: Kabinet Presiden 1950-1959 No. 836](#)
[Halaman: 69](#)

34. Kunjungan Perdana Menteri Wilopo dan Menteri Dalam Negeri Mr. Mohammad Roem dalam rangka kunjungannya ke Makassar, Sulawesi Selatan, melihat harta benda negara dari Raja Goa di Makassar, 2 Juli 1952
[ANRI: Kempen, 520702 RR 2](#)
[Halaman: 70](#)
35. Bagian awal dan akhir Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Sulawesi Selatan dan Pembagian Wilayahnya dalam Daerah-daerah Swatantra, 12 Agustus 1952
[ANRI: Sekretaris Kabinet, Peraturan Pemerintah No. 138](#)
[Halaman: 71](#)
36. Kata pengantar Kepala Daerah Makassar pada upacara peresmian pemindahan ibukota daerah Swatantra Makassar ke Sungguminasa, Januari 1953
[ANRI: Muhammad Yamin No. 329](#)
[Halaman: 72](#)
37. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1953 tentang Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1952 "Peraturan tentang Pembubaran Daerah Sulawesi Selatan dan Pembagian Wilayahnya dalam Daerah-daerah Swatantra", 7 Januari 1953
[ANRI: Sekretaris Kabinet, Peraturan Pemerintah No. 157](#)
[Halaman: 73](#)
38. Sambutan meriah dari masyarakat menyambut kedatangan Presiden Soekarno di Pare-Pare, dalam rangka kunjungannya ke Sulawesi Selatan, 5 Februari 1953
[ANRI: Kempen, K 530205 RR 13](#)
[Halaman: 74](#)

39. Bagian awal Pidato Kepala Daerah Makassar pada Upacara Peringatan Pahlawan Hasanuddin di Balai Pertemuan Masyarakat di Makassar, Sulawesi Selatan, 12 Juni 1954
[ANRI: Muhammad Yamin No. 329a](#)
[Halaman: 75](#)
40. Presiden Soekarno dan Ibu Fatmawati tiba di Bandar Udara Mandai Makassar, dalam rangka kunjungannya ke Sulawesi Selatan, 15 Juli 1954
[ANRI: Kempen, 540715 RR 6](#)
[Halaman: 76](#)
41. Gubernur Sulawesi Lanto Daeng Pasewang dan Panglima Teritorial VII menyambut kedatangan Wakil Presiden Mohammad Hatta dan Ibu Rahmi Hatta di Bandar Udara Makassar, dalam rangka kunjungannya ke Sulawesi Selatan, 22 Oktober 1954
[ANRI: Djapen Sulawesi, M 10534](#)
[Halaman: 77](#)
42. Wakil Presiden Mohammad Hatta dan Ibu Rahmi Hatta dalam rangka kunjungan ke Sulawesi, menghadiri Rapat Raksasa didampingi Gubernur Sulawesi Lanto Daeng Pasewang, 22 Oktober 1954
[ANRI: Kempen, K 541022 RR 1-3](#)
[Halaman: 78](#)
43. Pelaksanaan Pemilihan Umum di Makassar,
29 September 1955
[ANRI: Djapen Sulawesi, M. 11856](#)
[Halaman: 79](#)
44. Bagian awal Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1957 tentang Pembubaran Daerah Makassar dan Pembentukan Daerah Goa, Daerah Makassar dan Daerah Jeneponto-Takalar, 16 Januari 1957
[ANRI: Sekretaris Kabinet, Undang-Undang Darurat No. 137](#)
[Halaman: 80](#)

45. Bagian awal dan akhir Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1957 tentang Pembubaran Daerah Luwu dan Pembentukan Daerah Tana Toraja dan Daerah Luwu, 16 Januari 1957
[ANRI: Sekretaris Kabinet, Undang-Undang Darurat No. 138](#)
Halaman: 81
46. Bagian awal dan akhir Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1957 tentang Pembubaran Daerah Bone dan Pembentukan Daerah Bone, Daerah Wajo dan Daerah Soppeng, 16 Januari 1957
[ANRI: Sekretaris Kabinet, Undang-Undang Darurat No. 139](#)
Halaman: 82
47. Pelantikan Andi Mappanjuki menjadi Kepala Daerah/Raja Bone di Bone, Sulawesi Selatan, 21 Desember 1957
[ANRI: Djapen Sulawesi, M. 14415](#)
Halaman: 83
48. Pelantikan Abdul Latief Daeng Massikki menjadi Walikota Makassar, di Makassar, Sulawesi Selatan, 7 Januari 1958
[ANRI: Djapen Sulawesi, M. 14451](#)
Halaman: 84
49. Bagian awal dan akhir Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pembentukan Provinsi Administratif Sulawesi Selatan dan Provinsi Administratif Sulawesi Utara, 31 Maret 1960
[ANRI: Sekretaris Kabinet, Perpres No. 20](#)
Halaman: 85
50. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Ipik Gandamana membacakan sumpah pada Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan-Tenggara dari Andi Pangerang kepada H. Andi Rivai. 20 April 1960
[ANRI: Djapen M 15836](#)
Halaman: 86

51. Gubernur Sulawesi Selatan Tenggara H. Andi Rivai pada Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan Tenggara dari Andi Pangerang kepada H. Andi Rivai, 20 April 1960
ANRI: Djapen M 15845
Halaman: 87
52. Bagian awal dan akhir dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan–Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara–Tengah, 13 Desember 1960.
ANRI: Sekretariat Kabinet Perpu 77
Halaman: 88
53. Presiden Soekarno dan tamunya Mayor G. Titou Austranaul II disambut barisan penari Cakalele dalam rangka menghadiri Rapat Raksasa “Pembebasan Irian Barat” di Makassar, Sulawesi Selatan, 4 Januari 1962.
ANRI: Kempen, 620104 RR 5
Halaman: 89
54. Kunjungan Presiden Soekarno ke Makassar dalam rangka menghadiri Rapat Raksasa “Pembebasan Irian Barat” di Makassar, Sulawesi Selatan, 4 Januari 1962
ANRI: Kempen, M 16589/1
Halaman: 90
55. Bagian awal Pidato Presiden pada Rapat Umum di Bantaeng, Sulawesi Selatan yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris untuk dipublikasikan, 1 Juli 1962
ANRI: Pidato Presiden tahun 1950-1959 No.363
Halaman: 91

56. Bagian awal Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.53-362 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 1984/1985. 17 Mei 1984
[ANRI: Sekretariat Wakil Presiden Umar Wirahadikusuma No. 14](#)
[Halaman: 92](#)

C.PERTAHANAN DAN KEAMANAN

57. Sketsa Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Goa yang melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda di Sulawesi terutama Sulawesi Selatan pada abad ke-17. Atas jasa-jasanya, Sultan Hasanuddin dianugerahi Pemerintah RI sebagai Pahlawan Nasional,
[ANRI: Kempen, R 530312 FG 1-1](#)
[Halaman: 94](#)
58. Riwayat singkat Robert Wolter Monginsidi yang dibuat oleh *Netherlands Expeditionary Forces Intelligence Service* (NEFIS), Februari 1947
[ANRI: NEFIS No. 49](#)
[Halaman: 95](#)
59. Sketsa Robert Wolter Monginsidi,
[ANRI: Kempen, R 521009 FG 1-1](#)
[Halaman: 96](#)
60. Presiden Soekarno berfoto bersama keluarga Pahlawan Nasional Robert Wolter Monginsidi, 1 Agustus 1950.
[ANRI: Kempen, 500801 RR 23](#)
[Halaman: 97](#)
61. Komisi Parleментар Makassar mengunjungi rumah dimana Robert Wolter Monginsidi tertangkap tentara Belanda, 7 November 1950
[ANRI: Djapen Sulawesi M. 5435](#)
[Halaman: 98](#)

62. Surat dari Ikatan Pemuda Indonesia Maluku kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat mengenai resolusi tentang aksi pembersihan di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Westerling, 30 Januari 1950
[ANRI: Kabinet Presiden RIS No. 275](#)
[Halaman: 99](#)

63. Pasukan TNI pimpinan H.V. Worang (Batalion Worang) mendarat di Jenepono untuk merebut Makassar yang diduduki pemberontak Andi Azis, 20 April 1950
[ANRI: IPPHOS 5/29](#)
[Halaman: 100](#)

64. Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Koordinator Keamanan Sri Sultan Hamengku Buwono IX ketika tiba di Bandara Hassanudin, Makassar dalam rangka kunjungan ke Makassar, 24 Februari 1951
[ANRI: Kempen, 5647](#)
[Halaman: 101](#)

65. Surat dari Kepala Staf Angkatan Perang kepada Presiden Republik Indonesia tentang usul agar Perdana Menteri dan Menteri Penerangan mendesak secara personal kepada Pemimpin-pemimpin Makassar untuk berusaha nyata agar Kahar Muzakkar memenuhi panggilan pemerintah.
29 Agustus 1951
[ANRI: Kabinet Presiden 1950-1959 No.1762](#)
[Halaman: 102](#)

66. Penyerahan diri Andi Sose beserta pasukannya kembali ke pangkuan Republik Indonesia, di Makalla Sulawesi Selatan.
4 April 1952
[ANRI: Djamal Marsudi No. 190](#)
[Halaman: 103](#)

67. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 199 tahun 1953 tentang Pengangkatan Hakim-Hakim Perwira pada Pengadilan Tentara di Makassar, 18 November 1953
[ANRI: Sekretaris Kabinet, Keppres 882](#)
[Halaman: 104](#)

68. Konferensi Pers Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal A.H.Nasution di Lapangan Terbang Mandai, Makassar, menjelaskan tentang Operasi Pembebasan Irian Barat yang akan bermarkas di Makassar, Sulawesi Selatan. Tampak Letnan Kolonel M. Yusuf mendampingi KASAD, 30 Maret 1960.
[ANRI: Kempen, K 600330 RR 1](#)
[Halaman: 105](#)

69. Pertemuan Menteri Keamanan Nasional/Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal A.H. Nasution dengan Mayor Gerungan dari kelompok Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) di perbatasan Bone dan Soppeng, Sulawesi Selatan, 31 Maret 1960
[ANRI: Kempen, K 600329 RR 3-3](#)
[Halaman: 106](#)

70. Dari kiri ke kanan: Kolonel M.Yusuf, Panglima Operasi Mandala Mayor Jenderal Soeharto, Letnan Jenderal Achmad Yani dan Letnan Jenderal Gatot Subroto saat menghadiri Timbang Terima Deputi Kepala Staf Angkatan Darat Wilayah Indonesia Timur di Makassar, 22 Januari 1962.
[ANRI: Djapen Prop Sulselra, M 16641](#)
[Halaman: 107](#)

71. Kedatangan gelombang I Pasukan Sukarelawan Pembebasan Irian Barat di Makassar, Sulawesi Selatan. 15 Februari 1962
[ANRI: Djapen Prop Sulselra, M. 16668.](#)
[Halaman: 108](#)

72. Panglima Operasi Mandala Mayor Jenderal Soeharto menyambut kedatangan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal A.H. Nasution di Lapangan Terbang Panaikan, Makassar dalam rangka menghadiri peringatan Hari Pahlawan,
10 November 1962
[ANRI: Djapen Prosul Sulselra, M 16807](#)
[Halaman: 109](#)
73. Bagian awal Pidato Presiden Soekarno pada upacara Pembubaran "Komando Mandala" di Makassar, Sulawesi Selatan, 6 Mei 1963
[ANRI: Pidato Presiden Soekarno No. 492](#)
[Halaman: 110](#)
74. Bagian awal Amanat Presiden Soekarno pada peringatan 40.000 korban Westerling di Sulawesi Selatan, di Senayan, Jakarta, 10 Desember 1964
[ANRI: Pidato Presiden Soekarno No. 676](#)
[Halaman: 111](#)
75. Bagian awal Amanat Presiden Soekarno pada Peringatan Hari Pahlawan dan Pemberian Tanda Jasa Bintang Mahaputra III kepada Robert Wolter Monginsidi di Istana Negara, 10 November 1965
[ANRI: Pidato Presiden Soekarno No. 882](#)
[Halaman: 112](#)

D. PERTAMBAHAN

76. Gudang minyak di Pare-Pare, Sulawesi Selatan, Mei 1951
[ANRI: Kempen, 515001](#)
[Halaman: 114](#)

77. Keputusan Kepala Direktorat Pertambangan Departemen Pertambangan Nomor 472/VIII/63 mengenai perpanjangan ijin sementara melakukan penyelidikan pertambangan nikel di Sulawesi Selatan, 21 September 1963
[ANRI: Ekonomi Keuangan dan Pembangunan 753](#)
Halaman: 115
78. Surat dari Direktur Utama Badan Pimpinan Umum Perusahaan-Perusahaan Tambang Umum Negara kepada Menteri Pertambangan Minyak dan Gas Bumi mengenai *contractorship* dalam penambangan bijih nikel di Soroako, Sulawesi Selatan, 7 April 1966
[ANRI: Ekonomi Keuangan dan Pembangunan 753](#)
Halaman: 116
79. Surat dari Deputi Menteri Pertambangan kepada Menteri Pertambangan dan Migas mengenai Kontrak Kerja Badan Pertambangan Umum Tambang Umum dengan *General Mining Co. Ltd.* tentang tambang nikel di Soroako, Sulawesi Selatan, 11 Juni 1966
[ANRI: Ekonomi Keuangan dan Pembangunan 753](#)
Halaman: 117

E. PEREKONOMIAN DAN PERDAGANGAN

80. Suasana Pasar Makale, Sulawesi Selatan, [± 1930]
[ANRI: KIT, 373/72](#)
Halaman: 119
81. Para pekerja wanita sedang menyortir biji damar di Makassar, Sulawesi Selatan [± 1930]
[ANRI: KIT, 649/70](#)
Halaman: 120

82. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Nomor 24/1952 mengenai pemberian beras dari pemerintah untuk pegawai negeri yang ada di luar Pare-Pare dan daerah bawahan Pare-Pare, Sulawesi Selatan, 21 Januari 1952
[ANRI: Kabinet Presiden 1950-1959 No.693](#)
[Halaman: 121](#)
83. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Nomor 188/1952 mengenai pembatalan pemberian beras dari pemerintah untuk pegawai negeri yang ada di daerah bawahan Enrekang, Pare-Pare dan kepada pegawai tersebut hanya akan diberikan tunjangan uang sebesar 1 rupiah untuk tiap satu kilo gram beras yang akan didapatnya. 28 Maret 1952
[ANRI: Kabinet Presiden 1950-1959 No.693](#)
[Halaman: 122](#)
84. Surat dari Menteri Perekonomian kepada Dewan Menteri tentang pengadaan peraturan khusus pemberian tunjangan untuk kalangan akademisi yang berharga dan berjasa, 17 Oktober 1953
[ANRI: Kabinet Perdana Menteri RI No. 026](#)
[Halaman: 123](#)
85. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 183 tahun 1954 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kota Makassar mengenai Pemungutan Pajak Ijin Rumah Kopi dalam Daerah Kota Makassar tanggal 17 Desember 1953 No. 38/DPRD, 22 September 1954
[ANRI: Sekretaris Kabinet, Keppres 1074](#)
[Halaman: 124](#)
86. Suasana pasar tekstil di Makassar, Sulawesi Selatan 26 November 1965.
[ANRI: Kempen, 65-14911](#)
[Halaman: 125](#)

87. Suasana pasar tradisional di Makassar, Sulawesi Selatan
26 November 1965
[ANRI: Kempen, 1-24-1](#)
Halaman: 126
88. Surat dari Kepala Perwakilan Departemen Perdagangan Dalam Negeri/Urusan Perdagangan Luar Negeri Provinsi Sulawesi Selatan kepada Menteri Perdagangan dan Koperasi mengenai jenis barang yang dapat diimpor dalam rangka bonus ekspor daerah, 13 Juli 1966
[ANRI: Ekonomi Keuangan dan Pembangunan No. 422](#)
Halaman: 127

F. PERHUBUNGAN

89. Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan sebagai salah satu tempat singgah pelayaran/perdagangan yang cukup ramai di Indonesia Bagian Timur, [\pm 1930]
[ANRI: KIT, 55/17](#)
Halaman: 129
90. Kerbau selain digunakan sebagai alat pertanian juga digunakan sebagai salah satu alat transportasi di Makassar, Sulawesi Selatan, [\pm 1930]
[ANRI: KIT, 674/78](#)
Halaman: 130
91. Kapal Motor "Bango" sebagai salah satu alat transportasi laut di Makassar, Sulawesi Selatan, 11 Desember 1952
[ANRI: Djapen Sulawesi, M.7876](#)
Halaman: 131
92. Pemandangan di Pelabuhan Makassar dengan perahu layar yang akan memuat rotan, 12 Agustus 1953
[ANRI: Kempen, 530812 RR 5](#)
Halaman: 132

93. Lalu lintas di Kota Makassar dan becak sebagai salah satu alat transportasi yang murah, 8 Oktober 1953
[ANRI: Kempen, K531008 RR 3-3](#)
[Halaman: 133](#)

94. Perahu-perahu Layar Bugis sebagai salah satu alat transportasi sedang berlayar di sekitar Pelabuhan Palopo, Sulawesi Selatan, 11 Oktober 1953
[ANRI: Kempen, 531011 RR 3](#)
[Halaman: 134](#)

95. Sepeda merupakan salah satu alat transportasi yang menyehatkan dan sudah mulai dimanfaatkan masyarakat di Makassar, Sulawesi Selatan, 26 November 1953
[ANRI: Kempen, K 531126 RR 1-9](#)
[Halaman: 135](#)

96. Undang-Undang Nomor 63 tahun 1954 tentang Penetapan Bagian *Indische Bedrijven Wet* (IBW/Peraturan Perusahaan Indonesia) Pelabuhan Makassar dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1952 dan 1953, 29 November 1954
[ANRI: Sekretaris Kabinet, Undang-Undang No. 156](#)
[Halaman: 136](#)

97. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 328 Tahun 1960 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Tk. II Bone Mengenai Pemungutan Pajak Sepeda, yang Ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah yang Bersangkutan Pada Tanggal 14 Juli 1960, 14 Desember 1960
[ANRI: Sekretaris Kabinet, Keppres No. 1962](#)
[Halaman: 137](#)

98. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 330 tahun 1960 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotapraja Makassar Mengenai Pengadaan Dan Pemungutan Pajak Kendaraan dalam Daerah Kotapraja Makassar.
14 Desember 1960
[ANRI: Sekretaris Kabinet, Keppres No. 1964](#)
[Halaman: 138](#)

G. PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

99. Menyadap karet di Malili, Sulawesi Selatan, [± 1930]
[ANRI: KIT, 650/71](#)
[Halaman: 140](#)
100. Pembuatan garam di Sulawesi Selatan, [± 1930]
[ANRI: KIT, 522/58](#)
[Halaman: 141](#)
101. Pembangunan irigasi di Sungai Sadang, Sulawesi Selatan [± 1940]
[ANRI: KIT, 556/48](#)
[Halaman: 142](#)
102. Persawahan di sepanjang jalan antara Makale – Rantepao, Tana Toraja, Sulawesi Selatan, 1949.
[ANRI: KIT, 932/84](#)
[Halaman: 143](#)
103. Penangkapan ikan dengan jala di Danau Tempe, Sulawesi Selatan, [± 1950]
[ANRI: RVD, 80519 RR 28](#)
[Halaman: 144](#)
104. Pintu air di Sungai Sadang, Sulawesi Selatan, 18 Juli 1951
[ANRI: Kempen, 515012](#)
[Halaman: 145](#)

105. Instruksi Gubernur /Kepala Provinsi Sulawesi Selatan selaku Komandan Komando Logistik Daerah (Kologda) Nomor EKON.12/18/20 mengenai penyempurnaan pelaksanaan pengumpulan pangan pemerintah tahun 1966, 21 Juli 1966
[ANRI: Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan 648](#)
[Halaman: 146](#)
106. Bagian awal Surat dari Menteri Pertanian kepada Gubernur/ Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengenai integrasi Inspektorat Perkebunan Besar Daerah dan Dinas Perkebunan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan. 17 Februari 1973
[ANRI: Kementerian Pertanian No. 238](#)
[Halaman: 147](#)

H. PENDIDIKAN

107. Bagian awal Surat dari Kepala Misi Pengajaran kepada Gubernur Makassar tentang dasar-dasar ketertiban di Makassar, 31 Mei 1828
[ANRI: Makassar 458.a](#)
[Halaman: 149](#)
108. Pemberian ijazah kepada peserta Kursus Pemberantasan Buta Huruf yang telah lulus di Lembaga Pemasyarakatan Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 23 November 1951
[ANRI: Kempen, 511123 RR 3](#)
[Halaman: 150](#)
109. Presiden Soekarno berbincang dengan murid-murid Sekolah Rakyat dalam rangka kunjungan kerja Presiden ke Bone, Sulawesi Selatan, 9 Oktober 1953
[ANRI: Kempen, 531009 RR 64](#)
[Halaman: 151](#)

110. Presiden Soekarno dengan para Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin di Makassar, Sulawesi Selatan, 7 November 1953.
[ANRI: Kempen, 531007 RR 7](#)
[Halaman: 152](#)
111. Wakil Presiden Mohammad Hatta tiba di Makassar dalam rangka menghadiri Pembukaan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin di Makassar, Sulawesi Selatan, 10 September 1956
[ANRI: Kempen, M. 12851](#)
[Halaman: 153](#)
112. Wakil Presiden Mohammad Hatta ketika menghadiri Pembukaan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin di Makassar, Sulawesi Selatan, 11 September 1956
[ANRI: Djapen Sulawesi, M 12867](#)
[Halaman: 154](#)
113. Surat dari Prof. Mr. Djokomarsaid Tirtodiningrat (Presiden Universitas Hasanuddin) kepada Presiden Republik Indonesia mengenai Laporan Tahunan Universitas Hasanuddin, 15 Oktober 1957
[ANRI: Kabinet Presiden 1950-1959 No.1233](#)
[Halaman: 155](#)
114. Bagian awal dari Kuliah Umum yang disampaikan oleh Presiden Soekarno di depan dosen dan mahasiswa Universitas Hasanuddin di Makassar, Sulawesi Selatan, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. 31 Oktober 1958
[ANRI: Kabinet Presiden 1950-1959 No.929](#)
[Halaman: 156](#)

115. Bagian awal Amanat Presiden Soekarno pada upacara pelantikan Arnold Mononutu sebagai Presiden Universitas Hasanuddin (Makassar) dan Ir. Otong Kosasih sebagai Presiden Institut Teknologi Bandung, 15 Juli 1960
[ANRI : Pidato Presiden Soekarno No. 197](#)
[Halaman: 157](#)
116. Panglima Operasi Mandala Mayor Jenderal Soeharto sedang menandatangani Naskah Peresmian Universitas Muslimin di Makassar, Sulawesi Selatan, 10 November 1962.
[ANRI: Deppen RI, 62-7336.](#)
[Halaman: 158](#)
117. Upacara Pemberian gelar *Doctor Honoris Causa* dalam Bidang Ilmu Politik Khusus Hubungan Antar Negara kepada Presiden Soekarno oleh Universitas Hasanuddin di Makassar, 29 April 1963.
[ANRI: Djapen Prop Sulselra, M. 16947](#)
[Halaman: 159](#)
118. Saat menerima gelar *Doctor Honoris Causa* dalam Bidang Ilmu Politik Khusus Hubungan Antar Negara kepada Presiden Soekarno oleh Universitas Hasanuddin di Makassar. Panglima Operasi Mandala Mayor Jenderal Soeharo sedang memberikan ucapan selamat kepada Presiden Soekarno,
29 April 1963
[ANRI: Djapen Prop Sulselra, M. 16950](#)
[Halaman: 160](#)
119. Bagian Awal Pidato Presiden Soekarno pada Upacara Pemberian Gelar *Doctor Honoris Causa* dalam Bidang Ilmu Politik Khusus Hubungan Antar Negara kepada Presiden Soekarno oleh Universitas Hasanuddin di Makassar, 29 April 1963
[ANRI: Pidato Presiden 1950-1959 No.485](#)
[Halaman: 161](#)

120. Kutipan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Republik Indonesia Nomor 13110/UP/II/64 tentang Pengangkatan Dr. Ruslan Abdul Gani (Menko Perhubungan dengan Rakyat) sebagai Guru Besar Luar Biasa dalam mata pelajaran Sosialisme Indonesia pada Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, 31 Desember 1964
[ANRI: Roeslan Abdul Gani No. 1372](#)
Halaman: 162
121. Bagian Awal Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 745/V/1986 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Gedung Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas di Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, 31 Mei 1986
[ANRI: Sekretariat Wakil Presiden Umar Wirahadikusuma No. 446](#)
Halaman: 163

I. LINGKUNGAN HIDUP DAN KEPENDUDUKAN

122. Kutipan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Maluku Tengah No.7/PUT/DPRDS mengenai transmigrasi dari Sulawesi Selatan, 10 Desember 1953
[ANRI: Kabinet Presiden 1950-1959 No. 2256](#)
Halaman: 165
123. Surat dari Menteri Kehutanan kepada Menteri Dalam Negeri mengenai pengelolaan Hutan Borisallo, Goa, Sulawesi Selatan, 29 Desember 1986
[ANRI: Sekretariat Wakil Presiden Umar Wirahadikusuma No. 390](#)
Halaman: 166

J. KEAGAMAAN

124. Salah satu masjid di Makassar, Sulawesi Selatan, [± 1930]
[ANRI: KIT, 808/37](#)
Halaman: 168

125. Salah satu gereja di Makassar, Sulawesi Selatan
[± 1930]
[ANRI: KIT, 757/41](#)
[Halaman: 169](#)
126. Gereja Katolik di Makassar, Sulawesi Selatan, [± 1930]
[ANRI: KIT, 809/42](#)
[Halaman: 170](#)
127. Kelenteng Cina di Makassar, Sulawesi Selatan, [± 1930]
[ANRI: KIT, 792/3](#)
[Halaman: 171](#)
128. Masyarakat Makassar melaksanakan Sholat Idul Fitri di Lapangan Karebosi, Makassar, 13 Juni 1953
[ANRI: Djapen Prosul, M.8559](#)
[Halaman: 172](#)
129. Pemandangan di depan Masjid Raya Kota Makassar,
26 November 1954.
[ANRI: Kempen, 531126 RR 4](#)
[Halaman: 173](#)
130. Surat dari I Gusti Made Ngurah (Pembimbing Masyarakat Hindu dan Budha) Kantor Wilayah Departemen Agama Sulawesi Selatan kepada Dirjen Bimas Hindu dan Budha mengenai *pensudhian* (pernyataan masuk agama Hindu), 5 Oktober 1988
[ANRI: Departemen Agama No. 156](#)
[Halaman: 174](#)
131. Bagian awal Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 249/IV/1991 tentang Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) bagi Umat Hindu Dharma di Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu, Sulawesi Selatan, 10 April 1991
[ANRI: Departemen Agama No. 047](#)
[Halaman: 175](#)

K. KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

132. Profil laki-laki Mandar dengan pakaian adat,
5 Desember 1948.
[ANRI: Kempen, 81205 RR 14](#)
Halaman: 177
133. Profil Masyarakat Adat dari Goa, Makassar dengan pakaian
adat membawa barang perhiasan Sultan Goa,
16 Desember 1948
[ANRI: Kempen, 81216 RR 9](#)
Halaman: 178
134. Surat dari Direktur Pendidikan dan Pengajaran kepada
Gubernur Jenderal Hindia Belanda tentang restorasi
Benteng Rotterdam di Makassar, Sulawesi Selatan,
25 Februari 1927
[ANRI: Algemeene Secretarie No. 732](#)
Halaman: 179
135. Sekelompok lelaki Makassar memainkan alat musik
gantang (*tromels*), kecapi dua senar dan gong, Sulawesi
Selatan, [\pm 1940]
[ANRI: KIT, 909/53](#)
Halaman: 180
136. Upacara seremonial pemakaman raja dari Goa, Sulawesi
Selatan, [\pm 1940]
[ANRI: KIT, 392/60](#)
Halaman: 181
137. Kelompok musik Hinton (anak-anak), Tana Toraja,
Mamasa, Sulawesi Selatan, [\pm 1940]
[ANRI: KIT, 304/12](#)
Halaman: 182

138. Alat Musik gendang terbuat dari tembaga, berasal dari Kerajaan Goa, Sulawesi Selatan, [\pm 1940]
[ANRI: KIT, 914/73](#)
[Halaman: 183](#)
139. Beberapa lelaki Toraja, Sulawesi Selatan memainkan salah satu alat musik khas Toraja, seruling, [\pm 1940]
[ANRI: KIT, 910/25](#)
[Halaman: 184](#)
140. Barisan rumah Toraja, paling tengah dijadikan sebagai rumah duka, Rantepao, Toraja, Sulawesi Selatan, [\pm 1940]
[ANRI: KIT, 393/44](#)
[Halaman: 185](#)
141. Makam dari batu di Rantepao, Sulawesi Selatan, [\pm 1940]
[ANRI: KIT, 392/70](#)
[Halaman: 186](#)
142. Rumah pemakaman dalam bentuk rumah Toraja dan makam dari batu, Sulawesi Selatan, [\pm 1940]
[ANRI: KIT, 393/42](#)
[Halaman: 187](#)
143. Makam Suku Toraja dalam gua, Toraja, Sulawesi Selatan, [\pm 1940]
[ANRI: KIT, 48/90](#)
[Halaman: 188](#)
144. Wanita Toraja dengan putrinya dalam pakaian adat Toraja, Sulawesi Selatan, [\pm 1940]
[ANRI: KIT, 48/30](#)
[Halaman: 189](#)
145. Rumah panggung Raja Goa ke V, Makassar, Sulawesi Selatan, [\pm 1940]
[ANRI: KIT, 221/70](#)
[Halaman: 190](#)

146. Rumah Gubernur di Makassar, Sulawesi Selatan, [± 1940]
[ANRI: KIT, 54/45](#)
[Halaman: 191](#)
147. Presiden Soekarno berziarah ke makam Pangeran Diponegoro, di Makassar, Sulawesi Selatan, 28 Juli 1950.
[ANRI: Kempen, 500728 RR 1-43](#)
[Halaman: 192](#)
148. Presiden Soekarno berziarah ke makam Pahlawan Nasional Robert Wolter Monginsidi di Makassar, 28 Juli 1950.
[ANRI: Kempen, 500728 RR 1-29](#)
[Halaman: 193](#)
149. Presiden Soekarno mendapat hadiah sebilah keris dari Raja Goa, dalam rangka kunjungan Presiden ke Makassar, Sulawesi Selatan, 28 Juli 1950.
[ANRI: Kempen, 500728 RR 7](#)
[Halaman: 194](#)
150. Profill gadis Makassar dengan pakaian adatnya, 1 Agustus 1950.
[ANRI: Kempen, 500801 RR 13](#)
[Halaman: 195](#)
151. Presiden Soekarno bersama para gadis dengan menggunakan pakaian adat Makassar, 1 Agustus 1950.
[ANRI: Kempen, 500801 RR 152.](#)
[Halaman: 196](#)
152. Makam Raja-raja Goa abad ke-19 yang letaknya di Kampung Katangka, Makassar, Sulawesi Selatan, Juli 1951.
[ANRI: Kempen, M. 5878](#)
[Halaman: 197](#)

153. Orkes Kulu-kulu Wa dari Sulawesi Selatan ketika sedang bermain di Studio RRI Makassar, 28 November 1952.
[ANRI: Kempen, 521128 RR 1](#)
Halaman: 198
154. Profil laki-laki Suku Bugis dalam pakaian adat dengan gendang sebagai salah satu alat kesenian khas Bugis, Sulawesi Selatan, 29 November 1952.
[ANRI: Kempen, 521128 RR 4](#)
Halaman: 199
155. Makam Pangeran Diponegoro dan keluarganya di Makassar, 8 Oktober 1953.
[ANRI: Kempen, 531008 RR 2-3](#)
Halaman: 200
156. Profil laki-laki Suku Bone dari keluarga raja-raja dengan berpakaian kebesaran kerajaan, 9 Oktober 1953.
[ANRI: Kempen, K 531009 RR 3 – 13](#)
Halaman: 201
157. Pertunjukan Tari Pakarena oleh gadis-gadis Palopo pada malam kesenian di rumah Kepala Daerah Palopo, Sulawesi Selatan, 10 Oktober 1953.
[ANRI: Kempen, 531010 RR 2-1](#)
Halaman: 202
158. Rumah adat Bugis beratap rumbia di Palopo, Sulawesi Selatan. 11 Oktober 1953.
[ANRI: Kempen, K 531011 RR 1-2](#)
Halaman: 203
159. Makam Sultan Hasanuddin di Makassar, 10 Oktober 1957.
[ANRI: Kempen, 571010 RR 4-7](#)
Halaman: 204

160. Barisan Penari Cakalele yang menyambut kedatangan Presiden Soekarno di Lapangan Terbang Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, 4 Januari 1962.
[ANRI: Kempen, 620104 RR 14](#)
Halaman: 205
161. Bagian Awal Sambutan Presiden Soekarno pada malam kesenian Sulawesi di Gedung Olahraga, Pare-Pare, Sulawesi Selatan, 5 Januari 1962
[ANRI: Pidato Presiden tahun 1950-1959 No.360](#)
Halaman: 206
162. Rumah adat Toraja, Sulawesi Selatan, 13 Desember 1962.
[ANRI: Djapen Prop Sulselra, M. 16842](#)
Halaman: 207
163. Tari Parudju oleh gadis-gadis Mandar, Sulawesi Selatan, 1962
[ANRI: Kempen, 81205 RR 9](#)
Halaman: 208

L. OLAH RAGA DAN KESEHATAN

164. Presiden Soekarno ketika sedang menjenguk pasien di Rumah Sakit Makassar, Sulawesi Selatan, 1 Agustus 1950.
[ANRI: Kempen, 500801 RR 128](#)
Halaman: 210
165. Pembukaan sebuah pavilyun kanak-kanak penderita penyakit kusta di Rumah Sakit Kusta Jongaya, Makassar, Sulawesi Selatan, 1 November 1952.
[ANRI: Djapen Prosul, M. 7784](#)
Halaman: 211
166. Penyuntikan untuk memberantas penyakit TBC di Makassar, Sulawesi Selatan, 26 Agustus 1954.
[ANRI: Djapen Prosul, M. 10149](#)
Halaman: 212

167. Suasana pada hari pembukaan Pekan Olah Raga Nasional IV yang bertempat di Stadion Makassar, Sulawesi Selatan. 28 September 1957.
[ANRI: Kempen, 570928 RR 2-3](#)
[Halaman: 213](#)
168. Gedung Stadion Makassar tempat diselenggarakannya Pekan Olah Raga Nasional IV di Makassar, Sulawesi Selatan, 30 September 1957.
[ANRI: Kempen, 570930 RR 2-1](#)
[Halaman: 214](#)
169. Pada perlombaan lari jauh 10.000 meter, Pekan Olah Raga Nasional IV di Makassar, seorang atlit dari Sulawesi Selatan yang sudah lelah ditolong oleh para juri, 1 Oktober 1957.
[ANRI: Kempen, 571001 RR 1-34](#)
[Halaman: 215](#)
170. Penyerahan medali kepada pemenang perlombaan lari 800 meter putra pada Pekan Olah Raga Nasional IV di Makassar, Sulawesi Selatan, 5 Oktober 1957.
[ANRI: Kempen, 571005 RR 1-3](#)
[Halaman: 216](#)
171. Persatuan Sepak Bola Makassar (PSM) sebagai juara nasional Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), 10 September 1959.
[ANRI: Djapen Prosul, M. 15547](#)
[Halaman: 217](#)

Penutup

PENUTUP

Program Citra Daerah yang dikembangkan ANRI merupakan salah satu upaya memberdayakan daerah melalui arsip. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yakni meningkatkan peran daerah di berbagai bidang, termasuk bidang kearsipan. Arsip sebagai salah satu sumber informasi yang terpercaya dapat menunjukkan keberhasilan maupun kegagalan yang dialami pada masa lalu untuk diaplikasikan secara adaptif dan kontekstual dalam merencanakan pembangunan di daerah yang semakin kompleks.

“Citra Sulawesi Selatan Dalam Arsip” diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan menyebarkanluaskannya kepada masyarakat umum, khususnya generasi muda.

Penyebarluasan ini sangat penting artinya karena dapat memberikan dorongan kepada masyarakat luas untuk mempelajari dan menggali lebih dalam lagi informasi mengenai penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam lingkup daerah. Arsip sebagai memori kolektif daerah yang merupakan bagian dari memori kolektif Bangsa berfungsi sebagai pemberi semangat dalam menumbuhkan rasa kebanggaan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.